





*REPUBLIK INDONESIA  
LIMA TAHUN SETELAH  
PROKLAMASI*





**Pembina**

Hilmar Farid  
*Direktur Jenderal Kebudayaan*

**Pengarah**

Triana Wulandari  
*Direktur Sejarah*

**Pemimpin Umum/Penangung Jawab**

Edy Suwardi  
*Kasubdit Internalisasi Nilai Sejarah*

**Dewan Redaksi**

Agus Widiatmoko, Suharja, Herliswanny

**Editor Eksekutif**

Kasijanto Sastrodinomo

**Editor Bahasa**

Khresno Brahmantyo

**Staf Editor**

Budi Suryono, Dian Andika Winda, Ratih Widyastuti, Purnawan Andra, Akmal Maulana

**Penanggung Jawab Laman**

Fider Tendiardi

**Mitra Bestari**

Dr. Bondan Kanumyoso (Universitas Indonesia), Dr. Singgih Tri Sulistiyono (Universitas Diponegoro),  
Dr. Gusti Asnan (Universitas Andalas), Dr. Sri Margana (Universitas Gajah Mada),

**Tata Letak/Design**

Wahid Hisbullah

**Sekretariat**

Fariz Rizqi Muhammad, Tita Chairunnisa

**Sirkulasi dan Distribusi**

Ganda Nainggolan, Samino, Haryanto

**Alamat Redaksi**

Direktorat Sejarah  
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Degung E, Lantai 9  
Jalan Jenderal Sudirman - Jakarta 10270  
Telpon: (021) 572 5540 ext 15  
Faksimili: (021) 572 5044  
Situs: [jurnalabad.kemdikbud.go.id](http://jurnalabad.kemdikbud.go.id)  
Email: [internalisasi.sejarah@gmail.com](mailto:internalisasi.sejarah@gmail.com)

Abad adalah jurnal ilmiah sejarah yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan hasil penelitian ilmiah sejarah dan disiplin lain yang terkait dengan ilmu sejarah. Terbit dua kali setiap tahun, yaitu dalam Juni dan Desember



## Kata Pengantar

**K**esadaran sejarah merupakan suatu dimensi historis yang memuat konsep ruang dan waktu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termuat kesadaran sejarah yang bersifat kolektif, yaitu suatu bentuk pengalaman bersama di dalam masyarakat atau bangsa sebagai respon terhadap situasi tertentu. Kesadaran sejarah adalah acuan imajinasi kebangsaan kita. Pemaknaan atas tanah air ini akan memperdalam wawasan kita pada salah satu acuan pokok dalam kehidupan kebangsaan kita.

Karena kita butuh entitas pemahaman yang merapatkan integritas bangsa. Masyarakat mesti dipersatukan dalam *common platform* ke-Indonesia-an. Setiap elemen di negeri ini, harus menyadari betul posisinya sebagai bagian dari warga negara yang punya kesadaran hakiki dan kematangan berpikir membangun bangsa. Untuk itu kita perlu membangun barisan yang cinta khazanah keilmuan, yakni generasi yang senantiasa belajar segala ilmu dengan memuliakan pikiran sebagai manusia mulia.

Untuk itu dirasa perlu mengadakan kegiatan yang sifatnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat karena dipandang perlu untuk mengetahui serta memahami isu-isu kesejarahan yang sedang berkembang.

Jurnal Sejarah “Abad” Volume 2 Nomor 2 Desember 2018 yang diterbitkan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini berada dalam semangat tersebut. Beberapa artikel dengan berbagai topik hadir dalam edisi kali ini, seperti sejarah sosial, politik dan kearifan lokal hingga kebudayaan. Keanekaragaman topik diharapkan mampu memperkaya khazanah publikasi sejarah di tanah air.

Penerbitan Jurnal Abad ini diharapkan menjadi langkah positif yang coba ditempuh dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan dan wawasan masyarakat luas dalam konteks keindonesiaan. Lebih jauh diharapkan kegiatan ini menjadi pemantik kesadaran revitalisasi nilai-nilai kebangsaan sebagai jiwa bangsa yang mendasari seluruh kehidupan Indonesia sebagai sebuah entitas kebangsaan.

Selamat Membaca,

Triana Wulandari  
*Direktur Sejarah*



## Daftar Isi

Volume 02 | Nomor 2 |  
Desember 2018

Kata Pengantar [3]  
Daftar Isi [4]

NUR FAJAR ABSOR	Republik Indonesia Pada Tahun 1949 - 1950: Mata rantai Sejarah Eksistensi Sebuah Republik [5]
HIMAWAN BASTARI	“Dikomikin Saja” Digitalisasi Komik Pembelajaran Sejaran Perjuangan Bangsa Berbasis Android Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran IPS Materi Sejarah di SMP Negeri 3 Madang Suku I Menggunakan Aplikasi Pembuatan Komik Digital Berbasis Android Tahun Pelajaran 2018 [19]
NIKO RIENDA	Bacakak Kampuang: Konflik Horizontal Masyarakat Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Dengan PArIt Rantang Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 [28]
BUDI SULISTIONO	Kearifan Lokak di Tengah Masyarakat: Muslim di Propinsi Bali [53]
NURNI W. WURYANDARI	Memanfaatkan Dokumen Cina Klasik: Mengungkap Informasi Baru Sejarah Jawa [73]
NOPRIYASMAN	Menakar Validitas Sejarah: Kondisional Golongan Geneologis Istana Pagaruyung di Sumatera Barat [87]
SULASTRININGSIH	Sejarah Transmigrasi dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Dusun Purwosari Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur [103]
EFFENDI WAHYONO	Sumpah Pemuda dan Tumbuhnya Kesadaran Berbangsa [115]

# Republik Indonesia Pada Tahun 1949-1950: Mata Rantai Sejarah Eksistensi Sebuah Republik

**Nur Fajar Absor**

*Universitas Negeri Jakarta*

*nurfajarabsor@gmail.com*

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keeksistensian Republik Indonesia, terutama pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949-1950 sebagai tanda bahwa Republik Indonesia tidak mengalami kekosongan dalam sejarah Indonesia yang diindikasikan bahwa Republik Indonesia pernah menghilang, lalu muncul kembali pada periode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni: (1) Heuristik; (2) Kritik; (3) Interpretasi; (4) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republik Indonesia tetap eksis sebagai sebuah negara, meskipun kedudukannya pada saat itu adalah sebuah negara bagian di dalam Republik Indonesia Serikat. Hal ini ditunjukkan dengan (1) Republik Indonesia memiliki daerah yang terluas, mewakili unsur wilayah; (2) Republik Indonesia memiliki populasi penduduk yang paling besar, mewakili unsur penduduk; (3) Pengangkatan Assaat dan Abdul Halim sebagai Pemangku Jabatan Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia, mewakili unsur pemerintah; (4) Republik Indonesia merupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat, mewakili unsur kedaulatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia tidak mengalami kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa Republik Indonesia pernah menghilang, lalu muncul kembali pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949-1950 maupun masa setelahnya.

**KATA KUNCI** - *Eksistensi, Negara, Kedaulatan, Republik Indonesia, Republik Indonesia Serikat*

**ABSTRACT** - This research aims to analyze the existence of the Republic of Indonesia, especially during the Republic of the United States of Indonesia in 1949-1950 as a sign that the Republic of Indonesia did not experience a vacuum in the history of Indonesia. This research uses historical research method, that is: (1) Heuristics; (2) Criticism; (3) Interpretation; (4) Historiography. The results of the study indicate that the Republic of Indonesia continues to exist as a country, even though its position at that time was a state in the Republic of the United States of Indonesia. This is indicated by (1) It has the widest area, representing the elements of the region; (2) It has the largest population, representing elements of the population; (3) Appointment of Assaat and Abdul Halim as Acting of President and Prime Minister of the Republic of Indonesia, representing elements of the government; (4) It is a the Republic of the United States of Indonesia state, representing the element of sovereignty. Thus, it can be concluded that the Republic of Indonesia did not experience a vacuum in Indonesian history that the Republic of Indonesia had disappeared, then reappeared during in the period of 1949-1950 and afterwards.

**KEYWORDS** - *Existence, State, Sovereignty, The Republic of Indonesia, The Republic of the United States of Indonesia*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara dengan sejarah yang panjang, memiliki bahan yang menarik untuk dikaji dan diteliti oleh para sejarawan maupun masyarakat yang tertarik dengan sejarah Indonesia. Salah satu hal yang menarik tersebut adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) hingga akhirnya Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana diketahui bahwa bentuk negara Indonesia saat ini adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau yang lebih dikenal dengan NKRI. Pernyataan ini secara tegas tertuang di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009: 2). Ditelusuri dari sejarahnya, Indonesia tidak hanya menggunakan bentuk negara Negara Kesatuan saja, Indonesia tercatat pernah menggunakan bentuk negara Federasi atau Serikat pada 1949-1950.

Bentuk negara Federasi di Indonesia dikenal dengan nama RIS yang tercatat sebagai suatu bentuk negara sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. RIS terbentuk sebagai hasil dari diratifikasinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949 (Poesponegoro dan Notosusanto (penyunt.), 2008: 301). KMB sendiri merupakan puncak dari perundingan-perundingan yang sudah dilakukan antara Indonesia dengan Belanda, yakni Perundingan Pendahuluan di Jakarta, lalu dilanjutkan ke Perundingan Hoge Valuwe, Perundingan Linggarjati, Perundingan

Renville, hingga Pernyataan Roem-Royen. Perundingan-perundingan tersebut tidak terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh meruncingnya hubungan antara Indonesia dengan Belanda, karena Belanda saat itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan beberapa negara bagian yang penting adalah Republik Indonesia (RI), Negara Sumatra Timur (NST), Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur (NIT) (Poesponegoro dan Notosusanto (penyunt.), 2008: 301). Terbentuknya RIS ini tidak terlepas dari campur tangan Belanda dengan tokohnya yang bernama Hubertus Johannes van Mook yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu yang mencoba menggandeng elite-elite politik lama di daerah dan memanfaatkan primordialisme di luar Jawa untuk mewujudkan gagasannya, yakni membentuk negara federal di Indonesia.

Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri (PM) yang dilantik oleh Presiden Soekarno (Poesponegoro dan Notosusanto (penyunt.), 2008: 269). Hal ini membuat kursi Presiden dan Perdana Menteri RI yang merupakan negara bagian RIS menjadi kosong. Untuk itu, diangkatlah Mr. Assaat Datuk Mudo yang merupakan Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP/KNIP), sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI pada masa RIS. Assaat dilantik di Yogyakarta pada 27 Desember 1949. Lalu, Assaat menunjuk dr. Abdul Halim sebagai ketua formatur pembentukan kabinet RI dan selanjutnya Abdul

Halim menjadi Pemangku Jabatan PM RI pada masa RIS (Kahin, 2013: 550-551).

Namun, eksistensi RIS tidaklah bertahan lama, karena pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Hal ini merupakan akibat dari tuntutan berbagai macam lapisan masyarakat, yakni dari elite hingga akar rumput di berbagai negara bagian untuk membubarkan negara bagian mereka dan bergabung dengan RI. Lalu, disepakatilah bahwa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Sebelumnya, pada 15 Agustus 1950, Sukarno ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Assaat (Anonim, 1977: 279). Dengan pengembalian jabatan tersebut, selanjutnya Sukarno dan Mohammad Hatta dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden NKRI.

Dari pendahuluan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti ingin memecahkan masalah mengenai eksistensi RI, terutama pada masa RIS tahun 1949-1950 yang tidak banyak diungkap oleh tulisan-tulisan yang ada. Kedudukan RI pada saat itu yang merupakan negara bagian RIS merupakan wujud eksistensi RI, sehingga RI tidak mengalami kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang, lalu muncul kembali. Di dalam penelitian ini juga ditekankan bahwa eksistensi RI ditinjau dari konsep unsur-unsur negara yang menurut Budiardjo (2008: 51-54) terdiri dari: (1) Wilayah yang mencakup konsep bahwa setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu; (2) Penduduk yang mencakup konsep bahwa setiap negara mempunyai penduduk

yang biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya; (3) Pemerintah yang mencakup konsep bahwa setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya, kekuasaan pemerintah ini biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (4) Kedaulatan yang mencakup konsep bahwa kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia, di samping itu terdapat juga istilah *external sovereignty*, yakni negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar, di dalam konsep negara federal kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap menjadi bahan rujukan kepada peneliti berikutnya mengenai sejarah Indonesia, khususnya seputar RIS. Karena, selama ini jarang penelitian yang membahas mengenai sejarah Indonesia pada masa RIS. Di dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasannya pada terbentuknya negara bagian RI yang mencakup proses awal terbentuknya, wilayah dan penduduknya, serta susunan dan program kabinetnya. Selanjutnya, membahas mengenai dinamika pemerintahan negara bagian RI, dan peran negara bagian republik Indonesia dalam mewujudkan NKRI, serta eksistensi RI ditinjau dari konsep unsur-unsur negara.

## METODE

Metodologi penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni (Sulasman, 2014; Kuntowijoyo, 2013): (1) Heuristik yang merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Dalam hal ini peneliti melakukan pencarian sumber primer berupa arsip tahun 1949-1950 yang didapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sumber sekunder berupa buku, majalah, makalah, dan skripsi; (2) Kritik yang merupakan tahapan ketika sumber dikumpulkan pada kegiatan heuristik untuk selanjutnya diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinalnya terjamin. Pada tahap ini peneliti melakukan dua tahap kritik, yakni kritik ekstern dengan melihat dari segi fisik literatur yang dipakai oleh peneliti sesuai dengan tahun penerbitannya, misalnya arsip tahun 1949-1950 yang kertasnya sudah menguning dan kritik intern dengan melihat bahwa literatur yang didapatkan oleh peneliti sudah kredibel dengan penelitian yang peneliti lakukan; (3) Interpretasi yang merupakan tahapan dalam menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah kekinian. Setelah fakta untuk mengungkapkan dan membahas masalah yang diteliti sudah memadai, kemudian peneliti melakukan suatu interpretasi atau menafsirkan akan fakta dan hubungan satu fakta dengan fakta yang lainnya berdasarkan sumber-sumber yang sudah peneliti dapatkan; (4) Historiografi yang merupakan proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang

telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Dalam menganalisis eksistensi *RI pada masa RIS tahun 1949-1950*, peneliti berusaha menyajikan data penelitian yang sesuai dengan kebenaran atau setidaknya mendekati dari kebenaran data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Terbentuknya Negara Bagian Republik Indonesia

#### 1. Proses Awal Terbentuknya Negara Bagian Republik Indonesia

Cikal-bakal terbentuknya RI sebagai negara bagian dimulai ketika Persetujuan Renville yang menyatakan bahwa setelah terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS), maka RI akan menjadi negara bagian dari NIS (Lohanda, 1986: 22). Namun, wilayah RI semakin kecil dengan adanya Persetujuan Renville ini, karena luas wilayahnya hanya berupa Pulau Jawa yang luasnya tinggal separuhnya saja dan Pulau Sumatra yang luasnya 4/5 bagian (Dekker, 1989: 59).

Akan tetapi, sebelumnya RI sempat direncanakan tidak dimasukkan ke dalam NIS. Hal ini terjadi ketika resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 28 Januari 1949 yang berisi rencana waktu untuk mengadakan pemilihan umum dan penyerahan kedaulatan tidak diterima oleh Belanda. Wakil Tertinggi Ratu Belanda saat itu, yakni Dr. Beel yang menggantikan van Mook menyiasatinya dengan mengadakan tindakan untuk menghindari resolusi itu dengan cara mencoba memikat para anggota *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (Pertemuan untuk Musyawarah Federal (BFO)) untuk mengadakan konfe-

rensi di Den Haag, Belanda tanpa RI dan mengadakan penyerahan dan pengakuan kedaulatan di sana. Pada saat yang genting itu, sebagian dari golongan federalis di bawah pimpinan Anak Agung Gde Agung menyatakan ketidaksiadaannya untuk mendirikan NIS tanpa RI, dengan demikian rencana Dr. Beel tersebut gagal (Roem, 1989: 10-11). Apabila tidak ada campur tangan dari golongan federalis pada saat itu, maka RI pun tidak akan masuk ke dalam NIS.

Selanjutnya, terbentuklah negara federal di Indonesia dengan nama RIS yang berdiri setelah dilaksanakannya penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada 27 Desember 1949. Dengan berdaulatnya RIS, derajat RI turun menjadi negara bagian. Akan tetapi, secara taktis politis RI tidak turun derajatnya, karena telah beberapa tahun berdaulat dan merdeka penuh, sedangkan negara bagian lainnya merupakan hasil politik pecah belah Belanda (Halim dalam Noer dan Akbarsyah, 2005: 295; Roem, 1989: 14). RI pada saat itu juga melaksanakan penyerahan kekuasaannya kepada RIS dan melaksanakan penyerahan jabatan presiden RI.

Penyerahan jabatan presiden RI pada saat itu dilakukan karena Sukarno yang terpilih menjadi Presiden RIS dengan Mohammad Hatta sebagai PM RIS, membuat kursi Presiden dan PM RI yang merupakan negara bagian RIS menjadi kosong. Untuk itu, diangkatlah Assaat yang merupakan Ketua BP KNIP/KNIP, sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI pada masa RIS. Assaat dilantik di Yogyakarta pada 27 Desember 1949. Lalu, Assaat melantik Abdul Halim sebagai Pemangku Jabatan PM RI pada masa RIS (Abdullah dan La-

pian (penyunt.), 2012: 550-551). Setelah terbentuknya Kabinet Halim, maka RI pun mulai berjalan efektif sebagai suatu negara bagian RIS.

## 2. Wilayah dan Penduduk Negara Bagian Republik Indonesia



Gambar 1.1. Peta negara bagian RI (diarsir merah) Sumber: George McTurnan Kahin. 2013. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, hlm. 605.

Berdasarkan Konstitusi RIS yang ditandatangani di dalam sebuah Piagam pada 14 Desember 1949, RI termasuk ke dalam wilayah RIS sebagai negara bagian. Wilayah RI meliputi daerah menurut *status quo* seperti yang dimaksud dalam perjanjian Renville, yakni Pulau Jawa yang luasnya tinggal separuhnya saja dan Pulau Sumatra yang luasnya 4/5 bagian (Anonim, 1977: 240; Dekker, 1989: 59). RI merupakan negara bagian RIS dengan populasi penduduk yang terbanyak, yakni berpenduduk lebih dari 31 juta jiwa (Kahin, 2013: 625-626).

### 3. *Susunan dan Program Kabinet Negara Bagian Republik Indonesia*

Sebelum Kabinet Halim terbentuk, terdapat Kabinet Susanto yang merupakan Kabinet Peralihan, karena kabinet ini mulai bekerja setelah Mohammad Hatta serta beberapa menteri lainnya menjadi menteri-menteri RIS, yaitu pada 20 Desember 1949 (Keputusan Presiden (Keppres) RIS No. 2 Tahun 1950) dan bekerja sampai Kabinet Halim dibentuk, yaitu pada 21 Januari 1950 (Keppres RI No. 16 Tahun 1950). Kabinet ini tidak mengumumkan program kabinetnya (Djamily, 1986: 55). Kabinet ini pun hanya memerintah selama sekitar 1 bulan saja.

Proses terbentuknya kabinet ini adalah ketika Mohammad Hatta dilantik dan disumpah sebagai PM RIS pada 20 Desember 1949, pada malam harinya dilaksanakan sidang kabinet RI yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprodjo. Kemudian, sidang kabinet RI mengambil keputusan untuk menunjuk Susanto Tirtoprodjo sebagai Pemangku Jabatan PM RI. Kabinet ini juga menetapkan bahwa mereka baru demisioner setelah penyerahan kekuasaan RI kepada RIS pada 27 Desember 1949 dilaksanakan. Dalam sidang kabinet ini hadir juga Ketua KNIP, Assaat dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Soetardjo Kartohadikoesoemo (Noer dan Akbarsyah, 2005: 286).

Susunan kabinetnya adalah sebagai berikut:

Menteri	Nama	Partai
Wakil Perdana Menteri	Mr. Susanto Tirtoprodjo	PNI
Dalam Negeri	Mr. Susanto Tirtoprodjo	PNI
Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	PNI

Penerangan	Mr. Samsuddin	Masyumi
Keuangan	Mr. Lukman Hakim	PNI
Persediaan Makanan Rakyat	I.J. Kasimo	PKRI
Kemakmuran	I.J. Kasimo	PKRI
Perhubungan	-	-
Pekerjaan Umum	-	-
Perburuhan dan Sosial	Kusnan	PGRI
P.P. dan K.	S. Mangunsarkoro	PNI
Agama	K.H. Masjkur	Masyumi
Kesehatan	-	-

Tabel 1.1. Kabinet Susanto

Sumber: Mizwar Djamily. 1986. *Mengenal Kabinet RI Selama 40 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama, hlm. 55.

Karena kabinet ini merupakan kabinet peralihan, maka terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, yakni: (1) Banyak jabatan yang dirangkap oleh seorang menteri, seperti Mr. Susanto Tirtoprodjo yang merangkap jabatan, yakni PM, Wakil PM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman, lalu I.J. Kasimo yang merangkap sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat dan Menteri Kemakmuran; (2) Banyak kementerian yang kosong karena tidak ada menterinya, yakni Kementerian Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Kesehatan; (3) Tidak mengumumkan program kabinetnya, sehingga tidak jelas tujuan dari kabinet ini.

Tidak lama setelah Assaat diangkat menjadi Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat menunjuk tiga orang terkemuka sebagai formatur, yakni Mohammad Natsir (Masyumi), Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI), dan dr. Abdul Halim (non partai) untuk membentuk kabinet RI. Lalu, tercapai kesepakatan antara partai-partai yang

juga disetujui oleh Assaat, untuk menunjuk dr. Abdul Halim sebagai Pemangku Jabatan PM RI. Selain itu, disepakati juga bahwa Mohammad Natsir tidak duduk di dalam kabinet (Noer dan Akbarsyah, 2005: 289). Kabinet ini terbentuk pada 21 Januari 1950 sesuai dengan Keppres RI No. 16 Tahun 1950 yang keluar pada 6 Februari 1950 (Djamily, 1986: 57). Lalu, Assaat mengeluarkan SK Presiden RI mengenai pemberhentian dengan hormat Kabinet Hatta sebagai Kabinet RI dan digantikan oleh Kabinet Halim (Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara RI Yogyakarta (Desember 1949-September 1950): No. 106).

Selanjutnya, Kabinet Halim diberhentikan dengan hormat oleh Assaat melalui Keppres RI No. 42 Tahun 1950 (Arsip Nasional Republik Indonesia, Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950). Kabinet ini menjadi demisioner sampai pembentukan Kabinet Natsir pada 6 September 1950 (Keppres RI (negara kesatuan) No. 9 Tahun 1950) (Djamily, 1986: 57). Kabinet Halim menjadi demisioner bukan karena keretakan dalam tubuh kabinet itu sendiri, juga bukan karena perang, melainkan karena perubahan struktur politik dari RIS menjadi NKRI yang juga merupakan program dari Kabinet Halim sendiri, yakni menciptakan NKRI (Suprpto, 1985: 123).

Susunan Kabinet Halim adalah sebagai berikut:

Menteri	Nama	Partai
Perdana Menteri	Dr. A. Halim	-
Wakil Perdana Menteri merangkap Urusan Umum	Abdul Hakim	Masyumi
Menteri Dalam Negeri	Mr. Susanto Tirtoprodjo	PNI

Menteri Kehakiman	Mr. A.G. Pringgodigdo	Masyumi
Menteri Penerangan	Wiwoho Purbohadidjojo	Masyumi
Menteri Keuangan	Mr. Lukman Hakim	PNI
Menteri Pertanian	Sadjarwo	BTI
Menteri Perdagangan/Perindustrian	Mr. Tandiono Manu	PSI
Menteri Pekerjaan Umum/Perhubungan	Mr. Sitompul	Parkindo
Menteri Perburuhan	Dr. Ma'as	P. Buruh
Menteri Sosial	Hamdani	PSI
Menteri Pembangunan Masyarakat	Sugondo Djojopuspito	PSI
Menteri P.P. dan K.	S. Mangunsarkoro	PNI
Menteri Agama	Fakih Usman	Masyumi
Menteri Kesehatan	Dr. Sutopo	PIR

Tabel 1.2. Kabinet Halim

Sumber: Mizwar Djamily. 1986. *Mengenal Kabinet RI Selama 40 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama, hlm. 55.

Dalam Kabinet Halim ini, terdapat beberapa menteri yang berasal dari Kabinet Peralihan, yakni: (1) Mr. Susanto Tirtoprodjo yang sebelumnya menjadi PM, pada saat Kabinet Halim menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri; (2) Mr. Lukman Hakim tetap menjadi Menteri Keuangan; (3) S. Mangunsarkoro tetap menjadi Menteri P.P. dan K.

Program Kabinet Halim adalah (Djamily, 1986: 57-58):

1. Meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Melanjutkan pelaksanaan pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD Republik serta menyelenggarakan politik buruh

dan tani berpedoman pada pasal-pasal tersebut.

3. Mendemokratisasi kehidupan politik dan pemerintah antara lain dengan jalan:
  - Mengusahakan secepat mungkin berlakunya hak-hak bebas demokrasi terutama hak berserikat dan bersidang serta hak menyatakan pendapat.
  - Melaksanakan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah.
  - Sebelum Pemilihan Umum berhasil dimana perlu memperbaiki susunan Dewan-Dewan Perwakilan Daerah yang sedapat mungkin mencerminkan perkembangan kehidupan politik.
4. Menyelenggarakan Pemilihan tenaga-tenaga bekas anggota Tentara maupun Laskar kembali ke masyarakat serta rehabilitasi korban-korban perjuangan.
5. Memajukan pembangunan budi di segala lapisan masyarakat dan menjamin kebebasan suburnya jiwa keagamaan menurut agama masing-masing di dalam pembangunan negara, sesuai UUD pasal 29.
6. Memperluas pendidikan masyarakat dan pengajaran rakyat.

Tidak semua program Kabinet Halim dijalankan, hanya satu program kabinet yang menonjol dan dapat terlaksana dengan baik, yakni program kabinet pertama yang berbunyi: Meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud

dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain program kabinet yang pertama, program kabinet yang lainnya tidak dapat dijalankan dengan baik oleh Kabinet Halim, hal ini dikarenakan singkatnya periode jabatan kabinet yang hanya berlangsung sekitar 9 bulan saja. Hal ini diakibatkan RIS bubar dan berubah menjadi NKRI.

## **B. Dinamika Pemerintahan Negara Bagian Republik Indonesia**

RI sebagai salah satu negara bagian RIS merupakan negara bagian yang produktif dalam membuat regulasi, hal ini bisa dilihat dengan dibuatnya 20 Undang-Undang (UU), 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan 41 Peraturan Pemerintah (PP) (Koesnodiprodjo, 1951). Sebagai sebuah negara bagian, RI juga melakukan kegiatan memberikan keterangan pemerintah kepada KNIP atau BP KNIP selaku lembaga legislatif di RI pada saat itu, sebelum DPR terbentuk. Selain itu, terdapat kegiatan BP KNIP yang rutin, yakni melakukan sidang rutin sebagaimana dilakukan oleh lembaga legislatif lainnya (Noer dan Akbarsyah, 2005: 294-325). Hal ini menunjukkan perimbangan kewenangan antara eksekutif dan legislatif di RI, sehingga di RI tidak terjadi suatu kekosongan di dalam menjalankan sebuah negara.

Adapun, RI mengesahkan UU No. 4 Tahun 1950 pada 2 April 1950 yang merupakan UU pertama tentang pendidikan yang dihasilkan RI. Poin penting dari UU ini adalah menetapkan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) dinyatakan sebagai wajib belajar. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang berusia 6 tahun berhak

untuk bersekolah, sedangkan mereka yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah. Wajib belajar ini dinyatakan berlaku sedikitnya 6 tahun lamanya, dan ini merupakan wajib belajar pertama di RI. Wajib belajar ini menjadikan RI merupakan negara yang sangat maju dalam menetapkan wajib belajar, berbeda dengan negara-negara Eropa bahkan Belanda dan negara-negara Asia lainnya yang belum menetapkan wajib belajar. Setelah RIS bubar dan berubah menjadi NKRI, UU ini diberlakukan kembali sebagai UU pendidikan bagi NKRI, karena dalam waktu 4 tahun setelah menjadi NKRI, pemerintah belum menghasilkan UU pendidikan yang baru. UU No. 4 Tahun 1950 ini pun berubah menjadi UU No. 12 Tahun 1954 (Abdullah dan Lopian (penyunt.), 2012b: 300-303; Koesnodiprodo, 1951: 23 dan 25).

Selain itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang baru berdiri pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta merupakan bagian dari RI yang berpusat di Yogyakarta pada saat RIS terbentuk pada 27 Desember 1949. UGM sempat diusulkan dipindahkan ke Jakarta yang merupakan Ibukota RIS, akan tetapi hal ini ditentang oleh para pendukung RI, karena UGM selain dijadikan sebagai sebuah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, akan tetapi juga dijadikan sebagai sebuah simbol keberadaan RI. Rapat Senat UGM pada 22 Mei 1950 memutuskan bahwa UGM tetap berada di Yogyakarta. Keputusan ini pun disetujui oleh Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat serta Menteri P.P. dan K. RI, S. Mangunsarkoro. Selanjutnya, dikeluarkanlah sebuah peraturan yang dijadikan sebagai dasar kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UGM, yakni

PP No. 37 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat. Peraturan ini dikenal juga sebagai Statuta UGM yang pertama (Purwanto (penyunt.), 1999: 14-16).

Salah satu dinamika yang sangat berkembang di negara bagian RI adalah ketika hampir semua negara dan daerah bagian di dalam RIS menyatakan ingin menggabungkan wilayahnya ke dalam RI. Hal ini terjadi selama tujuh bulan pertama pada 1950 (Kahin, 2013: 625). Negara dan daerah bagian di dalam RIS yang menyatakan ingin menggabungkan wilayahnya ke dalam RI ini sesuai dengan program Kabinet Halim yang pertama. Sehingga, baik pemerintah maupun parlemen RI pada saat itu mendukung negara dan daerah bagian di dalam RIS yang ingin menggabungkan wilayahnya ke dalam RI.

Salah satu alasan kuat negara dan daerah bagian di dalam RIS ingin menggabungkan wilayahnya ke dalam RI adalah martabat RI yang sudah besar sebagai pembela kemerdekaan Indonesia yang berjaya. Citra semacam ini cenderung meningkat karena tingkat keamanan dan ketertiban yang relatif tinggi, efisiensi pemerintah, dan tidak adanya korupsi yang dapat dipertahankan di dalam daerahnya. Hal ini jauh berbeda dari negara dan daerah bagian lainnya di dalam RIS (Kahin, 2013: 630). Kebanyakan negara dan daerah bagian lainnya di dalam RIS tidak memiliki syarat-syarat untuk hidup terus sebagai sesuatu negara (Lohanda, 1986: 59), sehingga mereka pun memilih untuk menggabungkan wilayahnya ke dalam RI.

Sehingga, pemerintah dan parlemen RI pun lebih banyak disibukkan dengan adanya penggabungan berbagai negara dan

daerah bagian RIS ke dalam RI dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Hal ini berbeda dengan RIS selaku negara federal (pusat) yang mendapatkan berbagai macam tekanan, mulai dari tekanan di bidang ekonomi, kepegawaian, hingga keamanan.

### **C. Peran Negara Bagian Republik Indonesia dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia**

RI yang berpusat di Yogyakarta, memiliki peran yang besar dalam mewujudkan NKRI. Hal ini bisa dilihat dengan adanya unsur-unsur RI di dalam negara-negara dan daerah-daerah bagian lainnya di dalam RIS. Unsur-unsur tersebut ialah pemerintahan gerilya Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah-daerah pedalaman yang dibentuk sejak Agresi Militer Belanda dimulai dan para pamong praja (pegawai) RI yang bersikap tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan federal (Ranty, 1985: 99).

Keadaan tersebut menimbulkan dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan kembar (*dubbel bestuur*). Pemerintahan kembar adalah pemerintahan RI yang diselenggarakan oleh para pamong praja RI yang bergerilya bersama TNI serta pemerintahan yang diselenggarakan oleh pamong praja negara bagian yang menunggu likuidasinya (Ranty, 1985: 100).

Rakyat yang menetap di negara bagian, sebagian besar berpihak kepada pemerintah RI, karena mereka lebih percaya kepada pamong praja pemerintahan RI dan juga masih banyak rakyat di negara bagian yang mendambakan kembali kepada RI. Sehingga, pemerintah negara bagian terse-

but tidak berjalan dengan lancar. Hal inilah yang menyebabkan di beberapa tempat diadakan kompromi antara pemerintah RI dengan pemerintah negara bagian. Adanya perundingan-perundingan terkait pemerintahan kembar antara pemerintah RI dengan pemerintah negara bagian, menyebabkan banyak daerah di wilayah kekuasaan negara bagian diperintah oleh pamong praja RI, dengan demikian semua daerah-daerah dari tingkat Kabupaten hingga Keresidenan terdapat pemerintahan RI yang diikuti oleh rakyat. Pemerintahan para pamong praja RI itu didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat RI di Yogyakarta (Ranty, 1985: 100-102).

Selanjutnya, semakin kuatnya gerakan kesatuan dari rakyat di negara-negara dan daerah-daerah bagian RIS yang menginginkan agar wilayahnya dikembalikan kepada RI, menyebabkan hampir semua negara-negara dan daerah-daerah bagian secara resmi dibubarkan oleh pemerintah RIS dan menggabungkan wilayahnya ke negara RI berdasarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1950 (Anonim, 1977: 278). Maka, dikeluarkanlah Surat Keputusan (SK) Presiden RIS dan UU RI yang diperlukan sebagai dasar penggabungan wilayahnya tersebut ke dalam RI, salah satu contohnya adalah Negara Jawa Timur yang memiliki SK Presiden RIS No. 109 Tahun 1950 tentang pembubaran Negara Jawa Timur dan penggabungan wilayahnya ke dalam RI dan ada juga UU RI No. 2 Tahun 1950 mengenai pembentukan Provinsi Jawa Timur di dalam lingkungan RI sebagai konsekuensi dari pembubaran Negara Jawa Timur dan penggabungan wilayah tersebut ke dalam RI (Arsip Nasional Republik Indonesia, Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta

1949-1950: No. 10; Koesnodiprodo, 1951: 9).

Peran RI semakin besar ketika pada 5 April 1950, RIS hanya tinggal terdiri dari 3 negara bagian, yakni RI, NST, dan NIT (Ranty, 1985: 100-102). Untuk menyelesaikan penggabungan dan pembentukan negara kesatuan di Indonesia, maka dimulailah rencana mengadakan konferensi-konferensi mulai dari konferensi segi empat antara RIS-NIT-NST-RI hingga terwujudnya konferensi antara RIS dengan RI.

Sebelumnya, terdapat Mosi Integral Natsir yang dikeluarkan pada 3 April 1950, mosi ini dijadikan dasar pemerintah RIS untuk menyelesaikan persoalan pembentukan negara kesatuan. Hal ini dilakukan karena adanya suatu kebuntuan antara NIT, NST, dan RI mengenai konsep negara kesatuan. RI keberatan apabila negaranya dibubarkan dan masuk ke NKRI, karena bisa berarti kehilangan negara. Namun, akhirnya RI menyetujui mosi tersebut (Hakim (penyunt.), 2008: 220-221).

Selanjutnya, untuk pertama kalinya, konferensi RIS-RI diadakan pada 19 Mei 1950 yang dipimpin oleh PM Mohammad Hatta (RIS) dan PM dr. A. Halim (RI) di Jakarta. Pada hari itu juga tercapai persetujuan mengenai pembentukan suatu negara kesatuan yang tertuang di dalam Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan RI. Piagam tersebut menyatakan bahwa kedua pemerintah menyetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan, sebagai jelmaan dari RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 (Abdullah dan Lopian (penyunt.), 2012a: 19; Koesnodiprodo, 1951: 455-458).

Selanjutnya, pemerintah RIS dengan RI sepakat untuk membentuk Panitia Bersama yang bertugas menyelenggarakan segala persetujuan tersebut dalam waktu secepatnya. Panitia Bersama ini terbentuk dan selanjutnya dilantik oleh Presiden Sukarno pada 3 Juni 1950. Panitia Bersama ini memiliki lima Sub-Panitia, yakni (1) Perancang UUD; (2) Politik; (3) Ekonomi dan Keuangan; (4) Keamanan; (5) Sosial. Selain itu, Panitia Bersama juga menyusun kementerian-kementerian negara kesatuan yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perburuan, Kementerian Kesehatan, Kementerian P.P. dan K., Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Susunan kementerian ini disetujui oleh kedua pemerintah (Abdullah dan Lopian (penyunt.), 2012a: 20-21).

Pada 30 Juni 1950, di Jakarta diadakan konferensi yang kedua antara RIS-RI. Di dalam konferensi itu membicarakan hal-hal yang belum disepakati dalam konferensi pertama. Selanjutnya, pada 19 dan 20 Juli 1950, diadakan konferensi yang ketiga dan merupakan konferensi terakhir yang diadakan antara RIS-RI di Jakarta (Abdullah dan Lopian (penyunt.), 2012a: 21).

Salah satu poin penting yang dihasilkan dari konferensi antara RIS-RI adalah pembuatan UUD Negara Kesatuan yang masih berupa rancangan harus disetujui oleh pemerintah dan parlemen masing-masing. Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (RUUDS) NKRI ini disetujui dengan baik oleh pemerintah RIS dan RI di dalam

sidang kabinet masing-masing pemerintah pada 11 Juli 1950 (Abdullah dan Lopian (penyunt.), 2012a: 19 dan 21). Kemudian, di tingkat parlemen, RUUDS ini disetujui pada 12 Agustus 1950 di Parlemen RI dan 14 Agustus 1950 di Parlemen RIS (Kahin, 2013: 646; Abdullah dan Lopian (penyunt.), 2012a: 22). Setelah disetujuinya RUUDS tersebut oleh BP KNIP, maka pemerintah RI bersama dengan BP KNIP membuat suatu UU untuk mengesahkan Piagam Persetujuan RI-RIS, yakni UU RI No. 20 Tahun 1950 (Koesnodiprodojo, 1951: 163-164). Adanya UU ini, membuat RI melebur ke dalam NKRI yang merupakan jelmaan dari RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selanjutnya, Presiden Sukarno terbang ke Yogyakarta pada 15 Agustus 1950 untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat. Sebelumnya, dilaksanakan penyerahan mandat PM dr. Abdul Halim kepada Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden RI (Noer dan Akbarsyah, 2005: 340; Anonim, 1977: 279). Pada saat itu, Sukarno berpidato mengucapkan terima kasihnya kepada segenap pejuang tanah air yang telah bersama-sama mempertahankan kelangsungan hidup RI sampai terbentuknya kembali NKRI yang berlandaskan Proklamasi 17 Agustus 1945 (Sudirjo, dkk., 1975: 380). Hal ini menandakan RI eksis terus, meskipun pada saat itu RI menjadi negara bagian dari RIS. Lalu, pada 17 Agustus 1950, Sukarno mengucapkan pidato pemproklamasian kembali negara ke NKRI, sekaligus memperingati ulang tahun kelima Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Abdullah dan Lopian (penyunt.), 2012a: 24). Pada hari itu RIS pun bubar dan berubah men-

jadi NKRI.

Sehingga, bisa dilihat bahwa serangkaian peristiwa yang terjadi di negara bagian RI, mulai dari anggapan rakyat yang memandang bahwa martabat RI sudah besar sebagai pembela kemerdekaan Indonesia yang berjaya, adanya pemerintahan kembar, RI yang melebur ke dalam NKRI, hingga RI yang ikut dan aktif berperan di dalam konferensi antara RIS-RI, dan terakhir adalah Abdul Halim yang menyerahkan kembali mandatnya sebagai Pemangku Jabatan PM RI kepada Assaat dan selanjutnya Assaat menyerahkan kembali mandatnya sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI kepada Sukarno yang menyebabkan semakin cepatnya gerakan menuju ke arah NKRI dan puncaknya adalah terbentuknya NKRI.

#### **D. Eksistensi Republik Indonesia Ditinjau dari Konsep Unsur-Unsur Negara**

Telah disampaikan sebelumnya bahwa di dalam penelitian ini ditekankan bahwa eksistensi RI pada masa RIS tahun 1949-1950 dapat ditinjau melalui konsep unsur-unsur negara yang menurut Budiardjo (2008: 51-54) terdiri dari: (1) Wilayah; (2) Penduduk; (3) Pemerintah; (4) Kedaulatan. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) RI memiliki daerah yang terluas, mewakili unsur wilayah; (2) RI memiliki populasi penduduk yang paling besar, mewakili unsur penduduk; (3) Pengangkatan Assaat dan Abdul Halim sebagai Pemangku Jabatan Presiden dan PM RI, mewakili unsur pemerintah; (4) RI merupakan negara bagian RIS, mewakili unsur kedaulatan. Sehingga, RI tetap eksis

sebagai sebuah negara, meskipun pada saat itu RI merupakan negara bagian dari RIS.

## PENUTUP

### Simpulan

RIS yang terbentuk pada 27 Desember 1949 merupakan suatu kontinuitas peristiwa sejarah yang dimulai sejak tahun 1945-1949. RIS terbentuk sebagai akibat dari perundingan-perundingan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda yang pada saat itu sedang berkonflik hingga akhirnya berujung pada diselenggarakannya KMB yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Hasil yang terpenting dari KMB adalah dilaksanakannya penyerahan dan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada 27 Desember 1949. Sejak saat inilah Indonesia menggunakan bentuk negara federal yang bernama RIS dengan 16 negara bagian di dalamnya.

RI yang terbentuk sejak tahun 1945 merupakan salah satu negara bagian RIS. Untuk tetap eksis sebagai sebuah negara, maka RI pada saat itu mengangkat Assaat dan Abdul Halim sebagai Pemangku Jabatan Presiden dan PM RI. Dengan pengangkatan Assaat dan Abdul Halim ini menjadikan salah satu unsur konsep adanya suatu negara adalah pemerintah, sudah terpenuhi. Selain unsur pemerintah, unsur lainnya berupa: (1) Wilayah menunjukkan bahwa RI memiliki daerah yang terluas; (2) Penduduk menunjukkan bahwa RI memiliki populasi penduduk yang paling besar; (3) Kedaulatan menunjukkan bahwa RI merupakan negara bagian RIS. Dengan demikian, RI pada saat itu bisa disebut sebagai sebuah negara, meskipun kedudukannya pada saat itu adalah sebuah negara

bagian di dalam RIS. Sehingga, RI tidak mengalami kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang, lalu muncul kembali pada masa RIS tahun 1949-1950 maupun masa setelahnya.

### Saran

Peneliti berharap kepada peneliti berikutnya yang ingin meneliti mengenai RIS, masih banyak aspek yang belum diteliti lebih mendalam lagi, karena tidak banyak yang meneliti tentang periode RIS tahun 1949-1950. Terlebih lagi penelitian seputar negara-negara dan daerah-daerah bagian pada masa RIS yang masih jarang diteliti lebih lanjut oleh para peneliti. Sehingga, masih terdapat ruang bagi peneliti berikutnya untuk meneliti seputar RIS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan A.B. Lopian (ed). 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6: Perang dan Revolusi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- \_\_\_\_\_. 2012a. *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7: Pascarevolusi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- \_\_\_\_\_. 2012b. *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ranty, Elly. 1985. *Dari RIS ke Negara Kesatuan RI. Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 1977. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. Sekretariat Negara RI Yogyakarta (Desember 1949-September 1950).
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Dekker, Nyoman. 1989. *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamily, Mizwar. 1986. *Mengenal Kabinet RI*

- Selama 40 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama.
- Hakim, Lukman (ed). 2008. *Refleksi Seabad M Natsir*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Koesnodiprodo. 1951. *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan, Pemerintah Republik Indonesia 1949*. Jakarta: S.K. Seno.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lohanda, Mona, dkk. 1986. *Sejarah Peralihan Pemerintah RIS ke RI: Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Noer, Deliar dan Akbarsyah. 2005. *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Risalah.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (penyunt.). 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Bambang, dkk. (ed). 1999. *Dari Revolusi ke Reformasi: 50 Tahun Universitas Gadjah Mada*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit.
- Ranty, Elly. 1985. *Dari RIS ke Negara Kesatuan RI. Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Roem, Mohamad. 1989. *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: Gramedia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. *Kumpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.
- Sudirjo, Radik Utoyo, dkk. 1975. *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950: Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan*. Jakarta: Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacat Veteran Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Penerbit Alda.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, dan Contoh Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suprpto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

# “Dikomikin Saja” Digitalisasi Komik Pembelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa Berbasis Android

## Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran IPS Materi Sejarah di SMP Negeri 3 Madang Suku I Menggunakan Aplikasi Pembuatan Komik Digital Berbasis Android Tahun Pelajaran 2018

**Himawan Bastari**

*SMP Negeri 3 Madang Suku I*

*himaone08@gmail.com*

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifitasan aplikasi “Dikomikin Saja” dalam meningkatkan minat dan hasil belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) khususnya materi sejarah, serta mendeskripsikan bagaimana proses pembuatan dan penggunaan aplikasi “Dikomikin Saja”. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 (Tiga) kali pertemuan, dalam prosesnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan media pembelajaran “Dikomikin Saja” dan 1 (Satu) kali tidak menggunakan media pembelajaran “Dikomikin Saja”.

Di dalam tiga kali pertemuan tersebut peneliti mengambil data dan mengobservasi aktivitas siswa yang berjumlah 35 siswa, dari tiga pertemuan tersebut terdapat peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dari skor awal 2,13 predikat cukup, pada pertemuan awal menjadi 3,25 pada pertemuan ke II/terakhir dengan predikat sangat baik, begitu pula dengan minat belajar sejarah lebih tinggi terlihat dari rekapitulasi ketuntasan belajar siswa pada pertemuan awal 40,54% yang tuntas menjadi 68,08 % yang tuntas pada pertemuan terakhir atau ke – II.

Aplikasi “Dikomikin Saja” membantu siswa dalam meningkatkan minat dan hasil belajar khususnya pada mata pelajaran IPS materi sejarah, serta membantu siswa untuk memenuhi bacaan-bacaan sejarah yang lebih populer yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

**KATA KUNCI** - “*Dikomikin Saja*”, *Komik Sejarah* , *Peningkatan hasil belajar*

**ABSTRACT** - This study is to examine the application’s authenticity in improving the interest and learning outcomes in social studies (IPS) specifically for material, and to describe the process of making and using the “dikomikin Saja” application.

This research was conducted in 3 (three) meetings, in the process 2 (two) times using learning media “dikomikin saja” and 1 (one) time did not use the learning media “dikomikin saja”.

In the three meetings the researchers took data and observed student activities involving students. From these three meetings there was an increase in student activity in the initial process 2.13 enough grades, at the meeting to be 3.25 at the second meeting / Very well, very it is possible to learn more than the results from 40.54% that were completed to 68.08% which were completed in the last or second meeting.

The “dikomikin saja” application helps students improve their interest and learning outcomes, especially in the subject of Social Studies, historical material, and helps students to realize more popular historical readings produced by themselves.

**KEYWORDS** - “*Dikomikin Saja*”, *historical comics*, *improvement of learning outcomes*

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan hari ini merupakan proses pembentukan kader pembangunan bangsa, proses pendidikan diharapkan memberikan kontribusi kepada pribadi serta masyarakatnya dalam wujud kemampuan berpikir, menganalisis dan memecahkan masalah yang nantinya dapat dijadikan bekal membangun negeri dikemudian hari.

Pendidikan merupakan proses *pen-transformasi-an* seluruh aspek kepribadian yang ada pada setiap individu manusia, didalamnya mencakup nilai dan sikap dan pengetahuan persis yang diutarakan oleh Sadulloh pendidikan merupakan proses *transformasi* nilai dari satu level generasi ke generasi selanjutnya, dengan proses *transformasi* nilai tersebut menjadikan generasi berikutnya memiliki bekal untuk membangun peradaban baru dengan warisan nilai nilai tadi (Sadulloh, 2012).

Salah satu cara *pen-transformasi-an* nilai tersebut adalah dengan pendidikan sejarah, menurut Kochhar (2008) pengajaran sejarah bukan saja mempelajari nilai nilai masa lampau, tetapi juga mempelajari nilai nilai keilmuan, pendidikan, etika, budaya, politik, nasionalisme, internasionalisme, kerja, dan kependidikan yang berlaku saat ini serta beberapa informasi lainnya, karena nilai yang diajarkan pada pendidikan sejarah maka siswa dapat mempelajari nilai nilai masa lampau untuk dijadikan pelajaran menyongsong masa depan, pada tingkat SMP pembelajaran sejarah sudah terfokus kepada proses penyadaran akan sebuah peristiwa sejarah bukan lagi penghafalan fakta sejarah yang berupa menulis, mengingat, dan menghafalkan.

Proses pembelajaran sejarah yang terintegrasi pada pelajaran IPS terpadu memiliki posisi yang strategis untuk pembentukan karakter dan pewarisan nilai nilai kebangsaan dan bermuara pada rasa cinta tanah air serta bangsanya, pentingnya pelajaran sejarah saat ini kurang dipahami secara utuh oleh peserta didik dan masyarakat mereka masih beranggapan bahwa sejarah merupakan sebuah peristiwa yang hanya dicatat, diingat, dihapal dan kemudian dijawab pada lembar kertas ujian, pada sisi lain materi sejarah dalam bentuk teks buku juga terkesan berat serta menjemukan sehingga para peserta didik memiliki keengganan untuk mempelajarinya.

Prof. Hamid Hasan (2012), memaparkan ketidakminatan peserta didik terhadap pendidikan IPS khususnya materi sejarah karena model pengajaran sejarah yang jauh dari harapan sepi peminat serta ketidakmampuan pendidik untuk melihat hubungan antara sejarah masa lampau dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Selain faktor diatas peserta didik juga kurang menyukai membaca teks pelajaran sejarah, mereka lebih menyukai bahan bacaan yang *bergenre* populer, bergambar dan ditambah lagi dengan penguasaan para guru/tenaga pengajar pada pelajaran IPS khususnya materi sejarah sangat minim dan kurang, hal ini disebabkan guru/tenaga pendidik bukan merupakan produk jurusan sejarah sebagian besar guru IPS merupakan produk lulusan ekonomi, geografi dan sosiologi, hal ini menyebabkan ketika mengajar materi sejarah tidak maksimal dalam penyampaian dan akhirnya bermuara pada tidak tercapainya tujuan pembelajaran, permasalahan tersebut menyebabkan ketidak minatan

para siswa semakin besar terhadap pelajaran IPS khususnya pada materi sejarah.

Mengajarkan materi sejarah pada ilmu pengetahuan sosial pada pendidikan dasar dibutuhkan stimulan dan variasi pendekatan sehingga anak didik menjadi lebih aktif. Kasmadi (2001), “Stimulan yang dimaksud berupa media pembelajaran, konsep pembelajaran dan model pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa serta merangsang siswa agar lebih berkonsentrasi serta berminat untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran”.

Model dan media yang digunakan pada pembelajaran IPS materi sejarah pada sekolah menengah pertama menurut Arsyad (2006) harus bisa membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi, merangsang kegiatan belajar serta memberikan pengaruh yang baik pada siswa.

Sedang menurut Arif S Sadirman (2012) **media pembelajaran**, “mencakup segala hal berupa alat fisik yang dapat menyajikan pesan, serta dapat merangsang siswa untuk belajar”, penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran serta penyampaian pesan dan tujuan pembelajaran.

Banyak media pembelajaran saat ini menggunakan, video dan CD Interaktif serta media lainnya dengan harapan dapat membantu proses pembelajaran materi sejarah pada pelajaran IPS, tetapi penterlibatan anak didik pada media pembelajar diatas hanya sebatas objek saja tidak mengajak anak didik menjadi subjek yang membuat dan mengelola sendiri media pembelajaran tersebut, sekian banyak media pembelajaran baik video juga CD interaktif sebageian besar memerlukan waktu untuk menayang-

kan atau memutarnya kadangkala disekolah tidak terdapat fasilitas pendukung dalam penggunaan media tersebut.

Salah satu media yang sangat tepat dipakai dengan keterbatasan yang ada adalah foto serta gambar yang disatukan dalam sebuah media berbasis komik, komik adalah media gambar yang mudah dibuat dengan bantuan aplikasi yang saat ini banyak kita jumpai dan memiliki keunggulan serta keunikan serta sangat familiar bagi peserta didik tentunya baik berbasis *personal computer* atau berbasis gawai *android*.

Menurut Sudjana dan Rivai (2011) “Media pembelajaran berbasis komik efektif digunakan pada proses belajar untuk meningkatkan minat, hasil serta apresiasi dalam pembelajaran.”

Selain itu komik juga memiliki beberapa kelebihan

- Menarik dan umumnya semua orang senang melihat foto atau gambar.
- Menyediakan gambar secara nyata
- Memperjelas suatu peristiwa.
- Mampu secara gamblang menceritakan suatu kejadian secara berurutan.

Secara prinsip antara pelajaran IPS yang memuat materi sejarah dengan komik merupakan dua hal yang berbeda bahkan saling bertolak belakang, komik yang merupakan serangkaian gambar dan cerita, sedangkan materi sejarah merupakan mata pelajaran yang sebagian besar membahas momentum, pergerakan dan membahas masa lampau serta berisi teks panjang yang membosankan, jika materi sejarah dibuat dalam bentuk sebuah komik digital berbasis *android* da-

lam pembuatannya mengikutkan anak didik untuk membuat komik pembelajaran maka hal tersebut akan menjadi inovasi tersendiri dalam pembelajaran IPS, serta ketertarikan anak didik untuk berminat dan fokus pada mata pelajar IPS khususnya materi sejarah akan bertambah.

Untuk menjadikan inovasi media pembelajaran “*dikomikin saja*” lebih efektif dalam proses pembelajaran diperlukan model pembelajaran yang bisa mendukung, dari sekian banyak model pembelajaran, *kooperatif* menjadi tumpuan model pembelajaran, pada metode pembelajaran ini siswa diajak untuk lebih intens dan aktif dalam proses pembelajaran, selain itu juga siswa juga diberikan ruang gerak yang luas, demokratis sehingga kelas akan lebih berasa hidup serta hangat dan memberikan porsi yang besar kepada siswa dalam proses belajar.

Pembelajaran kooperatif pada hakikatnya adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan membentuk kelompok-kelompok dengan jumlah anggota tertentu. Menurut Gunarto (2013) *kooperatif learning* merupakan kegiatan berkelompok yang didalamnya terjalin kerjasama saling bantu membantu dalam pembelajaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ciri khas dari pembelajaran *kooperatif learning* adalah terdapat interaksi antar anggota kelompok yang heterogen sehingga antar anggota tidak mendominasi dalam kegiatan pembelajaran.

## METODE

Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan untuk

menguji keefektifitasan penggunaan media pembelajaran “Dikomikin Saja” pada pelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 3 Madang Suku I.

Jumlah subjek penelitian sebanyak 35 peserta didik, dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan tes.

Pengolahan dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan kerangka analisis sebagai berikut:

1. Seleksi data, pengelompokkan dan pengolahan data, dan interpretasi data
2. Evaluasi dan refleksi terhadap hasil interpretasi data
3. Tindak lanjut atau rekomendasi.

Kerangka pengolahan dan analisis data tersebut di atas akan diberlakukan pada setiap siklus tindakan sampai penelitian dianggap selesai. Khusus berkenaan dengan analisis data hasil penelitian meliputi:

1. Analisis, refleksi, dan tindak lanjut terhadap data hasil orientasi dan identifikasi masalah
2. Analisis, refleksi, dan tindak lanjut terhadap data perencanaan tindakan penelitian
3. Analisis, refleksi, dan tindak lanjut terhadap data hasil pelaksanaan tindakan penelitian
4. Pembahasan terhadap hasil dan temuan penelitian tindakan
5. Kesimpulan dan rekomendasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi android yang berisi aplikasi aplikasi pembuatan komik digital serta aplikasi pembuatan buku digital yang digabungkan dalam satu aplikasi android yang dinamai

“Dikomikin Saja” (Digitalisasi Komik Pembelajaran Sejarah Berbasis Android).

Dengan bagan alur sebagai berikut:



Gambar II Bagan Alur Penemuan dan Pembaharuan

Berikut ini deskripsi proses perancangan aplikasi “Dikomikin Saja” berbasis android.

### 1. Pembuatan Aplikasi “Dikomikin Saja”

Aplikasi ini sengaja di buat untuk mempermudah peserta didik serta guru untuk membuat komik pembelajaran IPS khususnya materi Sejarah dalam sebuah aplikasi yang mudah dan gampang digunakan.

Pembuatan aplikasi ini menggunakan *personal Computer* dengan bantuan aplikasi pihak ketiga *APPY PIE*.

Mengapa menggunakan pihak ketiga, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan guru dalam pengkodean atau pemrograman untuk membuat aplikasi *android*, serta untuk memudahkan pihak lain untuk bisa mengembangkan aplikasi tersebut.

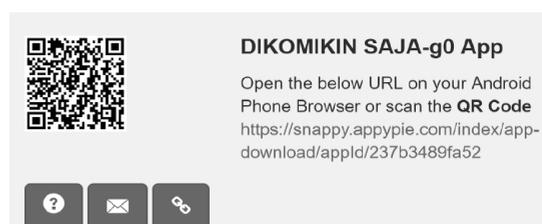
Dalam aplikasi *android* yang di buat berisi *link-link* untuk menjangkau program-program lain yang nantinya menjadi

program dasar dalam pembuatan aplikasi ini.

Link tersebut antara lain aplikasi android *Comicize* dan *Steeler co*.

### 2. Rilis Aplikasi “Dikomikin Saja”

Setelah Aplikasi “Dikomikin Saja” berhasil di buat maka langkah selanjutnya adalah mensebar luaskan kepada pengguna baik peserta didik maupun guru, aplikasi “Dikomikin Saja” bisa didapat dengan berbagai cara, mengunduh langsung pada aplikasi penyedia yaitu *Appy Pie*, *Google Play Store*, atau bisa juga dengan menyebarkan secara manual menggunakan aplikasi *Share it*.



URL . Dikomikin saja

### 3. Operasional Penggunaan Aplikasi “Dikomikin Saja”

Aplikasi yang telah diinstal pada android dapat digunakan secara langsung karena didalam aplikasi tersebut telah terdapat penjelasan penggunaan aplikasi tersebut, didalam aplikasi tersebut terdapat 5 (Lima ) alat/menu yang dapat digunakan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut antara lain.

#### a. Selamat Datang

Dalam alat/menu tersebut berisi penjelasan singkat dari kegunaan aplikasi “Dikomikin Saja” bagi proses pembelajar

#### b. Syarat dan Ketentuan

Dalam alat/menu ini berisi tentang bagaimana penggunaan aplikasi “*Dikomikin Saja*”

Dimulai dari cara menggunakan, cara *menginstall* aplikasi pendukung, sampai bagai mana membuat komik pembelajaran.

c. Praktek “*dikomikin Saja*”

Praktek disini dimaksudkan sebagai alat/menu membuat komik itu sendiri cukup dengan menekan tombol/menu mulai membuat komik maka siswa atau guru dapat langsung mempraktekkan pembuatan komik pembelajaran digital menggunakan android

d. Comicize

Pada alat/menu ini *android* akan tersambung langsung pada penyedia layanan pihak ketiga yaitu *comicize*.

e. Steeler Co

Pada alat ini *android* akan tersambung langsung pada penyedia layanan pihak ketiga yaitu dengan menggunakan aplikasi *android* sebagai alat belajar menjadikan siswa aktif berkonsentrasi dalam proses belajar, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi serta mulai tertantang untuk mencoba media pembelajaran tersebut.

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan aplikasi “*dikomikin Saja*” tersebut adalah sebagai berikut.

1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan jumlah tiap kelompok sebanyak tiga orang peserta didik. Pembagian kelompok dengan mempertimbangkan aspek

heterogenitas.

2. Guru memberikan *storyboard* yang berisi naskah cerita yang harus diterjemahkan dalam bentuk komik oleh setiap kelompok.
3. Ketiga peserta didik berbagi peran dalam kelompok, yakni satu orang menjadi ketua sekaligus oprator serta dua orang peserta didik lainnya menjadi sumber dan pengolah
4. Sumber dan pengolah mengumpulkan dan meramu informasi yang dibutuhkan baik berupa gambar foto yang bisa didapatkan dalam perambahan di dunia maya. Sedangkan oprator atau ketua mencoba merangkaikan antara gambar, foto atau yang lainnya dengan pertimbangan dan informasi dari kedua sumber dan pengolah.
5. Setelah semua informasi gambar dan foto dirangkaikan, koordinator kelompok bersama anggotanya menelaah dan menginterpretasikan rangkaian gambar tersebut secara bersama-sama.
6. Pada tahap akhir, hasil interperstasi gambar foto dan komik yang sudah dirangkai dengan menggunakan program *comicize* yang ada dalam program “*dikomikin Saja*” akan di publikasikan menjadi bentuk *e-book* dengan menggunakan aplikasi *steeler Co* yang juga sudah ada dalam program “*dikomikin Saja*”.
7. Setelah semua sudah ter-publikasikan maka siswa mempresentasikan hasil karya mereka kepada teman lain, serta memposting hasil karyanya pada media sosial yang mereka miliki.

Rekam jejak kegiatan pembelajaran dari Penerapan media “*dikomikin saja*”

pertama dilakukan pada tanggal tanggal 6 Maret 2018 (pertemuan awal) pada kelas VIII SMP Negeri 3 Madang suku I sedang pada tanggal 13 Maret 2018 pertemuan I (satu), sedangkan pertemuan ke II (dua) 20 april 2018

Pada pertemuan awal, I, dan II dengan pokok bahasan kedatangan bangsa eropa serta perlawanan bangsa Indonesia, dengan skenario pembelajaran sebagai berikut.

Pada pertemuan awal guru menyampaikan inti dari materi serta kompetensi yang akan dicapai, sebagai pengayaan awal guru memberikan sebuah cerita perjuangan rakyat aceh dalam perjuangannya mengusir penjajah, serta memberikan profil sosok pahlawan dari tanah aceh dalam bentuk *slide* profil kepahlawanan, setelah memaparkan materi awal guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang berisi 3 orang siswa/kelompok, kemudian guru membagikan *storybord* yang masing-masing kelompok berbeda pokok dan tema pelajaran, pada pertemuan awal guru tidak menggunakan aplikasi “*dikomikin saja*” dalam proses belajar, guru menggunakan gambar sosok pahlawan sebagai media pembelajaran serta menggunakan model belajar klasikal.

Dalam proses belajar di tanggal 13 April 2018 guru menggunakan media pembelajaran “*dikomikin saja*” siswa dengan antusias membuat Komik pembelajaran sejarah yang disesuaikan dengan *storyboard* yang sudah diberikan oleh guru menggunakan aplikasi “*dikomikin saja*” siswa masih berkerja dalam kelompok yang telah dibagi oleh guru dengan mempertimbangkan unsur heterogenitas, guru mengobservasi keaktifan siswa dalam preses pembe-

lajaran tersebut, serta memberikan arahan serta pertimbangan dalam pembuatan komik digital tersebut.

Pada pertemuan berikutnya tanggal 20 April 2018 setiap kelompok yang telah menyelesaikan penugasan pembuatan komik tersebut siswa mempresentasikan komik yang mereka telah buat, serta membagikan hasil presentasi hasil kerja kelompok kepada kelompok lain, pada saat presentasi ini kelompok lain diperbolehkan saling mengkritisi dan menanyakan hasil karya kelompok lain serta memberikan saran perbaikan, posisi guru hanya sebagai regulator dalam kegiatan presentasi tersebut. Setelah seluruh kelompok mempresentasikan hasil kerja merek serta memperbaiki hasil kerja kelompok mereka, kelompok kepada kelompok lain, pada saat presentasi ini kelompok lain diperbolehkan saling mengkritisi dan menanyakan hasil karya kelompok lain serta memberikan saran perbaikan, posisi guru hanya sebagai regulator dalam kegiatan presentasi tersebut. Setelah seluruh kelompok mempresentasikan hasil kerja merek serta memperbaiki hasil kerja kelompok mereka

Pada akhir pembelajaran, pertemuan awal, I, dan II, guru memberikan soal untuk melihat ketuntasan belajar pada bahasan tersebut dan menutup kegiatan tersebut dengan *mereview* kembali garis-garis besar pokok bahasan tersebut.

Dari proses pembelajaran diatas dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi ini memiliki nilai kebermanfaatan sebagai berikut.:

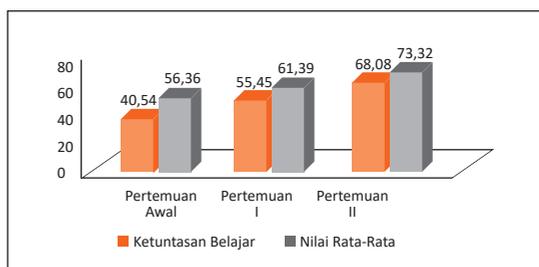
- a. Memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peserta didik memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.
- b. Memberikan pengayaan bagi siswa un-

- tuk mengingat kembali materi belajar yang lalu
- c. Memberikan pengalaman baru pada peserta didik untuk berinteraksi secara individu maupun kelompok
  - d. Peserta didik diberikan ruang yang luas untuk aktif, kreatif dan dinamis di dalam proses pembelajaran.
  - e. Peserta didik diberikan hak dan kebebasan yang sama dalam berkreasi serta menunjukkan kemampuan secara individu maupun kelompok .
  - f. Peserta didik diajak untuk berpindah dari *Comfort Zone* pembelajaran yang selama ini terjadi pada proses belajar
  - g. Peserta didik diajak untuk lebih akrab terhadap produk produk teknologi serta informasi yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran serta memakainya secara positif
  - h. Guru dan Peserta didik diajak untuk secara maksimal menciptakan konsep dan media pembelajaran yang berbasis dari teknologi yang berkembang saat ini.

## PENUTUP

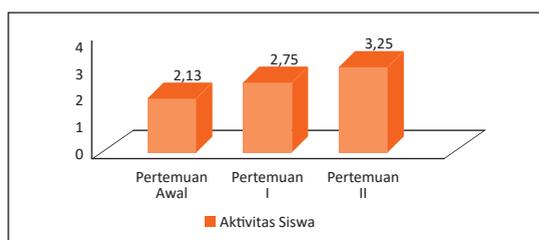
Berdasar hasil pengolahan data kualitatif dari tes pembelajaran serta observasi selama 3 (tiga) pertemuan/siklus dapat dianalisis sebagai berikut:

Hasil belajar 35 siswa terlihat mengalami peningkatan, pada pertemuan awal siswa yang tuntas sebesar 40,54 %, sedangkan pada pertemuan I dan II terjadi perubahan dimana kenaikan jumlah siswa yang tuntas belajar yaitu 55,45% dan 68,08%, angka angka tersebut didapat dari nilai siswa menjawab soal tes hasil belajar yang dilaksanakan dalam setiap akhir pertemuan:



Tabel I. Hasil Belajar fan Nilai Rata Rata Siswa

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran hasil *observasi* menunjukkan peningkatan dalam setiap *obeservasi*, pada masa Pertemuan Awal skor keaktifan siswa adalah 2,13 masuk kedalam kriteria cukup dan meningkat dan terus meningkat pada pertemuan I sebesar 2,75 dengan kriteria baik serta 3,25 pada Pertemuan II dengan kriteria sangat baik, dilihat dari aktivitas siswa dalam pembelajaran, siswa lebih aktif, kreatif dalam berpikir lebih berkonsentrasi serta dinamika kelompok juga berjalan ketika mereka bekerja secara kelompok.



Tabel II. Hasil Observasi Dalam Proses Pembelajaran

## SIMPULAN

“Dikomikin Saja” peneliti yakini mampu meningkatkan keterlibatan aktivitas siswa dalam proses belajar yang berujung pada meningkatnya ketuntasan belajar para siswa, fakta tersebut dibuktikan dengan hasil belajar para siswa yang Nilai

rata ratanya 70,32 atau 81,08 % dari 35 siswa telah tuntas.

Serta naiknya aktivitas siswa dalam proses belajar ditunjukkan dengan skor aktivitas siswa sebesar 32,5, hal ini mencerminkan penterlibatan siswa sebagai subjek pembelajaran tercapai melalui penggunaan media pembelajaran “Dikomikin saja”.

Aplikasi “Dikomikin saja” praktis dan sangat mudah, karena aplikasi ini dapat dikerjakan seperti orang bermain saja dan sebagian besar siswa sudah sangat familiar dengan aplikasi android.

Dengan media pembelajaran “Dikomikin saja” siswa lebih aktif belajar, kreatif dalam berpikir, semangat dan termotivasi untuk belajar IPS, serta kemampuan mengerjakan soal IPS juga meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar. 2010. *Media Pembelajaran*, Jakarta, Rajawali Press
- Daryanto. 2009. *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif & Inovatif*. Publisher. Jakarta:
- Hasan, Hamid 2012. *Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu Dalam Ide Pembelajaran*, Bandung: Rizqi Press
- Hermawati, Tety. 2015. *Komik Digital Untuk Pembelajaran Yang Menyenangkan*: Jakarta. Aura Publihsing
- Kasmadi, Hartono. 2001. Pengembangan Pembelajaran dengan Pendekatan Model-model Pengajaran Sejarah. Semarang: Prima Nugraha Nugraha Prtama
- Kemendikbud. 2006. *Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Kochhar, S.K. 2008. *Pembelajaran Sejarah*. Penerjemah Purwanta dan Yofita Hardiwati. Jakarta: Grasindo.
- Masdiono, Toni 2010. *14 Jurus Membuat Komik*. Jakarta: Creative Media
- Nahatanael, Daldjoeni. 2008. *Geogarfi Sejarah*. Bandung: Penerbit Alumni
- Sadiman, Arief dkk. 2012. *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sadulloh, Uyoh 2012, pengantar Filsafat Pendidikan, Jakarta: Alfabeta
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai 2009. *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

# ***Bacakak Kampuang:*** **Konflik Horizontal Masyarakat Kampung Surau** **Kabupaten Dharmasraya** **Dengan Parit Rintang Kabupaten Sijunjung Tahun 2016**

**Niko Rienda**  
*Universitas Andalas*  
*rienda.niko@gmail.com*

**ABSTRAK** - Penelitian ini fokus kepada konflik dan bentrokan yang terjadi antara masyarakat Kampung Surau dan masyarakat Parit Rintang di PT Bina Pratama Sakato Jaya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal pokok dalam pendekatan ini adalah wawancara mendalam terhadap pelaku seperti buruh pabrik, pemuda, tokoh masyarakat, masyarakat, dan Anak *Bongka*.

Penelitian menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian sejarah ini, diantaranya Heuristik (Pengumpulan data). Heuristik dilakukan dalam bentuk pengumpulan sumber tertulis berupa, arsip dan surat kabar. Sumber lisan melakukan wawancara dengan tokoh yang terlibat dalam konflik tersebut seperti, Harison, Dede, dan Nofrizal. Setelah sumber didapatkan, kemudian dilakukan kritik sumber dan interpretasi. Klimaks dari tulisan berupa historiografi (Penulisan) tentang *bacakak kampuang* itu.

Dari hasil penelitian tentang *Bacakak Kampuang* antara masyarakat Kampung Surau dan masyarakat Parit Rintang yang terjadi pada 29 Juli 2016 mengakibatkan 10 rumah masyarakat dibakar dan dijarah. Konflik ini disebabkan oleh 2 faktor, *pertama*, permasalahan tapal batas wilayah. Tapal batas yang dipermasalahkan adalah tapal batas wilayah Kampung Surau dengan Parit Rintang, tapal batas ini juga merupakan tapal batas kabupaten yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan batas wilayah kedua wilayah sebab sedang dalam proses penyelesaian. *Kedua*, permasalahan wilayah kerja antara masyarakat Kampung Surau dan Parit Rintang di perkebunan kelapa sawit dan di pabrik kelapa sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya. Pembagian kerja yang kurang merata membuat perseteruan dan kecemburuan pada pekerja dan buruh sehingga membuat masyarakat saling berselisih paham.

Simpulan yang didapatkan adalah ketidakpuasan masyarakat selama ini meledak karena dipicu oleh permasalahan tapal batas. Untuk mencegah konflik kekerasan jangan terulang lagi maka persoalan yang terpendam harus dikemukakan dan dibuka wacana dialog antara pihak yang bertikai. Dalam ungkapan Minangkabau, *indak ado kusuik nan indak salasai* (tidak ada persoalan yang tidak selesai)

**KATA KUNCI** - *Konflik, Horizontal, Kampung, Perbatasan, Pekerjaan.*

**ABSTRACT** - This research focuses on conflicts and clashes that occur between the people of Kampung Surau and the community of Parit Rintang at PT Bina Pratama Sakato Jaya. The approach in this study uses a qualitative approach. The main thing in this approach is in-depth interviews with actors such as factory workers, youth, community leaders, the community, and Anak *Bongka*.

Research uses historical research methods. The parts of this historical research method, including heuristics (data collection). Heuristics are carried out in the form of collecting written sources in the form of archives and newspapers. Oral sources interviewed leaders involved in the conflict, such as, Harison, Dede, and Nofrizal. After the source is obtained, then the source and interpretation are criticized. The climax of the

---

writing is historiography (Writing) about the bacakak of the campaign.

From the results of research on Bacakak Kampoang between the people of Kampung Surau and the community of Parit Rantang that occurred on July 29, 2016, 10 community houses were burned and looted. This conflict is caused by two factors, first, the problem of regional boundaries. The boundary at issue is the boundary of the Kampung Surau area with Parit Rantang, this boundary is also a district boundary, namely Dharmasraya Regency and Sijunjung Regency. This is due to the lack of clarity on the territorial boundaries of the two regions because it is in the process of being resolved. Secondly, the problem of the working area between the people of Kampung Surau and Parit Rantang on oil palm plantations and in the palm oil mill PT Bina Pratama Sakato Jaya. The unequal division of labor makes enmity and jealousy for workers and laborers, making the community disagree with each other.

The conclusions obtained were that the community's insecurity had exploded because it was triggered by boundary problems. To prevent violent conflicts do not happen again, the hidden issues must be raised and a dialogue discourse is opened between the conflicting parties. In the Minangkabau phrase, *indak ado kusuik nan indak salasai* (there is no problem that is not finished)

KEYWORDS - *Conflict, Horizontal, Village, Border, Work.*

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2016, koran Padang Ekspres menerbitkan berita yang menghebohkan masyarakat. *Bacakak Kampung* (Perang Kampung) terjadi di daerah perbatasan antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya.

“Aksi kekerasan di tengah masyarakat Sumbar kian menjadi-jadi. Setelah Mapolres Sijunjung diamuk massa, kini tawuran antar kampung. Dua nagari bertetangga di perbatasan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, baku hantam. Bentrokan terjadi antara Kenagarian Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung dengan Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, kemarin (29/7). Sebanyak 10 rumah hangus terbakar dan 4 rumah lainnya di rusak massa sekitar pukul 10.30.”<sup>1</sup>

Bentrokan yang terjadi antar kedua kelompok masyarakat berpusat di lokasi

pabrik kelapa sawit milik PT Bina Sakato Jaya dan kemudian menyebar ke kedua kampung. Jumat subuh, ratusan masyarakat Parit Rantang yang didominasi kaum laki-laki berkumpul di kantor pemuda dengan membawa senjata tajam seperti, Parang, *Toyak* (senjata tajam berbentuk tombak), Pisau, Gancu, *Senepang Angin* (Pistol Angin), Cangkul, Gir, Pisau, Solar/Bensin dan senjata tajam lainnya. Ratusan massa ini bersama-sama menuju pabrik sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya untuk menyerang masyarakat Kampung Surau yang ada di pabrik dan di sekitar pabrik. Massa ini tiba pagi hari di lokasi pabrik tersebut yang jaraknya tidak jauh dari Kampung Parit Rantang. Tanpa kompromi, ribuan massa ini langsung mencari masyarakat Kampung Surau.

Sebelumnya, masyarakat Kampung Surau yang ada di pabrik telah mendapatkan informasi kalau masyarakat Parit Rantang akan menyerang mereka, Sehingga mereka secepat mungkin menyelamatkan diri dari pabrik. Masyarakat Kampung

<sup>1</sup> “Perang Kampung, 10 Rumah Terbakar”. *Padang Ekspres*, 30 Juli 2016.

Surau yang tinggal di sekitar lokasi pabrik juga ikut menyelamatkan diri dari serbuan massa. Mereka meninggalkan rumahnya dan lari ke rumah sanak keluarganya yang ada di Kampung Surau.

Karena tidak menemukan masyarakat Kampung Surau di lokasi, massa pun membakar 10 rumah warga dan menjarah barang-barang yang ada didalam rumah. Kemudian 4 rumah lainnya dirusak massa. Masyarakat Kampung Surau berusaha menyelamatkan diri dari amukan massa dan berusaha untuk pergi ke kampungnya. Melihat hal ini, masyarakat Kampung Surau tidak mau tinggal diam. Dengan membawa senjata tajam yang ada, ratusan pemuda Kampung Surau menunggu di perbatasan kampung. Mereka mendapatkan informasi bahwa masyarakat Parit Rintang akan menyerbu kampung mereka. Suasana kala itu sangat mencekam. Kampung Surau pun sangat hening dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Hanya sedikit kaum laki-laki yang solat jumat di masjid. Mereka takut nanti ketika solat jumat mereka diserang oleh masyarakat Parit Rintang. Kaum wanita dan anak-anak bersembunyi di dalam rumah dengan pintu dan jendela rumah dikunci rapat-rapat.

Ratusan Aparat Kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan massa. Tak tanggung-tanggung, Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska juga turun langsung ke lokasi kejadian untuk menenangkan masyarakat. *Niniak Mamak* atau petinggi kedua kampung langsung diajak *Duduak Basamo* (Berunding) oleh Bupati. Mereka melakukan perundingan agar bentrokan ini bisa diselesaikan. Setelah perundingan, didapatkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak dan *Niniak Ma-*

*mak* inilah yang berusaha menjelaskan dan meredam amarah kedua kampung.<sup>2</sup> Bupati pun juga ikut meredam amarah massa dan berbicara langsung dengan masyarakat. Akhirnya, massa pun dapat dibubarkan oleh *Niniak Mamak* dan aparat kepolisian.

Mengacu dari kejadian diatas, *bacakak banyak* sesungguhnya tidak terlepas dari karakter budaya dan sejarah etnis Minangkabau yang mewajibkan setiap anggota masyarakat membela kampungnya, dalam *mamangan* adat dikenal dengan istilah “*tagak kampuang mambela kampuang, tagak banagari mambela nagari*”. Ditinjau dari sudut sejarah misalnya, perang antar kampung merupakan pola perang yang sudah pernah terjadi pada abad XVIII dan XIX yang lalu di Minangkabau. Pada penghujung abad XX ini atau tepatnya sejak runtuhnya rezim Soeharto, pola perang kampung kembali tumbuh dengan suburnya di beberapa wilayah salah satunya di Kabupaten Dharmasraya.<sup>3</sup>

Dalam melihat *bacakak banyak*, biasanya terjadi antar dua nagari yang berbatasan. Alasan pokok perkelahian biasanya mereka memiliki berbagai akar persoalan yang bersifat laten, seperti batas nagari, tradisi yang turun temurun.<sup>4</sup> Terjadinya konflik Kampung Surau dan Parit Rintang salah satunya faktornya adalah masalah tapal batas. Hal ini karena kedua nagari ini berada di perbatasan kabupaten yaitu Parit Rintang berada di Kabupaten Sijunjung dan Kampung Surau berada di Kabupaten Dharmasraya.

Permasalahan perebutan lahan ker-

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Zaiyardam, *Bacakak Banyak: Pola Perang AntarKampung di Minangkabau*, dalam Zaiyardam (ed), (Yogyakarta: INSISTPress, 2010), hlm., 142-143.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

ja juga menjadi faktor dalam konflik ini. Pemicu konflik ini karena ada pengancaman dan intimidasi dilakukan warga Kampung Surau terhadap warga Parit Rintang yang bekerja di PT Bina Pratama Sakato Jaya. Warga Parit Rintang tidak boleh bekerja di pabrik tersebut oleh masyarakat Kampung Surau.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, konflik antara masyarakat Kampung Surau dengan Parit Rintang menarik dikaji. Konflik ini memiliki akar sejarah yang panjang. Hal yang terjadi pada akhir juli 2016 itu merupakan puncak dari perseteruan yang telah terpendam lama.

## PERMASALAHAN

Penelitian ini mengambil batasan spasial di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya. Alasannya karena, *Bacakak Kumpang* yang terjadi di PT Bina Pratama Sakato Jaya dan meluas ke Kampung Surau termasuk ke dalam wilayah administratifnya Kampung Surau. Oleh karena itulah, penelitian ini berfokus kepada wilayah Kampung Surau, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 2016. Alasannya karena di 2016 merupakan puncak dari ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat Parit Rintang terhadap masyarakat Kampung Surau hingga akhirnya terjadi *Bacakak Kumpang* yang mengakibatkan dibakarnya 10 rumah masyarakat. Guna menfokuskan permasalahan yang akan dikaji, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi konflik *Bacakak Kumpang*?
2. Bagaimana proses terjadinya *Bacakak Kumpang*?
3. Bagaimana keadaan pasca peristiwa *Bacakak Kumpang*?

## TINJAUAN PUSTAKA

Sumber-sumber yang menjadi acuan penulis yaitu buku, jurnal, maupun tulisan yang sudah ada mengenai konflik dan perang kampung. Tulisan Zaiyardam dalam bukunya yang berjudul “Pemetaan Potensi Konflik dan Skenario Penanggulangannya: Studi *Bacakak* Antar Kampung di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat (2010).”<sup>6</sup> Konflik sudah terjadi secara turun temurun, kemudian menjadi warisan dalam masyarakat sebagai potensi besar sumber konflik. Bahkan konflik sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat, yang kadangkala dapat diselesaikan secara cerdas dan seringkali dengan tindakan kekerasan seperti *bacakak banyak*. Hal inilah yang menjadi persoalan besar di dalam masyarakat perkampungan di Sumatera Barat, yang ditandai kualitas dan kuantitas dari korban *bacakak banyak*.

Zaiyardam dalam buku “Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan ada bab yang membahas “*Bacakak Banyak: Pola Perang Antar Kampung di Minangkabau* (2010),”<sup>7</sup> menjelaskan bahwa *cakak banyak* di pedesaan Minangkabau sesung-

6 Zaiyardam, *Pemetaan Potensi Konflik dan Skenario Penanggulangannya: Studi Bacakak Antar Kampung di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat*, dalam Afrizal (ed), (Padang: Andalas University Press, 2010), hlm., 162.

7 Zaiyardam, *Budaya Konflik Dan Jaringan kekerasan*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2010), hlm., 173.

5 “Warga Bakar 10 Barak Buruh Pabrik Sawit”. *Media Indonesia*, 30 Juli 2016.

gunhnya sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Dikatakan budaya, karena *cakak banyak* ini dikenal di semua kampung, sehingga setiap kampung pernah melakukannya. Pokok persoalan biasanya adalah masalah anak muda. Namun persoalan laten dari semuanya adalah persoalan tanah, penguasaan sumber daya alam dan batas nagari.

Gerry Van Klinken dalam bukunya “Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia (2007)”<sup>8</sup>, menjelaskan bahwa kekerasan komunal yang terjadi merupakan peristiwa sepihak, bukan merupakan perang sipil antara dua pihak yang hampirimbang. Penjelasan-penjelasan yang berbasis keluhan mengasumsikan bahwa konflik kekerasan muncul karena orang-orang merasa sakit hati. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terkait dengan kejadian ini sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Resolusi ini kemudian diterapkan dalam aturan pemerintah daerah.

Hartoyo dalam “Stereotip Etnik dan Resolusi Konflik Pertanahan di Perdesaan Lampung: Kasus Konflik Antar Etnik di Desa Bungkok Kecamatan Jabung dan di Desa Kebondamar Kecamatan Matarambaru Kabupaten Lampung Timur (2004)”<sup>9</sup> menjelaskan bahwa konflik dimulai dari masalah pribadi antar etnik, kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok etnik. Setelah konflik antar pribadi me-

muncak kemudian diikuti penganiayaan dan pembunuhan terhadap seseorang oleh sekelompok orang. Pengelolaan konflik efektif dilakukan secara integral dengan keterlibatan aparat pemerintah dan para tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Penyelesaian konflik berakhir dengan kesepakatan bersama melalui perdamaian. Resolusi konflik efektif dilakukan dengan strategi sosio-kultural dengan pendekatan olahraga, pendidikan, dan kesenian.

Dalam buku Alpha Amirrachman “Revitalisasi Kearifan lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso (2007)”<sup>10</sup> menjelaskan bahwa kekerasan struktural yang sistematis pada akhirnya meletupkan konflik komunal dengan kekerasan pada saat lembaga-lembaga pengelola konflik yang dimiliki masyarakat maupun yang dikendalikan Pemerintah, lemah tidak berfungsi. Kekerasan struktural yang pada akhirnya berujung pada pelemahan suatu kelompok sistematis inilah merupakan akar permasalahan di wilayah konflik komunal.

Timo Kivimaki dalam “Penelitian Konflik Suku dalam Masyarakat Multi-Budaya (2000)”<sup>11</sup> menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik adalah pelaku kunci, selalu dalam pelebaran dan pencegahan konflik. Konflik tidak akan dapat dicegah bila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi potensi konflik atau konflik yang sedang terjadi. Namun, pencegah-

8 Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm., 207.

9 Hartoyo, *Stereotip Etnik dan Resolusi Konflik Pertanahan di Perdesaan Lampung: Kasus Konflik Antar Etnik di Desa Bungkok Kecamatan Jabung dan di Desa Kebondamar Kecamatan Matarambaru Kabupaten Lampung Timur*, dalam Fera Nugroho, dkk (ed), (Yogyakarta: Pustaka Percik, 2004), hlm., 115.

10 Alpha Amirrachman, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2007), hlm., 294-295.

11 Timo Kivimaki, *Penelitian Konflik Suku dalam Masyarakat Multi-Budaya*, dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk (ed), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm., 128-129.

an konflik dapat didukung dari luar. Pencegahan konflik tidak harus hanya terfokus pada perilaku konflik. Pencegahan konflik juga dapat bertujuan menyelesaikan perselisihan pada akar perilaku, dengan membujuk pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyepakati kompromi-kompromi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Tujuan penelitian sejarah ini yaitu untuk merekonstruksi aktifitas manusia pada masa lampau.<sup>12</sup>

Tahapan heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber itu dikategorikan dengan 2 sumber yaitu, sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis berupa arsip, dokumen, buku, hasil-hasil penelitian. Sumber lisan didapatkan dengan jalan mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam *bacakak kmpuang*. Dalam metode sejarah, sumber sejarah yang dikumpulkan itu berupa pelaku peristiwa dan “saksi mata” (*eyewitness*) yang mengetahui kejadian tentang suatu periode. Testimoni (kesaksian) dari para saksi mata itu memuat semua yang dipikirkan, dirasakan, dan dikatakan oleh individu dan kelompok masyarakat tentang suatu kejadian dan mengapa sesuatu terjadi. Semua yang berasal dari saksi mata itu telah direkam dalam dokumen.<sup>13</sup> Langkah dari sejarah lisan ini dilakukan melalui wawancara. Pemilihan informan menggunakan metode *snow-*

*ball sampling*. *Snowball sampling* adalah suatu teknik pengumpulan data yang dimulai dari seseorang atau sekelompok orang ataupun kasus yang kemudian dikembangkan berdasarkan jaringan hubungan antar orang perorang tersebut. Melalui *snowball sampling*, masyarakat digambarkan sebagai jaringan yang berhubungan. Antara satu orang dengan orang lain dihubungkan langsung atau tidak oleh sebuah jaringan sekampung, senasib ataupun saling berke-nalan.

Tahap kritik sumber yaitu melakukan kritik terhadap semua bahan yang didapatkan baik tertulis maupun lisan. Sejarah (keabsahan sumber) yaitu kritik eksteren dan interen. Kritik eksteren untuk mencari keaslian sumber yang telah didapatkan. Sedangkan kritik interen untuk mencari kredibilitas sumber atau kebenaran sumber.

Tahap interpretasi yaitu menafsirkan sumber, fakta-fakta ataupun temuan yang didapatkan didalam penelitian untuk memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Penafsiran harus bersifat logis yang kemudian disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan. Proses interpretasi harus bersifat selektif, karena tidak semua sumber dan temuan dapat dimasukkan ke dalam penelitian, sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

Penulisan sejarah atau Historiografi, yaitu tahapan terakhir dari penelitian sejarah untuk dilakukan penulisan. Historiografi merupakan hasil penelitian yang ditulis menjadi karya tulis ilmiah.

<sup>12</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 67.

<sup>13</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm., 31.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Masyarakat Kampung Surau

Kampung Surau merupakan salah satu desa yang berada dibawah kaki Bukit Barisan di Kenagarian Gunung Selasih Kabupaten Dharmasraya. Wilayah Kampung Surau diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Lalo dan Sungai Batang Pungin. Kampung Surau awalnya bernama “Lubuk Simantung” yang kala itu masih belum memiliki Datuk dan Penghulu. Masyarakat masih mempercayai hal-hal mistis atau Animisme. Lubuk Simantung diubah namanya menjadi “Kampung Syura” yang berarti kampung tempat mengkaji adat. Karena kala itu, Kampung Syura banyak didatangi oleh orang-orang dari Siguntur, Padang Laweh, Sitiung dan Pulau Punjung untuk mengkaji tentang adat. Kata “Syura” berarti *Mangaji Adaik*. Setelah masuknya Islam ke wilayah Kampung Syura, maka masyarakat mulai memeluk agama Islam. Masyarakat mulai membangun sebuah surau untuk belajar agama. Kemudian mulai muncul banyak surau-sarau yang ada di Kampung Syura, sehingga nama Kampung Syura diganti menjadi “Kampung Surau” karena memiliki banyak surau.<sup>14</sup>

Batas-batas wilayah Kampung Surau, sebagai berikut:

1. Batas wilayah Kampung Surau dengan Parit Rantang yaitu Sungai Tak Berbibir dan Sungai Muaro Usau.
2. Batas wilayah Kampung Surau dengan Timpeh yaitu Pematang Tak Putus dan Bukit Gadorang.
3. Batas wilayah Kampung Surau dengan

Lubuk Bulang yaitu Tanjung Ganting Lubuk Luka dan Batu Sungkai.

4. Batas wilayah Kampung Surau dengan Sungai Kambut yaitu Pakai Golek Air Guling Batang.<sup>15</sup>

Kampung Surau berada di seberang Sungai Pungin sekarang. Masyarakat tinggal disana dengan puluhan kepala keluarga yang mendiami. Setiap tahun, Kampung Surau selalu menjadi langganan banjir karena daerah ini termasuk wilayah yang berkontur tanah rendah dan dikelilingi oleh dua sungai. Masyarakat yang ingin pergi ke pusat kota pun harus menyeberangi sungai terlebih dahulu karena tidak adanya akses jembatan. Mereka pergi ke Pulau Punjung (pusat kota) untuk pergi ke pasar dan membeli keperluan sehari-hari.<sup>16</sup>

Kondisi daerah inilah maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan BPKBA (Badan Penanggulangan Bencana Alam) melakukan transmigrasi pada tanggal 18 oktober 1982 ke wilayah seberang Kampung Surau. Transmigrasi ini awalnya kurang ditanggapi dengan baik oleh masyarakat Kampung Surau karena pekerjaan dan lahan pertanian mereka masih berada disana. Akan tetapi dengan program pemerintah yang ingin memindahkan masyarakat Kampung Surau ke tempat yang lebih layak maka dilakukanlah beberapa upaya agar masyarakat mau pindah ke sana. Masyarakat diberikan rumah, tanah perumahan, makanan, pakaian, uang, serta layanan kesehatan secara gratis untuk membujuk masyarakat. Terbukti dengan program ini masyarakat mulai berang-

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm., 20-21.

<sup>16</sup> Munir, *wawancara*, 13 Mei 2018 di Kampung Surau

<sup>14</sup> Munir, *Asal Usul Kampung Surau*, (Dharmasraya, 2007), hlm., 8-9.

sur-angsur untuk pindah.<sup>17</sup>

Mata pencaharian masyarakat adalah bertani seperti ke sawah dan berladang. Masyarakat mulai membangun kehidupan mereka di tempat yang baru ini yang dinamakan dengan Kampung Surau. Kampung Surau dibagi menjadi tiga blok yaitu, blok A (Sibubuik), blok B (Dusun Arumbai), dan blok C (Batu Agung). dalam hal pembagian wilayahnya. Kampung Surau memiliki 7 Datuk atau Penghulu Adat dan 7 Suku, yaitu, suku Piliang, Chaniago, Melayu, Melayu Buo, Tigo Lareh, Tigo Niniak Rangkayo Kaciak, Tigo Niniak Rajo Malano.<sup>18</sup>

Sekitar tahun 90-an pemerintah mulai memperkenalkan karet kepada masyarakat Kampung Surau agar dapat menambah pendapatan mereka selain bersawah dan berladang karena tingginya harga karet dan besarnya pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat. Maka masyarakat Kampung Surau mulai mengolah hutan-hutan menjadi perkebunan karet. Ekonomi masyarakat mulai meningkat dengan adanya karet ini terbukti dengan banyaknya rumah-rumah masyarakat yang diganti dari awalnya rumah kayu yang diberikan pemerintah digantikan menjadi rumah permanen (batu). Harga karet yang tinggi membuat kehidupan masyarakat Kampung Surau berubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain ke sawah, masyarakat juga berkebun dan mayoritas pekerjaan masyarakat adalah disektor pertanian.<sup>19</sup>

Tahun 2000-an menjadi angin segar bagi masyarakat Kampung Surau. Dengan

potensi daerah yang dimiliki yaitu Bukit Barisan yang menyimpan hasil alam yang tinggi yaitu sarang burung wallet. Tingginya harga dan permintaan sarang wallet dipasaran membuat masyarakat mulai membentuk kelompok persuku dalam mengolah potensi daerah yang dimiliki. Setiap tiga bulan sekali masyarakat sudah bisa memanen hasil sarang wallet ini. Harga yang tinggi membuat perekonomian masyarakat Kampung Surau mulai membaik, banyak dari masyarakat yang sudah bisa membuat rumah yang bagus, membeli kendaraan hingga menyekolahkan anak mereka ke jenjang Perguruan Tinggi. Mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani dan berkebun karet dan mencari sarang burung wallet sebagai mata pencaharian.<sup>20</sup>

Tahun 2003, perusahaan kelapa sawit PT Bina Sakato jaya mulai dibangun di Kampung Surau melalui perizinan pemerintah daerah dan masyarakat Kampung Surau. Pada tahun itu juga pabrik pengolah buah kelapa sawit ini mulai beroperasi dan menjadi tempat pekerjaan baru bagi masyarakat Kampung Surau, Timpeh dan Parit Rantang. Hal ini karena, lokasi pabrik ini berdekatan dengan kedua wilayah tersebut. Banyak dari masyarakat Kampung Surau yang bekerja sebagai buruh di pabrik tersebut.

Harga sarang burung wallet mulai turun hingga sangat rendah, sehingga masyarakat Kampung Surau mulai beralih profesi. Begitupun dengan harga karet yang mulai tidak stabil dan sering naik – turun, sehingga masyarakat mulai mencari pekerjaan baru.<sup>21</sup>

Tingginya prospek kelapa sawit den-

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Nurisam, *wawancara*, 02 Juni 2018 di Kampung Surau

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Harison, *wawancara*, 23 Juni 2018 di Kampung Surau

<sup>21</sup> *Ibid.*

gan harga yang tinggi, membuat masyarakat mulai tergiur dengan kelapa sawit. Banyak pekebunan karet masyarakat yang dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini karena faktor stabilnya harga sawit dan perawatan yang mudah. Mayoritas masyarakat Kampung Surau sampai sekarang memiliki lahan kelapa sawit sendiri dan banyak yang bekerja sebagai petani kelapa sawit.

Kampung Surau memiliki luas wilayah sekitar 57,59 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.025 jiwa di tahun 2005. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan penduduk sekitar 1.639 jiwa dengan jumlah peningkatan sebesar 614 jiwa. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kampung Surau sebanyak 2.267 jiwa dengan jumlah peningkatan sebesar 628 jiwa.<sup>22</sup>

Tabel  
Jumlah Penduduk Kampung Surau

Tahun	
2010	2016
1.639	2.267

### Batas Wilayah Kampung Surau dan Parit Rintang

Batas Kampung Surau dengan Parit Rintang yaitu sungai tak berbibir dan muara "Usau". Pada zaman dahulu kala di sungai tak berbibir ada orang meninggal dunia, orang tersebut tak ada lagi yang mempunyai bibir, itu sebabnya disebut sungai tak berbibir. Batas wilayah Kampung Surau dan Parit Rintang dipisahkan oleh batas sungai yaitu Sungai Tiang, Sungai Tambang, Sungai Kalang, Sungai Sakayan

<sup>22</sup> Data Pengurus Mesjid Darul Jadid Muhammadiyah Kampung Surau

Tinggi, Sungai Talangkai, dan Sungai Tak Berbibir.<sup>23</sup>

### Faktor Penyebab *Bacakak Kampuang*

Menurut Zaiyardam, *Bacakak banyak* antar kampung sesungguhnya bukanlah hal baru dalam masyarakat Minangkabau. Perang antar kampung sudah ada sejak sebelum kedatangan Belanda, terutama karena persoalan batas kampung. Bahkan, dalam perang Paderi misalnya, perlawanan yang dilakukan terhadap Belanda justru lebih banyak bersifat upaya mempertahankan kampung yang dilewati Belanda, bukan dalam konteks Minangkabau secara keseluruhan.<sup>24</sup>

Belakangan ini, perang antar kampung itu menjamur kembali. Jika dilihat asal muasalnya, setidaknya dapat dikategorikan atas dua hal pokok yaitu yang bersifat laten dan temporal. Persoalan yang bersifat laten adalah penguasaan lahan pekerjaan. Persoalan batasan tanah yang tidak tegas sesungguhnya merata terjadi di setiap kampung di Sumatera Barat. Batasan yang tidak tegas satu kampung dengan kampung lainnya seringkali menjadi sumber utama konflik. Konflik ini yang sudah terjadi secara turun temurun, kemudian menjadi warisan dalam masyarakat sebagai potensi besar sumber konflik. Bahkan konflik sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat, yang kadangkala dapat diselesaikan secara cerdas dan seringkali dengan tindakan kekerasan seperti *bacakak banyak*. Hal inilah yang menjadi persoalan besar didalam masyarakat perkampungan di Sumatera

<sup>23</sup> Munir, *Asal Usul Kampung Surau*, (Dharmasraya, 2007), hlm 19.

<sup>24</sup> Zaiyardam, *Bacakak Banyak: Pola Perang Antar Kampung di Minangkabau*, dalam Zaiyardam Zubir (ed), (Yogyakarta: INSIST Press, 2010), hlm., 162.

Barat, yang ditandai kualitas dan kuantitas dari korban *bacakak* banyak.<sup>25</sup>

*Bacakak Kumpang* antara masyarakat Kampung Surau dan masyarakat Parit Rantang pada 29 Juli 2016 yang mengakibatkan 10 rumah dibakar yang melibatkan ratusan massa disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor ini yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut. Ada 2 faktor yang melatarbelakangi peristiwa ini yaitu, pertama, permasalahan tapal batas wilayah. Tapal batas yang dipermasalahkan adalah tapal batas wilayah Kampung Surau dengan Parit Rantang, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan batas wilayah kedua daerah tersebut karena dalam proses penyelesaian. Kedua, permasalahan wilayah kerja antara masyarakat Kampung Surau dan Parit Rantang di perkebunan kelapa sawit dan di pabrik kelapa sawit PTBina Pratama Sakato Jaya. Pembagian kerja yang kurang merata membuat persekutan dan kecemburuan pada pekerja dan buruh sehingga membuat masyarakat saling berselisih paham.<sup>26</sup>

*Cakak banyak* di pedesaan Minangkabau sesungguhnya sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Dikatakan budaya, karena *cakak banyak* ini dikenal di semua kampung, sehingga setiap kampung pernah melakukannya. Dalam *cakak banyak* itu, pokok persoalan biasanya adalah masalah anak muda. Namun persoalan laten dari semuanya adalah persoalan tanah, penguasaan sumber daya alam dan batas nagari.<sup>27</sup>

## 1. Tapal Batas

Awal mula penyebab terjadinya konflik ini adalah permasalahan tapal batas wilayah yang juga merupakan tapal batas kabupaten yaitu antara Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Masyarakat yang berbatasan ini yaitu masyarakat Kampung Surau dan masyarakat Parit Rantang. Informasi yang berhasil dihimpun tim padangmedia.com, kerusuhan ditenggarai karena perselisihan antara warga Kampung Surau dengan warga Kampung Parit Rantang Nagari Kunangan dipicu konflik batas wilayah. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 10.30 wib. Massa dari kampung Parit Rantang mendatangi Kampung Surau dan membakar rumah warga. Akibat dari penyerangan dan pembakaran tersebut, sepuluh rumah warga Kampung Surau terbakar. Namun beruntung, kerusuhan ini tidak menimbulkan korban jiwa meskipun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain membakar rumah warga Kampung Surau, massa juga berusaha membongkar gardu perbatasan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.<sup>28</sup>

Kejelasan tapal batas yang membatasi kedua wilayah ini masih belum jelas sampai tahun 2016. Tidak ada penanda secara jelas mana batas wilayah kedua wilayah tersebut. Masyarakat Kampung Surau dan Parit Rantang membatasi wilayah tanah ulayat mereka dengan patokan Sungai Muaro Usau dan Sungai Tak Berbibir. Kedua sungai inilah yang menjadi patokan masyarakat sejak dulu.<sup>29</sup> Tak hanya itu, di perbatasan wilayah tersebut terdapat aset

25 *Ibid*

26 "Warga Bakar 10 Barak Buruh Pabrik Sawit". *Media Indonesia*, 30 Juli 2016.

27 Zaiyardam, *op. cit.* hlm., 173.

28 <http://padangmedia.com/dipicu-konflik-batas-wilayah-sepuluh-rumah-dibakar> diunduh 29 Juni 2018.

29 Munir, *op. cit.*, hlm., 20.

yang berharga yaitu pabrik kelapa sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya dan juga perkebunan kelapa sawit yang menjadi tempat mata pencaharian bagi masyarakat Kampung Surau dan Parit Rantang.

Sebulan sebelum kejadian pembakaran itu terjadi, Ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemuda Kampung Surau melakukan rapat bersama terkait pembuatan gapura sebagai batas wilayah Kampung Surau. Sebenarnya hal ini sudah lama diperbincangkan oleh Ninik mamak Kampung Surau akan tetapi belum terrealisasikan. Tujuan rapat ini adalah untuk membuat pembatas kedua wilayah tersebut secara fisik, karena tidak adanya pembatas wilayah secara jelas. Hal ini karena, wilayah ini selalu menjadi permasalahan bagi masyarakat Parit Rantang dan Kampung Surau.<sup>30</sup>

Masyarakat Kampung Surau menginginkan adanya batas wilayah yang jelas sebagai penanda wilayah teritorial mereka, akan tetapi sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya masih dalam proses penyelesaian tapal batas ini. Lambatnya penanganan proses penyelesaian tapal batas ini dari pemerintah daerah membuat masyarakat Kampung Surau berinisiatif untuk membuat tapal batas ini.

Landasan pembuatan tapal batas ini adalah yang pertama, tidak adanya kejelasan mengenai pembatas kedua wilayah tersebut baik secara fisik dan di dalam peta Nagari Gunung Selasih wilayah PT Bina Pratama Sakato Jaya berada di Kampung Surau, akan tetapi kejelasan ini masih belum jelas oleh pemerintah daerah. Kedua, masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik dan bertempat tinggal disana

mayoritas adalah masyarakat Kampung Surau walaupun ada beberapa masyarakat Parit Rantang, sehingga wilayah ini diisi oleh masyarakat kedua wilayah tersebut. Ketiga, Surat Keputusan badan, guru dan PNS berasal dari Kabupaten Dharmasraya dan menandakan bahwa lokasi ini adalah wilayah Kabupaten Dharmasraya yang berada di Kampung Surau. Keempat, ketika melakukan pemilihan umum, masyarakat pemilih berada pada wilayah administratif Dharmasraya dan menggunakan KTP Kampung Surau. Kelima, perusahaan PT Bina Pratama Sakato Jaya memiliki alamat perusahaan di Kenagarian Gunung Selasih, bukan di Kenagarian Kunangan Parit Rantang. Berdasarkan landasan inilah masyarakat Kampung Surau mulai berinisiatif untuk membuat tapal batas kedua wilayah tersebut.<sup>31</sup>

Hasil dari rapat Ninik mamak dengan masyarakat Kampung Surau adalah pembuatan spanduk yang bertuliskan ucapan “Selamat Datang di Kabupaten Dharmasraya” yang nantinya akan di pasang di perbatasan wilayah oleh pemuda Kampung Surau. Sebelum melakukan percetakan pada spanduk tersebut, kepala jorong Kampung Surau beserta perwakilannya menemui Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk meminta izin dan mengurus perizinan pembuatan tapal batas di wilayah Kampung Surau. Kemudian, setelah lima hari menunggu, pemerintah daerah menanggapi dengan baik pembuatan tapal batas ini yang nantinya akan menjadi penanda wilayah Kampung Surau dan didapatkannya izin untuk membuat tapal batas ini dari Pemerintah Daerah Kabupa-

30 Armanda, *Wawancara*, 25 Mei 2018 di Kampung Surau

31 Armanda, *wawancara*, 10 Mei 2018 di Kampung Surau.

ten Dharmasraya. Pemuda Kampung Surau yang dinaungi oleh Ikatan Pemuda Pelajar Kampung Surau (IPPKAS) mulai memproses dan mempersiapkan segala yang diperlukan dalam pembuatan tapal batas ini seperti membuat dan mencetak spanduk untuk gapura tapal batas ini.<sup>32</sup>

Setelah spanduk tersebut di cetak, kemudian proses pemasangan spanduk dimulai dan dibawa ke batas wilayah atau lokasi pemasangan sebagai penanda bahwa disana adalah batas kedua wilayah ini. Lokasinya yaitu di jembatan pemisah antara wilayah Kampung Surau dengan Parit Rantang yang dipisahkan oleh Sungai Muara Usau. Masyarakat Kampung Surau melakukan pemasangan spanduk yang bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Dharmasraya - Sijunjung. Sehari setelah pemasangan spanduk yang dilakukan oleh pemuda Kampung Surau, spanduk tersebut hilang dan tidak diketahui siapa orang yang mengambil spanduk tersebut. Kemudian spanduk tersebut dibuat kembali dan dipasang kembali di lokasi tersebut. Akan tetapi, keesokan harinya spanduk tersebut hilang kembali dan juga tidak diketahui orang yang mengambil spanduk tersebut.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, dua hari setelah kejadian tersebut, Ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemuda kembali berkumpul untuk merapatkan perihal pemasangan spanduk ini dan dihasilkan keputusan akan dibuatnya gapura permanen dari beton dengan dana akan ditanggung oleh dana masyarakat Kampung Surau sebesar 5 juta rupiah. Proses pengerjaan gapura ini akan

dikerjakan oleh pemuda Kampung Surau. Hari selasa, 26 Juli 2018, pembelian bahan material untuk pembuatan gapura ini dilakukan dan bahan material pembuatan gapura tersebut sampai di lokasi.<sup>34</sup>

Rabu, 27 Juli 2016, pemuda Kampung Surau beserta pekerja bangunan mulai bekerja di lokasi tersebut untuk memulai pembuatan gapura perbatasan wilayah tersebut. Mereka membersihkan lokasi dan mulai mencampurkan bahan-bahan material yang digunakan untuk pembuatan gapura. Pada siang harinya, pekerja dan pemuda pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat dan makan. Sekelompok masyarakat Parit Rantang kurang senang dengan pembuatan gapura ini dan siang harinya ketika pemuda Kampung Surau pergi, sekelompok pemuda Parit Rantang membawa massa untuk menghancurkan gapura batas wilayah yang sedang dikerjakan. Belum sempat dibangun, bahan-bahan pembuatan gapura dibuang ke sungai dan diberantakkan. Pemuda dan masyarakat Kampung Surau mendapatkan informasi tentang kejadian pembuangan bahan material tersebut dan mereka bersama-sama langsung menuju lokasi pembuatan gapura. Akan tetapi, sesampainya di lokasi, masyarakat Kampung Surau tidak berhasil menemukan masyarakat Parit Rantang satupun sehingga tidak menimbulkan bentrokan antar masyarakat. Masyarakat Parit Rantang cepat meninggalkan lokasi tersebut karena mereka mengetahui bahwa masyarakat Kampung Surau menuju ke sana.<sup>35</sup>

Menurut Edwin, warga sekitar mengatakan pembakaran rumah-rumah terse-

32 *Ibid.*

33 <https://sumbar.antaranews.com/berita/183223/sepuluh-warung-dibakar-ulah-sengketa-tapal-batas-diunduh tanggal 29 Juni 2018>

34 Zulefendi, *wawancara*, 02 Juni 2018 di Kampung Surau

35 Nofrizal, *wawancara*, 18 Mei 2018 di Parit Rantang

but bermula dari rencana pembangunan gapura oleh masyarakat Kampung Surau sebagai tapal batas. Dia menambahkan pemasangan gapura sudah direncanakan tiga hari lalu. Namun, karena warga Parit Rintang tidak terima, rencana itu diurungkan. Kamis, sudah diselesaikan, tetapi tiba-tiba saja mereka menyerang tadi,” tukasnya. Wakapolda Sumatra Barat Kombes Nur Afiah mengatakan konflik dua kampung tersebut merupakan sengketa pabrik sawit. “Setiap pihak mau menguasai lokasi pabrik. Itu yang didapat dari masyarakat Kampung Surau “ujarnya. Seusai kejadian tersebut, sebutnya, Kapolda Sumbar Brigjen Basarudin langsung turun ke lokasi kejadian.<sup>36</sup>

Melihat kejadian inilah Ninik mamak kedua belah pihak ingin melakukan perundingan bersama dalam penyelesaian permasalahan ini. Melalui PT Bina Pratama Sakato Jaya, kedua Ninik mamak dari kedua wilayah ini diberi kabar untuk melakukan perundingan mengenai permasalahan ini. PT Bina Pratama Sakato Jaya membantu penyelesaian masalah ini karena lokasi sengketa berada di dekat pabrik sawit sehingga PT Bina Pratama Sakato Jaya membantu memfasilitasi penyelesaian masalah ini, sehingga didapatkan kesepakatan bahwa hari Jumat, 29 Juli 2016 akan diadakan pertemuan kedua pihak yaitu Ninik mamak, tokoh masyarakat, Pemuka adat dan Pemuda dari Kampung Surau dan Parit Rintang di ruang pertemuan PT Bina Pratama Sakato Jaya.<sup>37</sup>

## 2. Perebutan Lahan Kerja

Permasalahan pembagian kerja menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik ini. Bentrokan yang terjadi antar masyarakat salah satu penyebabnya dipicu masalah pekerjaan sebagai buruh pabrik di PT Bina Pratama Sakato Jaya. Buruh pabrik ini dibagi menjadi dua yaitu ada buruh pabrik yang di kontrak langsung oleh perusahaan dan ada buruh pabrik yang tidak dikontrak langsung oleh perusahaan. Buruh yang ikut dalam aksi pertikaian tersebut yaitu “Anak Bongkar Sawit” atau yang disebut Anak *Bongka* adalah buruh yang tidak terikat langsung oleh perusahaan.<sup>38</sup>

Buruh adalah orang yang menjual tenaganya demi sendiri, dia bekerja untuk menerima upah. Jadi buruh juga biasa diartikan sebagai sumber daya manusia yang diperlukan dalam produksi selain pengusaha atau pemilik modal.<sup>39</sup>

Pada tahun 2003 perusahaan swasta mendirikan sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit yang bernama PT Bina Pratama Sakato Raya di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (sekarang menjadi Kabupaten Dharmasraya). Pabrik ini didirikan di wilayah Kampung Surau yang langsung berbatasan dengan daerah Parit Rintang. Pabrik ini menjadi tempat mencari nafkah baru bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Terutama bagi masyarakat Kampung Surau sendiri yang awalnya bermata pencaharian sebagai penyadap karet dan mencari sarang burung walet di Bukit Barisan. Dengan

36 “Warga Bakar 10 Barak Buruh Pabrik Sawit”, *Media Indonesia*, 30 juli 2018.

37 Harison, *wawancara*, 02 Mei 2018 di Kampung Surau.

38 Dede, *wawancara*, 12 Mei 2018 di Kampung Surau.

39 *Eksikopedi Nasional Indonesia*. Jilid 3. 1989. (Jakarta: PT. Cipta Adi Kuasa). hlm., 568.

dibukanya pabrik ini, masyarakat Kampung Surau memiliki pekerjaan baru yaitu menjadi buruh pabrik. Tak hanya masyarakat Kampung Surau saja yang bekerja disana, masyarakat Parit Rantang pun juga ikut menjadi buruh pabrik. Bisa dikatakan bahwa pabrik ini berada di antara dua kampung.<sup>40</sup>

Anak *Bongka* adalah orang-orang yang mengeluarkan atau membongkar buah sawit dari mobil pengangkut dan dikeluarkan ke tempat pengumpulan buah sawit di pabrik. Setiap mobil pengangkut buah sawit yang masuk ke pabrik, Anak *Bongka* ini mulai bekerja. Mereka mengeluarkan satu persatu buah sawit dari *Oto Pra* (nama mobil pembawa buah sawit) ke tempat penampungan. Untuk satu *Oto Pra* ini, ada dua orang Anak *Bongka* yang bekerja. Upah yang didapatkan oleh Anak *Bongka* ini diberikan oleh supir *Oto Pra* yang membawa buah sawit tadi.<sup>41</sup>

Permasalahan yang timbul itu diawali karena ketidakpuasan hak kerja yang didapatkan oleh Anak *Bongka* ini. Pada awalnya ada tiga kampung yang bekerja sebagai Anak *Bongka* di PT Bina Pratama Sakato Jaya yaitu, Kampung Surau, Parit Rantang dan Timpeh. Ketiga kampung ini mengelola masing-masing Anak *Bongka* dengan mekanismenya masing-masing. Pabrik tidak mengikat dan mengatur proses kerjanya. Oleh karena ini setiap Anak *Bongka* pada setiap kampung memiliki struktur kepengurusannya masing-masing. PT Bina Pratama Sakato Jaya hanya memberikan pembagian hak kerja dan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

40 Harison, wawancara, 02 Mei 2018 di Kampung Surau.

41 Dede, wawancara, 12 Mei 2018 di Kampung Surau.

Pembagian jatah kerja yaitu 4 hari untuk masyarakat Kampung Surau, 2 hari untuk masyarakat Parit Rantang dan 1 hari untuk masyarakat Timpeh. Masyarakat Kampung Surau mendapatkan jatah kerja lebih dari pada kampung lain, hal ini karena pekerja dari Kampung Surau lebih banyak sehingga didapatkanlah jatah lebih untuk masyarakat Kampung Surau.<sup>42</sup> Jaringan kekerasan dalam masyarakat, biasanya asal muasal kekerasan adalah keresahan dan ketidakpuasan. Hal ini kemudian diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidakpuasan itu.<sup>43</sup>

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Timpeh mulai beralih pekerjaan menjadi buruh perkebunan. Sehingga 1 hari yang dijatahkan tadi dihilangkan dan dibagi ke kedua kampung tersebut. Karena dominasi dan *lobby* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Surau dan juga kebanyakan buruh pabrik adalah masyarakat Kampung Surau, sehingga jatah 1 hari tadi didapatkan oleh masyarakat Kampung Surau. Mulai dari sinilah timbul rasa iri dan ketidakpuasan dari masyarakat Parit Rantang yang hanya mendapatkan jatah kerja 2 hari sedangkan masyarakat Kampung Surau mendapatkan jatah kerja 5 hari.<sup>44</sup>

Menurut Agusnadi, Wali Nagari Gunung Selasih, konflik tapal batas itu berakar dari kecemburuan kesempatan kerja di perusahaan sawit itu. "Kalau soal tapal batas sudah sampai di provinsi. Artinya provinsi yang menentukan," ujarnya. Hanya, klaim tapal batas bermuara pada alo-

42 *Ibid.*

43 Zaiyardam, *Dari Mukjizat ke Kemiskinan Absolut: Dinamika Ekonomi Petani dan perlawanan Rakyat Kepada Penguasa dan Pengusaha*. (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2016). hlm., 94-95.

44 *Ibid.*

kasi atau kesempatan kerja di perusahaan tersebut. Agusnadi mengaku, selama 10 tahun keberadaan perusahaan sawit itu, warganya mendapat porsi lebih, baik sebagai karyawan di pabrik maupun pekerja bongkar muat sawit. “Selama ini ada kesepakatan, senin dan jumat, jatah bongkar muat orang Parit Rintang, sedangkan sisanya yakni lima hari lainnya orang Kampung Surau. Adapun untuk pekerja di pabrik, sekitar 70% adalah warga kami,” tandas Agusnadi.<sup>45</sup>

Secara teoritis, asal muasal setiap konflik dan konflik kekerasan bisa berasal dari rasa frustrasi yang dialami oleh setiap anggota masyarakat. Rasa kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk dialami rakyat kemudian melahirkan ketidaksetiaan, yang puncaknya adalah tindakan kekerasan. Perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, pengusaha, tentara, dan polisi serta preman kemudian melahirkan konflik, kekerasan, kebijakan pengusaha yang tidak merugikan, kebijakan pemerintah yang tidak bijak, jebakan kemiskinan, keresahan, konflik, radikalisme, mogok, demonstrasi, dan pemberontakan.<sup>46</sup>

Terlalu banyaknya jatah yang didapatkan oleh masyarakat Kampung Surau membuat rasa ketidakpuasan bagi masyarakat Parit Rintang, hal ini ditambah dengan seiring meningkatnya jumlah pekerja Anak *Bongka* Parit Rintang dan jatah waktu kerja yang sedikit. Hal ini sudah pernah dimintai oleh masyarakat Parit Rintang kepada pihak pabrik untuk penambahan jatah hari, akan tetapi setelah melakukan

mediasi dan diskusi, tidak berhasil didapatkan. Oleh karena itu, ketidakpuasan pembagian jatah kerja yang didapatkan oleh masyarakat Parit Rintang menjadi salah satu pemicu memanasnya konflik ini.

Konflik kekerasan adalah antara penjelasan-penjelasan yang berbasis keluhan di satu pihak, dengan penjelasan-penjelasan yang berbasis mobilisasi di pihak lain. Penjelasan-penjelasan yang berbasis keluhan mengasumsikan bahwa konflik kekerasan muncul karena orang-orang merasa sakit hati. Sebaliknya, penjelasan-penjelasan mobilisasi menaruh perhatian lebih besar pada bagaimana para pemimpin mampu mengorganisir sumber-sumber yang mereka butuhkan untuk meraih sesuatu kesempatan, mungkin melalui cara-cara kekerasan.<sup>47</sup>

### Proses Terjadinya *Bacakak Kampuang*

Rabu malam, 27 Juli 2016, terkait permasalahan pembuatan gapura dan pembuangan bahan material oleh masyarakat Parit Rintang, Ninik mamak beserta tokoh masyarakat dan pemuda dari kenagarian Kunangan Parit Rintang yang terdiri dari Sungai Tambang, Parit Rintang, Kunangan dan Sungai Tenang melakukan rapat bersama di ruangan Talabang Sakti dengan pembahasan permasalahan gapura dan tapal batas yang dibuat oleh masyarakat Kampung Surau serta mengenai rapat dengan Ninik mamak Kampung Surau pada hari jumat yang difasilitasi oleh PT Bina Pratama Sakato Jaya mengenai penyelesaian sengketa tapal batas.

Menurut Andri yang merupakan

45 “Warga Bakar 10 Barak Buruh Pabrik Sawit,” *Media Indonesia*, 30 Juli 2018.

46 Camara, Donm Helder. 2000. *Spiral Kekerasan*. (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar). hlm., 50-56.

47 Gerry Van Klinken. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). hlm., 63.

pemuda Parit Rintang menjelaskan bahwa masyarakat Parit Rintang kurang senang dengan pembuatan gapura yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Surau karena secara tidak langsung mereka telah mematok bahwa itu adalah wilayah mereka. Hal ini kurang disepakati oleh masyarakat Parit Rintang karena masyarakat Parit Rintang beranggapan bahwa wilayah PT Bina Pratama Sakato Jaya merupakan wilayah mereka dan tidak ada penjelasan dari pemerintah yang menegaskan bahwa lokasi PT Bina Pratama Sakato Jaya berada di wilayah Kampung Surau. Oleh karena itu, pertemuan ini juga membahas mengenai batas wilayah ini. Hasil dari agenda rapat tersebut adalah seluruh pemuda Sungai Tambang, Parit Rintang, Kunangan, dan Sungai Tenang wajib hadir pada hari jumat di lokasi PT Bina Pratama Sakato Jaya dalam mengawal proses penyelesaian tapal batas ini dan terlebih dahulu berkumpul di lapangan bola Parit Rintang. Hasil rapat nagari ini adalah menyelesaikan permasalahan tapal batas dengan dikawal secara bersama-sama oleh masyarakat. Pada rapat ini juga tidak ada dijelaskan tentang rencana penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat Parit Rintang.<sup>48</sup>

Asal muasal setiap konflik kekerasan bisa jadi berasal dari rasa frustrasi yang dialami oleh setiap anggota masyarakat. Rasa kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk dialami masyarakat kemudian melahirkan ketidaksenangan, yang puncaknya adalah tindakan kekerasan.<sup>49</sup> Hal inilah yang dialami oleh masyarakat Parit Rintang

bahwa mereka merasa kecewa dan tidak senang dengan tindakan pematokan tapal batas yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Surau.

Keesokan harinya yaitu hari kamis, 28 Juli 2016, setiap masjid yang ada di nagari Kunangan Parit Rintang (Kunpar) memberikan pengumuman yang berisikan semua pemuda diwajibkan untuk hadir dan meninggalkan segala bentuk pekerjaan dan bersama-sama pergi ke PT Bina Pratama Sakato Jaya pada hari jumat serta berkumpul di lapangan bola Parit Rintang. Pada pengumuman yang disampaikan tidak disebutkan membawa persenjataan, akan tetapi masyarakat yang tergabung dalam kenagarian Kunangan Parit Rintang ini membawa persenjataan yang mereka miliki, baik itu senjata tajam, *senepang* angin dan persenjataan lainnya. Hal ini disebabkan karena isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat Kunangan Parit Rintang adalah isu penyerangan yang akan dilakukan di PT Bina Pratama Sakato Jaya. Sehingga, masyarakat membawa persenjataan yang dimiliki untuk menjaga diri.<sup>50</sup>

*Dynamics of Contention* mengurai dua jalan dengan mana sebuah episode persekutuan penuh kekerasan bisa terjadi. Bedanya terletak dalam jalur arus informasi, sebab konflik terjadi hanya jika informasi terus menyebar hingga menjangkau banyak orang yang satu menyangkut penyampaian informasi sepanjang garis interaksi yang sudah ada.<sup>51</sup>

Menurut Andri pemuda Parit Rintang, menjelaskan bahwa pengumuman ini disampaikan siang hari dan malam harinya disetiap masjid dan mushala yang ada di

48 Andri, *wawancara*, 18 Mei 2018 di Parit Rintang.

49 Zaiyardam, *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2010), hlm., 21

50 Andri, *wawancara*, 18 Mei 2018 di Parit Rintang.  
51 Gerry Van Klinken, *op. cit.*, hlm., 127.

Kunungan Parit Rintang. Timbul gengsi dikalangan pemuda Kunungan Parit Rintang mengenai isu ini, karena mewajibkan seluruh pemuda untuk hadir dan bagi yang tidak datang akan merasa dikucilkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga mau tidak mau, pemuda Kunungan Parit Rintang harus menghadirinya. Pemuda Kunungan Parit Rintang menganggap hari jumat itu mereka akan *bacakak* (perang/menyerang) masyarakat Kampung Surau, karena isu yang beredar dari orang ke orang adalah pergi *bacakak*. Akan tetapi dari hasil rapat Kenagarian Kunungan Parit Rintang sebenarnya adalah mengawal dan mengikuti rapat tentang permasalahan tanah ulayat dan batas wilayah, tetapi isu *bacakak* yang banyak berkembang ditengah masyarakat Kunungan Parit Rintang. Hal inilah yang menjadi pemicu penyerangan yang terjadi.<sup>52</sup>

Pada hari jumat, 29 juli 2016, setelah salat subuh, masyarakat sudah mempersiapkan diri mereka untuk mulai bergerak dan menuju lapangan bola Parit Rintang. Sekitar pukul 06.00 pagi masyarakat yang tergabung pada kenagarian Kunungan Parit Rintang sudah mulai berdatangan dan berkumpul di Lapangan bola Parit Rintang. Massa yang berkumpul ini di koordinir oleh pemuda Parit Rintang. Sekitar jam 07.00 pagi, massa yang telah berkumpul, mulai bergerak menuju PT Bina Pratama Sakato Jaya dengan menggunakan kendaraan masing-masing, ada yang menggunakan motor dan ada juga yang menggunakan mobil. Jarak dari lapangan bola ke lokasi PT Bina Pratama Sakato Jaya sekitar 8-9 km atau menghabiskan waktu sekitar

25-30 menit.<sup>53</sup>

Massa ini kemudian dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama berjaga-jaga di perbatasan atau gerbang masuk ke Parit Rintang yang tujuannya adalah menjaga agar masyarakat Kampung Surau tidak pergi dan tidak menyerang ke wilayah Parit Rintang. Kelompok massa yang kedua berlokasi di Simpang masuk ke pabrik PT Bina Pratama Sakato Jaya yang tujuannya berjaga-jaga agar masyarakat Kampung Surau tidak datang ke pabrik dan kelompok massa yang ketiga berada di lokasi pabrik sawit yang tujuannya mencari masyarakat Kampung Surau yang ada di lokasi pabrik. Kelompok massa paling banyak yaitu massa yang berada di sekitaran pabrik sawit. Sekitar jam 09.00, seluruh kelompok massa Kunungan Parit Rintang sudah berada di lokasinya masing-masing.<sup>54</sup>

Tujuan awal massa adalah untuk mengawal jalannya rapat tanah ulayat dan batas wilayah berubah menjadi konflik terbuka. Konflik terbuka yaitu pengekspresian dalam bentuk tindakan fisik, pembunuhan dan pertikaian antar masyarakat.<sup>55</sup> Massa Kunungan Parit Rintang tidak terkontrol dengan jumlahnya yang banyak sekitar ratusan orang dan ditambah lagi mereka membawa persenjataan masing-masing. Bentrokan yang terjadi antar kedua kelompok masyarakat berpusat di lokasi pabrik kelapa sawit milik PT Bina Pratama Sakato Jaya dan kemudian menyebar ke kedua kampung. Jumat subuh, ratusan

<sup>53</sup> Nofrizal, *wawancara*, 18 Mei 2018 di Parit Rintang.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Alpha Amirrachman, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2007), hlm., 34.

<sup>52</sup> Andri, *wawancara*, 18 Mei 2018 di Parit Rintang.

masyarakat Parit Rantang yang didominasi kaum laki-laki berkumpul di kantor pemuda dengan membawa senjata tajam seperti, Parang, *Toyak* (senjata tajam berbentuk tombak), Pisau, Gancu, *Senepang Angin* (Pistol Angin), Cangkul, Gir, Pisau, Solar/Bensin dan senjata tajam lainnya.

Konflik terbuka berskala massal dengan penggunaan kekerasan bukanlah peristiwa yang bisa serta-merta terjadi. Mesti ada tahapan atau fase-fase yang dilalui. Konflik seperti itu hanya bisa terjadi kalau ada prakondisi yang memungkinkan dan mencukupi bagi terjadinya konflik terbuka. Prakondisi konflik demikian umumnya merupakan hasil dari sebuah proses ketidakpuasan yang terakumulasi akibat perubahan-perubahan dalam jangka waktu lama. Begitu mendapatkan pemicu yang tepat maka konflik yang sudah bersifat laten/potensial tersebut dengan mudah berkembang menjadi konflik terbuka/terwujud dengan skala massal dan bersifat destruktif.<sup>56</sup> Hal inilah yang membuat masyarakat Parit Rantang tidak terkontrol untuk bertidak dengan jalan kekerasan, karena dipicu oleh permasalahan tapal batas dan didasari oleh rasa ketidakpuasan dalam pekerjaan yang mereka dapatkan.

Ratusan massa ini bersama-sama menuju pabrik sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya untuk menyerang masyarakat Kampung Surau yang ada di pabrik dan di sekitar pabrik. Aparat kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi tersebut tidak sanggup menghadang jumlah massa yang hadir, banyaknya jumlah massa yang datang tidak sebanding dengan jumlah aparat kepolisian

yang hadir sehingga membuat pihak aparat kewalahan menenangkan massa. Beberapa kali massa dihadang oleh aparat keamanan, akan tetapi massa terus melakukan perlawanan. Massa Kunpar ingin memasuki wilayah pabrik sawit untuk mencari masyarakat Kampung Surau, akan tetapi *blockade* aparat berhasil menahan massa untuk tidak masuk ke pabrik.

Pada Hari Kamis, sehari sebelum kejadian *bacakak kumpang terjadi*, masyarakat Kampung Surau juga telah mengetahui bahwa massa dari Parit Rantang akan datang untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat Kampung Surau melalui kerabat mereka yang berada di Parit Rantang. Ada sebagian dari masyarakat Kampung Surau yang percaya dengan berita ini dan ada juga yang tidak. Masyarakat yang percaya dengan berita ini berusaha menyelamatkan beberapa barang mereka dan menyelamatkan keluarganya ke tempat yang lebih aman. Bagi sebagian masyarakat Kampung Surau yang tidak percaya dengan berita itu, mereka mengetahui massa Kunpar melakukan penyerangan pada pagi jumat. Mendapat kabar di pagi hari bahwa masyarakat Kunangan Parit Rantang telah berkumpul, masyarakat Kampung Surau yang ada di sekitar pabrik berusaha menyelamatkan anak dan barang-barang rumah mereka ke tempat sanak saudara mereka. Akan tetapi karena massa Kunangan Parit Rantang hampir datang ke lokasi, banyak dari mereka menyelamatkan diri tanpa membawa perlengkapan dan barang-barang dirumahnya. Banyak perlengkapan di beberapa rumah masyarakat yang belum sempat diselamatkan.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban – Analisis Kritis Aspek: Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Keamanan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm., 113

<sup>57</sup> Dede, *wawancara*, 05 Juni 2018 di Kampung Surau

Sekitar pukul 10.00, massa mulai tidak dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian. Kepolisian mulai kewalahan karena banyaknya massa Kunangan Parit Rantang ini. Sekitar pukul 10.30 wib, massa tidak menemukan masyarakat Kampung Surau dan juga tidak bisa masuk ke lokasi pabrik, sehingga mulai massa marah dan membakar rumah masyarakat Kampung Surau. Rumah-rumah tersebut dibakar sampai hangus beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Ada sekitar 12 rumah yang hangus terbakar beserta isinya. Sangat disayangkan aparat keamanan tidak sanggup memadamkan api, karena keterbatasan personil kepolisian dan banyak dari personil lebih mengamankan dan mengawal massa Kunangan Parit Rantang.<sup>58</sup>

Masyarakat Kampung Surau berusaha menyelamatkan diri dari amukan massa dan berusaha untuk pergi ke kampungnya. Melihat hal ini, masyarakat Kampung Surau tidak mau tinggal diam. Dengan membawa senjata tajam yang ada, ratusan pemuda Kampung Surau menunggu di perbatasan kampung. Mereka mendapatkan informasi bahwa masyarakat Parit Rantang akan menyerbu kampung mereka. Suasana kala itu sangat mencekam. Kampung Surau pun sangat hening dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Hanya sedikit kaum laki-laki yang salat jumat di masjid. Mereka takut nanti ketika salat jumat mereka diserang oleh masyarakat Parit Rantang. Kaum wanita dan anak-anak bersembunyi di dalam rumah dengan pintu dan jendela rumah dikunci rapat-rapat.<sup>59</sup>

Masyarakat Kampung Surau lari ketakutan ke wilayah Kampung Surau, seluruh

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Reski, *wawancara*, 15 Juni 2018 di Kampung Surau.

rumah dikunci rapat-rapat dan anak-anak disembunyikan dalam rumah. Pemuda Kampung Surau menunggu di perbatasan kampung berjaga-jaga agar tidak ada massa Kunangan Parit Rantang yang datang menyerang. Aparat keamanan pun juga dikerahkan ke perbatasan Kampung Surau untuk berjaga-jaga.<sup>60</sup>

Konflik tidak akan dapat dicegah atau dilerai bila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi potensi konflik atau konflik yang sedang terjadi. Namun, pencegahan konflik dapat didukung dari luar. Pencegahan konflik tidak harus hanya terfokus pada perilaku konflik. Pencegahan konflik juga dapat bertujuan menyelesaikan perselisihan pada akar perilaku, dengan membujuk pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyepakati kompromi-kompromi.<sup>61</sup>

Penjelasan-penjelasan yang berbasis keluhan mengasumsikan bahwa konflik kekerasan muncul karena orang-orang merasa sakit hati. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terkait dengan kejadian ini sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan.<sup>62</sup> Melihat kondisi yang semakin ricuh ini, Ninik mamak kedua belah pihak mulai berkumpul di lokasi kejadian. Melihat massa mulai mengamuk, selang beberapa jam kemudian Kapolda Sumbar, Brigjen Pol. Basarudin didampingi Kapolres Sijunjung AKBP Dody Pribadi dan Kapolres Dharmasraya AKBP Lalu Muhammad Iwan Mahardan, serta pihak Pemkab Sijunjung dan Dhar-

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Timo Kivamaki, *Penelitian Konflik Suku dalam Masyarakat Multi-Budaya*, dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk (ed), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 128-129.

<sup>62</sup> Gerry Van Klinken, *op. cit.*, hlm. 207.

masraya, mengadakan pertemuan di salah satu ruangan di PT Bina Pratama. Tak hanya itu, pemerintah daerah seperti bupati Dharmasraya, wali nagari Kunangan Parit Rantang, dan kepala jorong Kampung Surau hadir di lokasi kejadian. Oleh karena itu, sehabis salat jumat, Ninik mamak kedua belah pihak melakukan *duduak basamo* (berunding) dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam hal penyelesaian permasalahan ini. Perundingan ini berlangsung di ruangan pertanian PT Bina Pratama Sakato Jaya. Massa Kunangan Parit Rantang pun disuruh menunggu dan diharapkan tenang oleh Ninik mamak. Sampai didapatkannya keputusan tersebut. Setelah 1,5 jam berunding, sekitar pukul 15.00 didapatkanlah hasil kesepakatan dari permasalahan ini.<sup>63</sup>

Pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan, tokoh Kampung Surau Harison dan Tokoh Parit Rantang Madalius dan Enti Jaya Dt. Manti Penghulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan. Kemudian satu-persatu pejabat memberikan pengarahan. Pertemuan pun diakhiri dengan dua kesimpulan pokok, yaitu pertama untuk menyelesaikan tapal batas antara Dharmasraya dan Sijunjung diserahkan penyelesaiannya ke Pemprov Sumbar, kedua permasalahan konflik lainnya diserahkan penyelesaiannya kepada ninik mamak setempat.<sup>64</sup>

Menurut Mardi sebagai Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar yang diwawancarai oleh wartawan harian haluan mengatakan Pemprov akan fokus menyelesaikan tapal batas di enam kabupaten/kota yang bermasalah, termasuk tapal batas

Dharmasraya dan Sijunjung. Enam daerah itu masing-masing tapal batas Padang Pariaman dengan Kota Pariaman, Padang Pariaman dengan Kota Padang, Kabupaten Solok dengan Dharmasraya, Sijunjung dengan Dharmasraya, Tanah Datar dengan Padang Panjang, dan Agam dengan Tanah Datar,” kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar, Mardi. Sebenarnya, lanjut Mardi, yang memicu permasalahan di Sijunjung dan Dharmasraya hanya karena pemasangan spanduk selamat datang yang dipasang di zona abu-abu. Atau dengan kata lain, zona yang masih dalam pembahasan. Tapal batas kedua daerah ini masih bermasalah karena, keduanya sama-sama mengajukan bukti yang berbeda. Dalam hal ini, terjadi perbedaan titik koordinat dan bukti keduanya membuat Pemprov tidak bisa menentukan tapal batas untuk kedua daerah ini. Jika tidak juga ditemukan solusi, maka akan diambil jalan tengah untuk dikembalikan pada Kemendagri,” katanya.<sup>65</sup>

Proses Perundingan ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang berisikan: Sehubungan dengan adanya kesalahpahaman antara pemuda Parit Rantang dengan pemuda Kampung Surau, maka ninik mamak kedua belah pihak beserta tokoh masyarakat diketahui oleh pemerintah Nagari Kunangan Parit Rantang dan pemerintah Nagari gunung selasih membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Ninik mamak kedua belah pihak bertanggung jawab bahwa cucu ponakan masing-masing tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang dapat membuat konflik dan

<sup>63</sup> Armanda, *wawancara*, 25 Mei 2018 di Kampung Surau.

<sup>64</sup> [http://www.pasbana.com/2016/08/tercapai-kesepakatan-damai-terkait\\_1.html](http://www.pasbana.com/2016/08/tercapai-kesepakatan-damai-terkait_1.html) di unduh 28 Mei 2018

<sup>65</sup> “Titik Koordinat Batas Berbeda”, *Harian Haluan*, 02 Agustus 2016

atau mengganggu keamanan.

2. Apabila ada salah satu dari pemuda/cucu kemanakan masing-masing pihak melakukan perbuatan tersebut diatas, maka cucu ponakan tersebut diserahkan ke pihak hukum.<sup>66</sup>

Pertemuan ini menyepakati perjanjian damai antara kedua belah pihak yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat dan ninik mamak kedua pihak yang bertikai. Ninik mamak Kunangan Parik Rantang diwakili Dt.Majo Besar, Buyung Jadid, Dt.Lello, Salim, Dt. Monti serta Januar Asmara dan Ninik Mamak Kampung Surau, Munir dan Liyusri. Isi kesepakatan tersebut, bahwa ninik mamak kedua belah sepakat bertanggung jawab untuk menjaga anak kemanakannya agar tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang mengganggu keamanan. Bahkan dalam perjanjian tersebut, kedua belah sepakat untuk membawa ke ranah hukum jika anak kemanakan kedua belah pihak kembali berulah atau mengulangi perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>67</sup>

Setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, Ninik mamak kedua belah pihak bertanggung jawab menenangkan dan membubarkan masyarakatnya masing-masing dan menjelaskan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Maka setelah dijelaskan kesepakatan tersebut, Ninik mamak Kampung Surau dan Parit Rantang berhasil membubarkan massa hingga menghindari terjadinya bentrokan antar masyarakat. Akhirnya massa kedua belah

pihak membubarkan diri dan kembali ke kampungnya masing-masing.

### **Pasca Peristiwa *Bacakak Kampuang***

Konflik *bacakak kampuang* yang terjadi antara masyarakat Kampung Surau dan Parit Rantang dalam teori konflik termasuk pada model konflik *agresor-defender*. Model *agresor-defender* menarik garis pembeda di antara kedua pihak yang berkonflik. Salah satu pihak, sang “*agresor*” (penyerang), dianggap memiliki suatu tujuan atau sejumlah tujuan yang mengakibatkannya terlibat di dalam konflik bersama pihak lainnya, sang “*defender*” (pihak yang bertahan). *Agresor* biasanya mulai dengan taktik-taktik *contentious* yang ringan, tetapi bila tidak berhasil, ia akan berpindah ke taktik-taktik yang lebih berat. Ini akan terus berlanjut sampai tujuannya tercapai atau sampai suatu titik dimana diperkirakan malampau nilai pencapaian tujuannya. Dengan *defender* hanya semata-mata bereaksi. Ia akan semakin meningkatkan reaksinya sebagai respons terhadap *agresor*. Ini akan terus berlanjut sampai sang *agresor* menang atau menghentikan upayanya.<sup>68</sup>

Istilah “*agresor*” dan “*defender*” di dalam model ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan *evaluative*. Dengan perkataan lain, istilah-istilah ini tidak menyiratkan bahwa salah satu pihak salah dan pihak lainnya benar di dalam kontroversi yang terjadi. *Agresor* adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang searah dengan kepentingannya, sedangkan *defender* adalah pihak yang be-

<sup>66</sup> Arsip Kesepakatan Antara Ninik Mamak Kunangan Parit Rantang Dan Kampung Surau 29 Juli 2016.

<sup>67</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/183223/sepuluh-warung-dibakar-ulah-sengketa-tapal-batas>. Diunduh tanggal 29 juli 2018

<sup>68</sup> Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm., 200.

rusaha menolak perubahan tersebut.<sup>69</sup> Dalam kasus konflik antara masyarakat Parit Rintang dan Kampung Surau ini yang menjadi *agresor* adalah masyarakat Parit Rintang dan yang menjadi *defender* adalah masyarakat Kampung Surau. Masyarakat Parit Rintang sebagai *agresor* ingin mencari kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang mereka hadapi yaitu terhadap lahan pekerjaan mereka, sedangkan masyarakat Kampung Surau sebagai *defender* tidak menginginkan hal tersebut dirubah. Oleh karena itu, dengan dipicu adanya permasalahan tapal batas wilayah membuat masyarakat Parit Rintang menemukan kesempatan itu untuk mengubah ketidakadilan pekerjaan yang mereka dapatkan.

Proses perundingan yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik *bacakak kumpang* ini dilakukan dengan cara berunding atau kompromi, baik dalam menyelesaikan konflik ketika terjadinya *bacakak kumpang* kedua masyarakat yang akhirnya menghasilkan kesepakatan. Penyelesaian pembagian kerja Anak *Bongka* juga dilakukan dengan cara kompromi. Terkadang Kompromi bukan satu-satunya solusi yang adil dalam proses terjadinya konflik. Karena kadang-kadang hasil *problem solving* berupa sebuah prosedur untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang yaitu aturan untuk mengabdikan semua permintaan salah satu pihak, sementara pihak yang lain hanya mendapatkan sedikit atau tidak mendapatkan apapun.<sup>70</sup> Dalam kasus *bacakak kumpang* ini, masyarakat Parit Rintang keluar sebagai pemenangnya karena semua permintaan dan

tuntutan mereka berhasil dikabulkan dan masyarakat Kampung Surau terpaksa men-galah dalam pembagian tersebut karena proses perundingan kedua belah pihak.

Masyarakat Kunangan Parit Rintang merasa tidak puas dengan pekerjaan yang mereka dapatkan karena pengelolaan angkutan muat buah kelapa sawit di perkebunan masih dominan dikuasai oleh masyarakat Kampung Surau. Perkebunan kelapa sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya memiliki Sembilan blok perkebunan yaitu blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, yang pembagian jatahnya didominasi oleh masyarakat Kampung Surau yang menguasai pengelolaan angkutan muat buah sawit yaitu blok A, B, C, D, E, F, dan G. sedangkan masyarakat Parit Rintang mendapatkan jatah blok H dan I.<sup>71</sup>

Masyarakat Parit Rintang menginginkan pembagian pengelolaan perkebunan PT Bina Pratama Sakato Jaya. Mereka ingin mengakhiri dominasi masyarakat Kampung Surau dalam pengelolaan perkebunan ini. Sebagai pemenang, masyarakat Parit Rintang dapat menguasai perkebunan tersebut dengan keberhasilan mendapatkan jatah kerja Anak *Bongka* dan melakukan penyerangan terhadap masyarakat Kampung Surau. Hal ini terlihat dari keluarnya surat tuntutan pada tanggal 7 september 2016 dari Pengurus Organisasi Pemuda Nagari Kunangan Parit Rintang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

Isi tuntutannya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pertemuan utusan pemuda Nagari Kunangan Parit Rintang, dengan pimpinan PT Bina Pratama Saka-

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm., 201.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm., 316-317.

<sup>71</sup> Harison, *wawancara*, 02 Mei 2018 di Kampung Surau.

to Jaya pratama sakato jaya, tanggal 06 September 2016, maka bersama ini, kami tegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil pertemuan tersebut:

1. Blok kebun B, C, D, E, F, G, H dan I akan dikelola angkutan TBS nya secara bersama-sama oleh pemuda Nagari Kunangan Parit Rintang, Nagari Kamang dan Nagari Muaro Takung dibawah koordinator pemuda Nagari Kunangan Parit Rintang, dan Ninik Mamak Parit Rintang.
2. Pengelolaan angkutan tersebut, akan dimulai pelaksanaannya pertanggal 1 oktober 2016.
3. Angkutan jenjang kosong, pekerjaan proyek dan angkutan pekerjaan di blok tersebut diatas, juga agar dapat dikelola oleh pemuda Nagari Kunangan Parit Rintang, Nagari Kamang, dan Nagari Muaro Takung.<sup>72</sup>

Dari tuntutan ini jelas terlihat bahwa masyarakat Kenagarian Kunangan Parit Rintang ingin mengakhiri dominasi masyarakat Kampung Surau dalam dominasi pengelolaan angkutan muat buah sawit yaitu menuntut blok B, C, D, E, F, G, H dan I akan dikelola oleh masyarakat Kunangan Parit Rintang, sedangkan masyarakat Kampung Surau hanya mendapatkan blok A. Pada surat tuntutan ini terlihat jelas bagaimana persatuan masyarakat Kamang Baru. Karena ketika *bacagak kampuang* terjadi yang menjadi aktor masyarakatnya adalah pemuda Kenagarian Kunangan Parit Rintang. Pada surat tuntutan ini atas nama suluruh masyarakat Se-Kecamatan

Kamang Baru melakukan tuntutan untuk menginginkan pekerjaan pengelolaan bongkar muat buah kelapa sawit di perkebuan PT Bina Pratama Sakato Jaya.

Hal ini sesuai juga dengan pendapat Zaiyardam dalam bukunya Sejarah Gerakan Sosial bahwa bagian yang terburuk dari budaya Minangkabau ini adalah solidaritas *primitive* yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan ungkapan *tagak ba kaum, mambela kaum, tagak ba suku, mambela suku, tagak ba nagari, mambela nagari* (jika ada yang menyerang kaum, maka kaum dibela. Jika ada menyerang suku, maka suku dibela. Jika ada menyerang nagari, maka nagari dibela). Persoalan siapa yang salah, tidak menjadi hal pokok, yang penting bela dulu nagari dari setiap penyerangan fisik yang dilakukan oleh pihak luar.<sup>73</sup>

## KESIMPULAN

Kehadiran PT Bina Pratama Sakato Jaya membawa dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat. Satu sisi menyediakan tenaga kerja dan pada sisi lain menimbulkan konflik kekerasan. Perebutan pekerjaan antara dua kelompok mengkristal menjadi *bacagak kampuang*. Klimaksnya adalah *bacagak kampuang* antara masyarakat Kampung Surau versus masyarakat Parit Rintang. Konflik kekerasan itu kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Permasalahan tapal batas cuma sebagai pemicu terjadinya konflik ini. Hal ini karena permasalahan administrasi wilayah merupakan tugas pemerintah daerah. Ada hal mendasar dalam proses terjadinya konflik antar kampung ini yaitu perma-

<sup>72</sup> Surat 03/P-KPR/IX/2016 Tentang Penegasan Hasil Pertemuan Tanggal 06 September 2016 oleh Pengurus Organisasi Pemuda Nagari Kunangan Parit Rintang.

<sup>73</sup> Zaiyardam, *op. cit.*, hlm., 303.

salahan ketidakpuasan, kekecewaan dan ketidakadilan yang terpendam lama pada masyarakat Parit Rintang yang mayoritas penguasaan lahan kerja dikuasai oleh masyarakat Kampung Surau. Setelah dipicu oleh permasalahan tapal batas terjadilah konflik antara kedua belah pihak. Namun, pasca terjadinya konflik timbul permasalahan menjalar yaitu permasalahan jatah kerja Anak *Bongka* dan permasalahan jatah kerja pengelolaan bongkar muat buah sawit di perkebunan PT Bina Pratama Sakato Jaya.

Dilihat dari sejarahnya, warisan *bacacak kumpang* ini sudah menjadi bagian yang integral dalam masyarakat. Dalam ungkapan Minangkabau terkenal dengan “*tibo di suku mambela, tibo di kaum mambela kaum, tibo di nagari mambela nagari*” (berdiri di suku membela suku, berdiri di kaum membela kaum, berdiri di nagari membela nagari), maka karakter masyarakat yang masih primitif seperti ini masih melekat dalam diri masyarakat.

## SARAN

Pemerintah harus cepat dan memprioritaskan penyelesaian tapal batas yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini karena masih banyaknya wilayah-wilayah perbatasan yang tapal batasnya masih belum jelas sampai sekarang sehingga memungkinkan timbulnya konflik dalam permasalahan tapal batas.

Perusahaan harus mengatur lebih jelas pembagian pekerjaan setiap pekerja mereka secara merata, sehingga tidak ada wilayah yang lebih diuntungkan karena dominasi dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal. *Pembangunan Dan Konflik: Hasil-hasil Penelitian Para Dosen Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Andalas*. Padang: Andalas University Press, 2010.
- Alpha Amirachman. *Revitalisasi Kearifan Loka: Studi Resolusi Konflik di Kalmantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2007.
- Dean G. Pruit, Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dewi Fortuna Anwar. *Dkk. Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Fera Nugroho. *Dkk. Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Percik, 2004.
- Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Klinken, Gerry Van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- M.D Mansoer. *Dkk. Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara, 1970.
- Munir. *Asal Usul Kampung Surau*. Dharmasraya, 2007.
- Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pusatama Utama, 1999.
- Sayuti Thalib. *Hubungan Tanah adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Padang: Bina Aksara, 1985.
- Zaiyardam. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: INSISTPress, 2010.
- Zaiyardam. *Sejarah Gerakan Sosial*. Padang: Minangkabau Press, 2015.

### Jurnal Ilmiah

- Ilyas. “Kajian Penyelesaian Konflik Antara Desa Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.” *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 06. No. 01. 2014, hlm. 1213-1227.
- M. Tahir. Analisis Konflik Antara Desa Samili

Dengan Masyarakat Desa Dadibou Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2016. *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol: 7. No 1. 2017, hlm. 49-54.

Nanda Winar Sagita, Dkk. Konflik Antar Etnis Di Tanah Gayo: Tinjauan Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa Dan Etnis Aceh Tahun 1989-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol 1. No 1. 2016, hlm. 59-79.

#### **Media Cetak**

Antara News. *Sepuluh Warung Dibakar Ulah Sengketa Tapal Batas*. Terbit 29 Juli 2016.

GoSumbang.com. *Dipicu Sengketa Tapal Batas Sijunjung-Dharmasraya Puluhan Rumah Dibakar*. Terbit 30 Juli 2016.

Harian Haluan, "Titik Koordinat Batas Berbeda", Terbit 02 Agustus 2016

Media Indonesia. *Warga Bakar 10 Barak Buruh Pabrik Kelapa Sawit*. Terbit 29 Juli 2016.

Padang Ekspres. *Perang Kampung, 10 Rumah Terbakar*. Terbit 30 Juli 2016.

Padang Media.com. *Dipicu Konflik Batas Wilayah Sepuluh Rumah Dibakar*. Terbit 30 Juli 2016.

Riausky.com. *Kesepakatan Warga Dua Desa Di Dharmasraya-Sijunjung Pasca Pembakaran 10 Rumah*. Terbit 30 Juli 2016.

# Kearifan Lokal di Tengah Masyarakat Muslim di Propinsi Bali: Studi Toleransi

**Budi Sulistiono**

*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
budi@uinjkt.ac.id*

**ABSTRAK** - Bali memiliki tradisi atau kebudayaan besar di berbagai aspek kehidupan yang membentuk kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal itulah yang menjadi faktor utama toleransi kehidupan masyarakat Bali. Meskipun Bali dikenal sebagai pulau yang dihuni oleh mayoritas Hindu, namun ternyata terdapat pula masyarakat Muslim yang telah menghuni pulau Bali sejak abad ke-15 dan hidup saling berdampingan. Muslim di Bali memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat yang plural. Mereka tidak benar-benar tercerabut dari budayanya, karena masih mengadopsi budaya setempat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Islam. Kehidupan harmonis yang mereka jalani merupakan hasil dari proses asimilasi panjang sehingga melahirkan tatanan hidup yang bisa dijalankan secara berdampingan. Dalam tatanan hidup kemasyarakatan, penduduk Bali mengenal konsep menyama braya, artinya adalah ikatan persaudaran sebagai jalan untuk menggapai kebahagiaan dan keharmonisan. Kearifan lokal di Bali meliputi nilai, norma, etika, kepercayaan, hukum adat, dan aturan-aturan khusus yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal membentuk pola relasi yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kearifan lokal bagi masyarakat Muslim atau non-Muslim di Bali mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang toleran.

**KATA KUNCI** - *Muslim, Bali, Kearifan Lokal, dan Toleransi*

**ABSTRACT** - Bali has a great tradition or culture in various aspects of life that make up the local wisdom of the local community. Local wisdom is the main factor of life tolerance of Balinese people. Although Bali is known as an island populated by Hindu majority, there are also Muslim communities who have inhabited the island of Bali since the 15th century and live side by side. Muslims in Bali give their own color to plural society life. They are not completely deprived of their culture, because they still adopt a local culture that is not against Islamic fundamental values. The harmonious life they live is the result of a long process of assimilation so that it gives birth to a life order that can be run side by side. In the social order, the people of Bali are familiar with the concept of brama, which means the bond of brotherhood as a way to reach happiness and harmony. Local wisdom in Bali includes values, norms, ethics, beliefs, customary laws, and specific rules integrated into people's lives. Local wisdom forms a harmonious relationship between man and man, man with nature and man with knowledge. Therefore, local wisdom for Muslim or non-Muslim community in Bali can create a tolerant society life.

**KEYWORDS** - *Muslim, Bali, Local Wisdom, and Tolerance*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya, etnis, suku dan ras, terdapat kurang lebih 389 suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bahasa, tata nilai dan budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Adat istiadat, tata nilai dan budaya tersebut antara lain mengatur beberapa aspek kehidupan, seperti: hubungan social kemasyarakatan, ritual peribadatan, kepercayaan, mitos-mitos dan sanksi adat yang berlaku dilingkungan masyarakat adat yang ada. Fenomena ini merupakan realitas yang tak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagaimana terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari segi etnis misalnya, ada suku Melayu dan suku Melanesia yang selanjutnya membentuk ratusan suku besar dan ribuan suku-suku *derivative* besar dan kecil. Dari segi sejarah politik lokal, terdapat puluhan bahkan ratusan system kerajaan kesukuan lama yang berpengaruh terhadap sistem stratifikasi sosial dan adat istiadat.

Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan di seluruh Nusantara. Dari segi agama, terdapat sejumlah agama besar dunia dan sejumlah sistem kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh Nusantara dengan *networking*-nya masing-masing, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>1</sup>

1 M. Atho Mudzhar, "Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke Depan: Tinjauan dari Aspek Keagamaan," dalam M. Ridwan Lubis (ed.), *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Departemen Agama, 2005), h. 1-2.

Keanekaragaman budaya daerah tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Di samping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya kearah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini perlu dicermati karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh.

Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses atau kaidah perencanaan dan pembangunan wilayah atau kawasan, seperti yang terdapat pada masyarakat Bali. Kaidah-kaidah tersebut ada yang bersifat anjuran, larangan, maupun persyaratan adat yang ditetapkan untuk aktivitas tertentu. Selain aspek fisik dan visual, keanekaragaman budaya, sosial kemasyarakatan yang terkandung di dalam kearifan local umumnya bersifat verbal dan tidak sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu bentuk *knowledge management* terhadap berbagai jenis kearifan local tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pros-

es perencanaan dan perancangan lingkungan binaan yang berkelanjutan, misalnya di Bali. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Ibukota provinsinya ialah Denpasar<sup>2</sup> yang terletak di bagian selatan pulau ini. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau NusaLembongan, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Serangan.

Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali dipandang sebagai daerah yang multikultur dan multibudaya. Bali juga dikenal dengan sebutan *Pulau Dewata* dan *Pulau Seribu Pura*.

Meskipun Bali dikenal sebagai pulau yang dihuni oleh mayoritas Hindu, namun ternyata terdapat pula masyarakat Muslim yang telah berabad lamanya menghuni pulau Bali dan hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu. Sejarah masuknya Islam di Bali ternyata berbeda-beda di setiap Kabupaten dan memiliki keunikan tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk, rekonstruksi penyebaran dan eksistensi Islam di lokasi penelitian, khususnya masa pertumbuhan Islam, identifikasi pertanggalan (jika memang memungkinkan) setiap to-

ponim yang berhasil dipetakan, sehingga dapat digambarkan peta aliran penyebaran Islam di lokasi penelitian, identifikasi data kearifan lokal yang dapat dipetakan dan mengandung data artefaktual, dan mengetahui ragam kearifan lokal di tengah komunitas Muslim di Bali sampai sejauh mana peranan masing-masing komponen, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap pelestariannya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini lebih ditekankan pada pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini lebih mengandalkan kekuatan pengamatan pancaindera untuk merefleksikan fenomena budaya dalam mana sasaran-sasaran penelitian akan dicoba difahami maknanya (*verstehen*). Pendekatan ini dipilih untuk memudahkan pemahaman tentang kenyataan-kenyataan data, mengamati hubungan antar data. Menurut Suwardi Endraswara dikatakan bahwa (2003:16): “Pendekatan kualitatif adalah lebih kepada pertimbangan pancaindera secara akurat untuk melihat kebudayaan yang cenderung berubah-ubah seiring perubahan jaman. Bahwa tradisi kualitatif cenderung peneliti sebagai pengumpul data, mengikuti asumsi kultural, dan mengikuti data, dengan kata lain penelitian kualitatif budaya lebih fleksibel, tidak memberi harga mati, reflektif, dan imajinatif “. Data primer diperoleh melalui dokumentasi foto dan gambar, kemudian data sekunder diperoleh dengan mencari informasi yang bersumber dari buku-buku, tulisan-tulisan, maupun dari para informan dan narasumber.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku yang ditulis oleh Lexy J

<sup>2</sup> Yang menarik dari kota Denpasar yaitu jumlah penganut agama Islam sebagai agama terbanyak kedua setelah agama Hindu. Setiap tahunnya jumlah pemeluk agama Islam di kota Denpasar terus mengalami peningkatan.

Moleong yang berjudul *Metode Kualitatif*, bahwa metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong Lexy J, 2004:14-18). Untuk menjelaskan penelitian ini secara detil dan komprehensif digunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis. Metode deskripsi analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadrawi Nawawi, 1983:63). Penelitian deskriptif ini tidak hanya mendeskripsikan sesuatu atau fenomena yang sedang diteliti, tetapi juga mencari makna apa dibalik hasil dari deskripsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk kegiatan Penelitian keberadaan Kearifan Lokal di tengah Masyarakat Muslim di Bali, ini meliputi:

### 1. Pengumpulan Data

*Pengumpulan Data Kepustakaan.* Strategi dan langkah teknis yang berkaitan dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui kepustakaan, serta sejumlah peta, hingga mendapatkan toponim, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Mendaftar sejumlah toponim / nama tempat/lokasi pemukiman Muslim di Bali.
- b. Mengumpulkan peta-peta administrasi masa sekarang dari berbagai sumber pustaka dan kantor-kantor pemerintah. Strategi awal untuk melakukan pelacakan dan pengumpulan sejumlah

peta dalam rangka toponim, diperoleh melalui: Perpustakaan Nasional, di Jakarta; Arsip Nasional, di Jakarta; Biro Pusat Statistik, di Jakarta; Bakosurtanal di Cibinong, Jawa Barat; dan beberapa kantor instansi di daerah lokasi penelitian, terutama melalui Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Tingkat II.

- c. Usai membandingkan toponim dengan sejumlah sumber sejarah yang lain, kemudian diupayakan melacak ulang melalui sejumlah peta topografi yang berhasil dikumpulkan dan dipilih dari berbagai tahun penerbitan dan instansi penerbit yang berbeda. Seringkali terjadibahwa toponim yang termaktub tidak dapat dikenal, diperkirakan namanya sudah berubah, bertambah, atau berbeda sama sekali;

### *Pengumpulan Data Lapangan*

Langkah-langkah untuk pengumpulan data arkeologi di lapangan, secara berurutan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pencarian dan/atau mengecek kebenaran adanya nama lokasi/toponim melalui nama-nama administrasi dan nama-nama geografi yang telah dihimpun dalam daftar baru. Pencarian ini telah menunjukkan hasilnya, di antaranya didapatkan sejumlah toponim, untuk kemudian dilakukan pendataan sejumlah temuan data kearifan lokal yang terdapat pada toponim;
2. Membuat daftar baru berdasarkan hasil pencarian dari peta topografi dan kandungan data kearifan lokal. Melalui langkah ini dapat membantu dalam rangka sampling yang kemudian dijad-

- ikan daerah sasaran (lokasi) penelitian;
3. Membuat peta situasi dari toponim-toponim yang dikunjungi; peta situasi yang dimaksud lebih memfokuskan pada keletakan data kearifan lokal; Langkah-langkah tersebut telah memungkinkan dilakukan setelah mencoba mengintegrasikan sejumlah peta topografi dan sejumlah informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis.

## 2. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan tahap pengolahan data tekstual dan data artefaktual, baik yang diperoleh melalui kepustakaan maupun dari lapangan dimaksudkan untuk dijadikan bahan utama bagi analisis selanjutnya.

Dalam upaya memahami kesejajaran penyebaran toponim/lokasi-lokasi pemukiman komunitas Muslim di Bali dan penyebaran data artefaktual, akan diupayakan penelitiannya dengan pendekatan arkeologi dan pendekatan sejarah. Melalui kedua pendekatan tersebut, dapat dirinci dan diurut sebagai berikut:

1. Observasi terhadap kepustakaan, survey dan wawancara yang diharapkan akan diperoleh toponim untuk kemudian dimungkinkan dapat dipetakan, dikenal pada topografi/geografimasa kini. Melalui observasi ini akan diperoleh data arkeologi pada toponim yang dimaksud, untuk kemudian akan diidentifikasi isi budaya dan kronologi;
2. Deskripsi dan analisis (formal, spasial, dan temporal), yang diharapkan akan diperoleh isi budaya dan situs sebagai daerah penelitian ; pola-pola sebaran

isi budaya dan situs; serta kronologi situs;

3. Interpretasi/eksplanasi terhadap struktur data arkeologi antar situs; hubungan antar data pada situs dan antar situs. Pada tingkatan interpretasi ini akan diupayakan rekonstruksi alur penyebaran Islam di Bali.

Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan dengan beberapa tingkat penelitian tersebut secara operasional akan diupayakan melalui beberapa tahapan penelitiannya, yakni:

1. Pra-analisis, akan dimanfaatkan sebagai tahap membandingkan sumber tertulis – dengan sasaran utama Babad Tanah Jawi edisi W.L.Olthof dengan sumber-sumber tertulis lainnya;
2. Analisis:
  - a) Ruang: tempat di mana sesuatu peristiwa/ aktivitas / peran penyebaran Islam dilakukan;
  - b) Waktu: bentang/dimensi temporal fase-fase penyebaran Islam dilakukan;
  - c) Budaya: aspek-aspek isi budaya yang memberi ciri khusus/ umum pada lokasi penelitian pada awal penyebaran Islam;

Adapun sasaran analisis budaya, adalah kepada data artefaktual, yang dicoba menganalisisnya secara khusus. Manfaat dari analisis khusus adalah dalam upaya merekam, mengenali dan memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk kearifan lokal di tengah masyarakat Muslim di Bali.

Selain itu, analisis data dipergunakan dengan melalui pendekatan deskripsi analisis, yaitu mendeskripsikan hasil peneli-

tian ke dalam kehidupan masa sekarang, kaitannya dengan eksistensi kearifan lokal yang hampir punah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Islam di Bali

Sejarah awal masuknya Islam di Bali paling tidak ada dua teori yang umum digunakan oleh para penulis sejarah Islam di Bali. Teori pertama, Islam datang ke Gelgel pada abad ke-14 masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir, raja Geger pertama. Ada 40 orang pengiring raja Ketut Ngelesir yang mengiringi perjalanannya sehabis kunjungan ke Majapahit, ke 40 orang itu beragama Islam. 40 orang pengiring raja itu kemudian tinggal di Gelgel dan mereka hidup menjadi abdi dalem pemerintah, kemudian diberikan tempat di Gelgel, di sana dibangunlah masjid, kuburan, dan perkampungan.<sup>3</sup>

Teori kedua, Islam datang pada saat keruntuhan Majapahit pada abad ke-16, saat itu rajanya adalah Ida Dalem Waturenggong. Ada tiga orang utusan dari kerajaan Demak datang ke Gelgel, mereka adalah Ki Moder, Ki Jalil dan Dewi Fatimah. Ketiga orang itu menghadap Ida Dalem Waturenggong untuk mengislamkannya, namun Ida Dalem Waturenggong mengajukan suatu persyaratan kepada mereka, yaitu memerintahkan mereka untuk mencukur bulu kakinya, jika berhasil maka dia akan masuk Islam. Ki Moder yang membawa pisau cukur ternyata gagal mencukur bulu kaki Ida Dalem Waturenggong, pisau yang dibawanya malah men-

jadi tumpul. Ida Dalem pun urung masuk Islam, ketiga utusan Demak itu kembalike Jawa, tapi saat diperjalanan Ki Moder dan Dewi Fatimah meninggal kemudian dimakamkan di kuburan di Subak Jarat Desa Klungkung.

Ki Jalil yang masih hidup tetap meneruskan perjalanannya menuju Jawa, namun pada suatu ketika terjadi kekacauan yang disebabkan oleh seekor banteng yang mengamuk, banteng yang mengamuk ini merusak lahan perkampungan yang baru dibuka oleh tujuh orang utusan Ida Dalem Waturenggong letaknya di wilayah Timur Bali. Tujuh orang itu tidak bias mengendalikan banteng itu, lantas mereka menyampaikan berita itu kepada Ida Dalem Waturenggong yang ada di Gelgel. Ida Dalem memohon pertolongan kepada Ki Jalil untuk menaklukan banteng tersebut, dan Ki Jalil pun menerima permohonannya. Diceritakan bahwa Ki Jalil berhasil menaklukan banteng itu hanya dengan menatapnya sambil menghunuskan sebilah keris di depan muka si banteng. Banteng itu kemudian disembelih, dagingnya dibagikan kepada penduduk sekitar, kulitnya dijadikan bedug, dan alas lumbung padi berkaki enam. Setelah itu Ki Jalil beserta rakyat Dalem Waturenggong tinggal di daerah tersebut, tidak berapa lama Ki Jalil mendatangkan 15 orang Islam dari Jawa untuk menetap di daerah itu, sekarang desa itu dikenal dengan Banjar Saren Jawa, desa Budakeling Karengasem.<sup>4</sup>

Melalui pendekatan sosio-ekonomi terdapat tiga fase masuknya Islam ke Bali. Pertama kontak awal, sebagai konsekuensi

3 M. Sarlan., ed, *Islam di Bali Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali* (Bali: Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama, 1998), h. 13.

4 Ida Bagus Rai Putra., ed, *Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian* (Klungkung: Puri Klungkung, 2015), h. 85.

si logis jaringan niaga Nusantara, dimulai dengan hubungan klasik Jawa-Bali, mengikuti jalan indianisasi tetapi diganti dengan jalan Islamisasi pada awal abad XVI yang digerakan Demak dan kemudian, setelah naiknya Gowa dan Tallo sebagai sebuah pelabuhan penting di lautan utara, Bali telah masuk ke dalam mata rantai jaringan Maritim Makassar dan Bugis pada awal abad XVII. Fase kedua adalah tumbuhnya koloni-koloni pedagang Bugis dipesisir Utara dan Selatan Bali, lantas terjalin hubungan antara Hindu Bali dan orang-orang Islam Bugis. Fase ketiga berkembangnya organisasi masyarakat. Seakan mengikuti *settlement pattern* yang tipikal Sulawesi selatan, di pesisir-pesisir terbentuk kelompok-kelompok sosial di bawah institusi *Puak Matoa*, kepala-kepala tradisional komunitas Bugis, yang memimpin kelompok-kelompok pedagang yang datang secara bergelombang. Kendati begitu, koloni-koloni Bugis tetap memelihara otonominya dalam dimensi agama, politik ekonomi dan budaya, terlepas dari sistem-sistem religi, tradisi politik administrasi dan organisasi sosial Bali. Hal itulah yang menyebabkan tidak ditemukannya Islam dalam bentuk kerajaan atau negara seperti di tempat lain.<sup>5</sup>

Orang-orang Bugis Makasar yang berjasa dalam penyebaran Islam di Bali tepatnya di Jembrana, pada masa Anak Agung Ngurah Jembrana (I Gusti Agung Alit Takmung) diantaranya Daeng Marema dan Daeng Si Kuda empat, mereka berdua adalah ahli beladiri silat yang mengajarkan silat di Jembrana. Kedua tokoh itu menarik

penduduk Hindu sekita runtuk belajar silat dan lama-kelamaan sebagaimana dari mereka masuk Islam. Selain itu ada juga beberapa mubaligh yang mendarat di pantai Airkuning, yaitu Haji Shihabuddin, Haji Yasin, Tuan Lebai, dan Datuk Guru Syekh, mereka datang saat pembangunan Puri Negara tahun 1789 ketika itu banyak warga yang terkena penyakit dan para mubaligh itu menolong mereka.

Pada masa yang sama datang pula pasukan eskadron dari Pontianak yang dipimpin oleh Syarif Abdurrahman Al Qodery, dia beserta pasukannya tinggal di Jembrana atas izin raja. Syarif Abdurrahman Al Qodery dengan pasukannya ikut berpartisipasi dengan pembangunan Jembrana, sejak saat itu hubungan dengan raja Jembrana terjalin Harmonis, lama-kelamaan berdirilah pemukiman Islam. di samping itu ada juga tokoh-tokoh lain sebagai pemuka Islam yang membantu Syarif Abdurrahman Al Qodery, yaitu, Mahbubah, dan Chotib Abdullah Hamid.

Tidak hanya orang Jawa, Bugis Makassar yang datang ke Bali untuk menyebarkan Islam, ada juga orang-orang Lombok. Ada seorang tokoh bernama Pedanda Sakti Bau Rawuhyang di Lombok dikenal dengan Pangeran Sangupati yang menyebarkan Islam di Karangasem setelah runtuhnya Majapahit. Ada juga beberapa nama lainnya, diantaranya Sayid Hasan Alldru, Sayid Syech Almulakhela mereja berdua identitasnya tidak diketahui pasti. Selain itu ada, Abdullah Bin Salim Bagarib berasal dari Tarim Yaman diperkirakan datang pada tahun 1859, Fiddahussin Djiwakhandji dari Udjein India Tengah pada 1916, Djihadjirasulji dari Rajastan India Utara datang tahun 1918, Ali Husein Rasul

<sup>5</sup> Moh Ali Fadillah, *Warisan Budaya Bugis Pesisir Selatan Denpasar* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), h. 79.

pada 1920, dan Fiddhusein HasanBay pada tahun 1930.<sup>6</sup>

### Konsep dan Filosofi

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan HassanSyadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan.

Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.<sup>7</sup> Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.<sup>8</sup> Kearifan (*wisdom*) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi.

Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan

produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetap nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.<sup>9</sup> Mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga, Menurut Prof. Nyoman Sirtha, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.<sup>10</sup>

### Filosofi Agama dan Budaya

Dalam aspek kepercayaan masyarakat Bali, Islam menjadi agama kedua yang paling banyak dianut ada sekitar 520.244 jiwa penganut Islam di Bali yang tersebar di Klungkung, Karangasem, Buleleng, Badung dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Hal itu bukan merupakan sesuatu yang mengherankan, karena secara historis Islam sudah masuk ke Bali setelah Majapahit runtuh pada abad ke-15 melalui daerah Klungkung.<sup>12</sup> Sebagai sebuah agama, Islam mempunyai ajaran yang bersifat universal, umat Islam meya-

6 M. Sarlan., ed, *Islam di Bali Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali*, h. 27.

7 Gobyah, I. Ketut (2003) "Berpijak Pada Kearifan lokal", [www.balipos.co.id](http://www.balipos.co.id).

8 Ridwan, N. A. (2007) "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 27-38, P3M STAIN, Purwokerto.

9 I Ketut Gobyah dalam "Berpijak pada Kearifan Lokal" dalam <http://www.balipos.co.id>, didownload 17/9/2017.

10 S. Swarsi Geriya dalam "Menggalai Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali" dalam Iun, <http://www.balipos.co.id>

11 <https://www.scribd.com/document/323802735/Provinsi-Bali-Dalam-Angka-2016>. Diakses: Rabu, 13 September 2017.

12 M. Sarlan MPA., ed, *Islam Di Bali Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali* (Bali: Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama Kabupaten Daerah Tingkat II, 1998), h. 3.

kini bahwa Tuhan telah mengutus Muhammad saw sebagai seorang nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan ajaran-Nya kepada umat manusia yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa melahirkan tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari dan menuju Tuhan, maka Tuhan adalah "*sangkan paran*" (asal dan tujuan) hidup (*hurip*), bahkan seluruh makhluk.<sup>13</sup> Maka barang siapa yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dia akan selamat di dunia dan akhirat. Dari sanalah Islam mempunyai sistem yang mengatur kehidupan manusia dengan Tuhan (*Hablumminallah*) manusia dengan manusia baik secara individu dan secara kolektif (*hablumminannas*).

Kehidupan kolektif atau kemasyarakatan dalam Islam tidak mengenal sistem kasta atau bersifat egaliter dan mementingkan keadilan antar sesama manusia demi terciptanya masyarakat yang harmonis. Keharmonisan hidup dalam Islam berasal dari iman yang benar, sikap pasrah yang tulus (*al-islam*), *ridha* dan tawakkal kepada Allah serta ingat (*dzikir*) kepada-Nya akan melahirkan konsekuensi tingkah laku yang mewujudkan dalam kerangka kehidupan sosial yang disebut dengan amal saleh. Amal saleh ialah setiap tingkah laku pribadi yang menunjang usaha mewujudkan tatanan hidup sosial yang teratur dan bermuara pada usaha pembentukan peradaban dengan tiang penyangga terdiri dari pribadi-pribadi yang disemangati tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah. Jadi antara *hablumminallah* dan *hablumminannas* adalah satu kesatuan yang utuh yang ti-

dak bisa dipisahkan.<sup>14</sup> Secara peribadatan formal, tindakan yang berdimensi sosial adalah zakat, zakat adalah semacam pajak pribadi, dan juga mempunyai arti simbolis sebagai pernyataan niat suci kepada sesama manusia melalui kesucian pola kehidupan pribadi, khususnya berkenaan dengan harta benda yang memang sering menjadi sumber kekotoran jiwa. Dengan melakukan zakat terkandung isyarat tekad untuk menjalani kehidupan material yang bersih, dengan melakukan apa yang boleh dilakukan dan tidak melakukan apa yang dilarang. Harta yang boleh dizakatkan adalah harta yang didapatkan dengan cara yang benar (*halal*).<sup>15</sup>

Agama Hindu Bali memiliki tiga kerangka dasar keagamaan, yaitu *tattwa* (filsafat keagamaan), *susila* (moral keagamaan), dan *upacara* (upacara keagamaan), kepercayaan Hindu memiliki lima keyakinan pokok yang disebut dengan *Panca Sradha*, diantaranya:

1. Percaya akan adanya satu Tuhan, Ida Sang Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk konsep Tri Sakti, Brahma yang menciptakan, Wisnu yang memelihara, dan Siwa Ludra yang melebur segala yang ada.
2. Percaya terhadap adanya konsep *atman* (roh abadi).
3. Percaya tentang *punarbhawa* (kelahiran kembali dari jiwa).
4. Percaya terhadap hukum *karma phala* (adanya buah dari setiap perbuatan).
5. Percaya akan adanya *moksa* (kebebasan jiwa dari lingkaran kelahiran kembali).

<sup>14</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, h. 363.

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, h. 268.

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1998), h. 1.

Lima kepercayaan pokok Hindu Bali bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dikatakan oleh Ida Bagus Rai Putra;

*Idealisme untuk menuliskan manusia Bali yang aneka dalam keanekaan dilandasi filosofi bhineka tunggal ika, berbeda sesungguhnya satu adanya. Kebhinekaan adalah keniscayaan sejarah, demikian juga keesaan hakikatnya kebenaran yang harus dirujuk untuk persatuan dan kesatuan yang diniscayakan dalam kitab suci Weda.*<sup>16</sup>

Kepercayaan Hindu amat besar pengaruhnya terhadap masyarakat Bali, salah satu wujud dari pengaruh ini tampak dari konsepsi dan aktivitas upacara yang muncul dalam intensitas yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Bali. Keseluruhan upacara dapat digolongkan kedalam lima macam atau yang disebut dengan *Panca Yadnya*, yaitu:

1. *Manusia Yadnya*, meliputi upacara daur hidup dari masa kanak-kanak sampai dewasa.
2. *Pitra Yadnya*, upacara yang ditujukan kepada roh leluhur, meliputi upacara kematian sampai kepada upacara penyucian roh leluhur.
3. *Dewa Yadnya*, upacara pada Pura maupun Pura keluarga, yang ditujukan kepada para dewa sebagai manifestasi Sang Hyang Widhi.
4. *Rsi Yadnya*, upacara yang berhubungan dengan orang-orang suci berjasa dalam pembinaan agama Hindu.
5. *Bhuta Yadnya*, upacara yang ditujukan kepada *bhuta kala* yaitu roh-roh di sekitar manusia yang dapat mengganggu.

<sup>16</sup> Ida Bagus Rai Putra., ed, *Pada Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian* (Klungkung: Puri Agung Klungkung, 2015), h. XV.

Pengembangan keagamaan Hindu Bali dimulai pada zaman Gelgel dan mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Ida Dalem Waturenggong (1460-1550 M). Raja Ida Dalem Waturenggong mengangkat Dang Hyang Nirartha sebagai pendeta istana pada 1489M. Dang Hyang Nirartha berasal dari Majapahit, kemudian pindah ke Pasuruan saat Majapahit runtuh dan pindah lagi ke Blambangan, setelah lama tinggal di Blambangan dialalu pindah ke Bali lewat pantai Purancak Jembrana, pada tahun *Saka Eka Tunggal CaturBhumi*, yaitu pada 1411 Saka atau 1489 Masehi. Dang Hyang Nirartha mengajarkan dan mengembangkan konsep keesaan Tuhan (*Siwasidhanta*) yang dinamakan dengan konsepsi *Tri Purusa*. *Tri Purusa* adalah konsepsi pemujaan kepada kepada tiga aspek perwujudan Siwa, yaitu pemujaan Parama Ciwa, Sada Ciwa, dan Ciwa. Parama Ciwa adalah Nirguna Brahmandi dalam konsepsi *Tri Pusara* identik dengan Sang Hyang Widhi, yaitu Tuhan yang Maha Esa.<sup>17</sup>

*Tri Purusa* dibuatkan *pelinggih*<sup>18</sup> berbentuk *padmasana*<sup>19</sup> dan *padmasana* ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai bentuk Padma, seperti Padma Tiga, Padma Sari, Padma kurung, dan lain-lain. Secara filosofis pembuatan *pelinggih* berbentuk *padmasana* itu dilandasi oleh falsafah kosmis, yaitu hubungan makrokosmos dengan mikrokosmos. Hyang Widhi berada di mana-mana, Dia adalah *wyapa wyapka nirwikara* yang bersifat imanen dan transedental, meresapi dan meliputi alam semesta,

<sup>17</sup> Ida Bagus Rai Putra., ed, *Pada Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian*, h. xx.

<sup>18</sup> Pelinggih adalah tempat pemujaan sebagai perwujudan yang dipuja atau diupacarai.

<sup>19</sup> Pada masanya adalah sebuah tempat untuk bersembahyang dan menaruh sajian bagian umat Hinduterutama di Indonesia.

tapi dia tidak terpenguhi oleh alam semesta. Dengan demikian *padmasana* itu adalah lambang alam semesta *Linggih Sang Hyang Widhi* yang sebenarnya, maka dari itu manusialah yang melambangkan *Linggih* tersebut agar pemeluk Hindu mudah merasa dengan Sang Hyang Widhi.<sup>20</sup>

Pada sistem kepercayaan Hindu Bali ada suatu keunikan tersendiri, mereka meyakini bahwa mereka tidak menyembah patung seperti yang dituduhkan banyak orang, mereka hanya percaya terhadap spritualitas di balik patung tersebut bukan kepada patungnya.<sup>21</sup> Ada tiga tingkatan filosofis manusia yang dipercayai masyarakat Hindu Bali, yaitu *Bakti Marga*, *Karma Marga* dan *Jenana Marga*. Apabila seorang manusia sudah mencapai tahap *Jenana Marga* maka tidak lagi diperlukan perantara saat berhubungan dengan Tuhan, dia tidak lagi membawakan sesajen atau sesembahan, mungkin ada kemiripan dengan konsep makrifat atau hakikat di Islam, dimana level *Bakti Marga* dan *Karma Marga* adalah level syariatnya.<sup>22</sup>

Pemberian sesajen dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali yang belum mencapai tingkatan *Jenana Marga* sebagai bentuk bakti kepada Tuhan, mereka hanya akan memberikan sesajen dari apa yang mereka tanam atau buat. Misalkan, mereka akan memberikan sesajen berupa buah apel karena memang mereka menanam pohon apel di kebunnya atau mereka identik dengan penggunaan bunga saat beribadah

itu pun karena mereka menanam bunga tersebut. Bagi mereka sesajen lebih dari sebuah persembahan melainkan sebagai sebuah bentuk harmonisasi dengan alam sekitar. Contoh lainnya setiap 210 hari sekali ada peringatan hari *Tupek Ube*, hari di mana pohon-pohon di balut dengan kain dan diberi sesajen, tujuannya adalah bukan untuk menyembah pohonnya tetapi bentuk permohonan kepada Tuhan agar pohon-pohon itu tidak terkena penyakit dan buahnya bagus. Selain itu ada juga hari *Tupek Kadang* sama dengan *Tupek Ube* diperingati setiap 210 hari, tapi diperuntukan untuk hewan agar hewan yang dipelihara sehat dan saat dikonsumsi tidak membawa penyakit.<sup>23</sup>

Beberapa segi peribadatan antara Hindu dengan Islam memiliki kemiripan esoteris yang pada dasarnya sama-sama ingin mewujudkan kehidupan yang harmonis antara Sang Pencipta dengan makhluknya, terlebih masyarakat Hindu Bali yang sudah lama tinggal berdampingan dengan Islam. Hubungan antara *Nyame Hindu* (saudara Hindu) dengan *Nyame Selam* (saudara Islam) terjadi sangat intens yang akibatnya saling menerima nilai-nilai diantara mereka dan Bali bukan hanya sebuah teritorial melainkan entitas yang memiliki kebudayaan besar di dalamnya. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai tiga wujud, (1) wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2) wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat,

20 Ida Bagus Rai Putra., ed, *Pada Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian*, h. xxv.

21 Wawancara dengan I Nyoman Sunarya, Ahli (Ahli Baca Prasasti) yang sekarang bekerja di Balai Arkeologi, Denpasar, Bali. (Selasa, 5 September 2017).

22 Wawancara dengan I Wayan Suarka (Pembimbing/Pemandu Wisata di Anjungan Bali TMII Jakarta) (pada: Selasa, 8 Agustus 2017).

23 Wawancara dengan I Wayan Suarka (Pembimbing/Pemandu Wisata di Anjungan Bali TMII Jakarta) (pada: Selasa, 8 Agustus 2017).

dan (3) wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya.<sup>24</sup>

Ida Bagus Mantra berpendapat bahwa Bali memiliki tradisi besar, yakni aksara, bahasa, sastra, kesenian dan kebudayaan dalam arti luas. Arsitektur Bali misalnya, di samping menyimpan nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga pesan moralitas dan estetika. Institusi sosial seperti subak, banjar, dan desa pakraman serta sekaa-sekaa fungsional secara terstruktur dan sistematis menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan keterbukaan. Atinya, institusi sosial tradisional Bali dapat menjadi agen pembangunan dan perubahan dalam rangka mewujudkan Bali yang damai, harmonis, dan sejahtera.<sup>25</sup>

### Konsep dan Filosofi Kearifan Lokal dan Toleransi

Penduduk Bali dalam sistem kemasyarakatannya mengenal istilah *menyama-braya* yang artinya adalah ikatan persaudaran sebagai jalan untuk menggapai kebahagiaan dan keharmonisan hidup (*dharma santhi*), di dalamnya ada istilah *nyama selam* (saudara Islam), *nyama Hindu* (saudara Hindu), *nyama Kristen* (saudara Kristen) dan lain-lain.<sup>26</sup> Berdasarkan pada konsep *Tri Hita Karana* yang berbunyi “*belahan pane, belahan payuk celebingkahbatan biu gumi linggah ajak liu ada*

*kene ada keto*” (ada banyak perbedaan tetapi kita harus dapat menerimanya).<sup>27</sup> Konsep *Tri Hita Karana* ini diimplementasikan melalui *Parahyangan* meliputi berbagai aktivitas religius masyarakat Bali dalam mewujudkan baktinya kepada Tuhan, dan aktivitas ini dinyatakan melalui *nyadnya* (berkorban dengan ikhlas).

Di samping itu ada juga *pawongan*, yaitu menjalin keharmonisan antar sesama dalam ikatan sosial, yang penerapannya melalui konsep “*segilik seguluk selulung sebayantaka, paras paros sarpanaya*” (berat sama dipikul, dan ringan sama dijinjing serta dilakukan tanpa pamrih), atau “*vasudaiva kutumbhakam*” (kita semua satu keluarga). *Palemahan*, menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya dengan keyakinan “*ulu*” (atas), dan “*teben*” (bawah) untuk aktivitas non ritual, dengan konsep ini orang Bali ingin menata ruang masyarakat yang harmonis.<sup>28</sup>

Dalam memahami *menyama braya* masyarakat Bali juga mengumpamakannya sebagai sebatang pohon, akar pohon diibaratkan sebagai *tat twam asi* (aku adalah kamu: manusia padahakikatnya adalah satu), batangnya adalah *vasudewam khutumbhakam* (kita semua adalah keluarga), *menyama braya* adalah cabangnya, dan daun, bunga serta buahnya adalah kerukunan. Konsep *menyama braya* ini memberikan penjelasan bahwa masyarakat Bali yang plural bila saling menghargai, saling memahami, saling mengasihi, dan

24 Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 5.

25 I Wayan Sukarma, *Ide-ide Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Tentang Tradisi Bali* (Denpasar: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2014), h. 3.

26 I Gede Parimartha., dkk, *Bulan Sabit Di Pulau Dewata Jejak Kampung Islam Bali-Kusamba* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Center for Religius and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2012), h. 75.

27 I Made Pagh., dkk, *Analisis Faktor Integratif Nyama Bali-Nyama Selam, Untuk Menyusun Buku Panduan Kerukunan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2013), h.241.

28 *Fenomena-fenomena Perubahan Menyama Braya Dalam Masyarakat Bali yang Multikultural* (Yogyakarta, Universitas Kristen Satya Wacana,), h. 220.

saling menolong pastilah akan menumbuhkan dan membuahakan integrasi antar masyarakat.<sup>29</sup> Dengan demikian orang Bali memiliki kearifan sosial untuk menerima maupun bertoleransi terhadap perbedaan, mereka tidak menyeragamkan agama melainkan berlandaskan pada pembenaran akan adanya perbedaan.<sup>30</sup>

Konsep *menyama braya* yang telah wariskan secara turun temurun sejak zaman raja-raja Hindu menjadi dasar dari toleransi yang terjalin antara *nyame Hindu* dan *nyame selam*.

Pratik toleransi salah satunya dicontohkan oleh Raja Ida Dalem Waturenggong saat datangnya Ki Moder, Ki Jalil dan Dewi Fatimah sebagai utusan dari Demak untuk mengislamkan Bali.

Diceritakan bahwa utusan dari Demak tidak berhasil mengislamkan Ida Dalem Waturenggong karena tidak bisa mencukur bulu kakinya, pisau cukur yang dibawa Ki Moder menjadi tumpul dan susut. Meskipun para utusan Demak gagal mengislamkan Ida Dalem Waturenggong hubungan diantara mereka tetap terjalin harmonis. Karena misi mengislamkan Ida Dalem Waturenggong gagal mereka kembali pulang ke Jawa, tapi saat dalam perjalanan Ki Moder dan Dewi Fatimah meninggal di desa Satra Klungkung dan dikuburkan di Kuburan atau *Sema Jarat* yang sekarang disebut Subak Jarat, sedangkan Ki Jalil pergi ke Bukit Kemutung.

Di lain waktu Ida Dalem Waturenggong mengutus tujuh orang rakyatnya untuk mengembara ke wilayah Timur Bali guna

29 *Fenomena-fenomena Perubahan Menyama Braya Dalam Masyarakat Bali yang Multikultural*, h.222.

30 I Made Pageh., dkk, *Analisis Faktor Integratif Nyama Bali-Nyama Selam, Untuk Menyusun Buku Panduan Kerukunan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*, h. 242.

membuka lahan dan perkampungan baru. Pada proses pembukaan lahan itu, ke tujuh orang itu menghadapi kesulitan karena ada seekor banteng yang mengamuk dan merusak lahan yang baru dibuka. Mereka tidak bisa mengatasi banteng itu sampai mereka harus melaporkan kejadian itu kepada Ida Dalem di Gelgel. Ida Dalem Waturenggong kemudian meminta pertolongan kepada Ki Jalil untuk membantu ketujuh orang tersebut, Ki Jalil pun bersedia membantu mereka dan dikisahkan bahwa Ki Jalil hanya memandang banteng itu sembari mengangguk-angguk pusaka kerisnya, banteng itu pun tumbang seketika. Banteng itu kemudian disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada penduduk sekitar dan kulitnya dibuat untuk bedug dan sebagian lagi digunakan sebagai alas lumbung padi bertiang enam. Setelah itu Ki Jalil dan rakyat Dalem Waturenggong berdiam di daerah tersebut. Daerah itu sekarang dikenal dengan nama Saren Jawa, Ki Jalil juga mendatangkan lima belas orang Islam dari Jawa untuk menetap di sana. Dari sanalah mulai terjadi pembauran antara umat Hindu dan Islam dan umat Islam beranak-pinak, Ki Jalil pun dimakamkan di Banjar Saren Jawa, desa Budakeling, Karangasem.<sup>31</sup>

Dalam sumber yang lain disampaikan bahwa setelah Majapahit jatuh para

bangsawannya pergi ke Bali dengan membawa 40 orang Islam sebagai pasukan pengawal.

Diantaranya ada yang namanya Dewi Fatimah, kemudian diberikan tempat di Gelgel, di sanadibangunlah masjid, kuburan, dan perkampungan, itu semua terjadi pada generasi pertama Islam masuk ke Bali.

31 Ida Bagus Rai Putra., ed, *Pada Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian*, h. 85.

Pada generasi kedua, saat kerajaan Karang Asem menguasai Lombok, orang-orang Lombok juga dibawa untuk menjaga Puri Karang Asem, orang-orang itu kebanyakan adalah orang Sasak yang beragama Islam. Kemudian umat Islam Lombok mengelilingi puri sebagai abdi dalem, sehingga di Karang Asem sampai sekarang ini ada Masjid, mushola yang tanahnya diberikan pada zaman kerajaan.<sup>32</sup> Pada tahun 1651 terjadi perpindahan ibu kota dari Gelgel ke kampung Lebah, sebagian umat Islam ikut berpindah dan ikut dalam pembentukan keraton yang bernama keraton Singaraja.<sup>33</sup>

### Unsur-unsur Pembentuk Kearifan Lokal dan Toleransi

Unsur-unsur pembentuk kearifan lokal dan toleransi, diantaranya adalah agama, budaya dan geografis. Agama menjadi faktor utama kearifan lokal dan toleransi. Sejak zaman pra Hindu atau zaman megalitikum masyarakat Bali sudah hidup ber peradaban, orang Bali Mula mempercayai roh leluhur yang telah mati akan melindungi mereka, mereka menyebut roh leluhur dengan nama *Hyang*.<sup>34</sup>

Kepercayaan atau agama yang berkembang di Bali sejak zaman megalitikum saat penduduk Bali masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme, sampai mereka menjadi penganut Hindu dan sebagian kecilnya menganut Islam pada dasarnya telah memainkan peran penting dalam pembentukan kearifan lokal dan tol-

eransi masyarakat Bali.

Akan tetapi tidak hanya kepercayaan atau agama yang berperan penting dalam membentuk kearifan lokal dan toleransi di Bali, ada juga faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali. Meskipun begitu budaya dan agama di Bali tidak bisa dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya Bali yang sekarang ini eksis adalah hasil proses yang lama melalui pembauran dari berbagai bangsa yang datang ke daerah ini, diantaranya India, Jawa, Lombok dan Bugis Makasar.

Orang Bali Mula atau Bali Asli merupakan rumpun bangsa Austronesia yang datang pada zaman Batu Baru (Neolithicum) yang diperkirakan datang dari Indo-China Utara, hal tersebut didasarkan pada kesamaan benda-benda serta corak budaya dengan peninggalan di Bali dari zaman yang sama. Pada tahun 300 sebelum Masehi orang-orang India dari Dinasti Maurya datang ke Bali (Bali Dwipa) untuk melakukan perdagangan dan terjadilah pertukaran barang dan pengetahuan dengan para Brahmana dari India. Bangsa Cina yang terkenal sebagai bangsa pedagang yang ulung dalam berlayar juga sempat datang ke Bali.

Selain kedua bangsa besar yaitu India dan Cina, Jawa juga datang ke Bali dengan misi menyebarkan agama Hindu. Rsi Markandya seorang penyiar agama Hindu yang berasal dari India namun sudah lama menetap di Jawa tepatnya di Gunung Dieng dan Gunung Raung datang ke Bali diperkirakan pada abad ke-8. Rsi Markandya menyebarkan agama Hindu dari Sekte Waisnawa kepada penduduk Bali yang dianggapnya masih kosong dari segi spir-

32 Wawancara dengan Taufiq Ashadi (Ketua MUI Bali), Senin, 5 September 2017.

33 Wawancara dengan Ramadhan (Pengurus Masjid Al-Hikmah, Kampung Lebah, Klungkung), Rabu, 6 September 2017.

34 Ida Bagus Rai Putra., ed, *Pada Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian*, h. 1.

itual atau masih menganut animisme dan dinamisme. Para Mpu datang silih berganti dari Jawa, seperti Mpu Kuturan, Mpu Semeru, Mpu Gana, dan Mpu Jaya, hampir semua Mpu yang datang ke Bali adalah guru spiritual yang membawa ajaran Hindu dari berbagai aliran atau sekte dengan cara upacara yang berbeda. Kemudian Mpu Kuturan melakukan penyatuan semua aliran atau sekte menjadi agama Hindu Trimurti (Brahma, Wisnu, dan Siwa), mengatur tata agama, dan adat istiadat di Bali yang diwarisi hingga kini.<sup>35</sup>

Raja-raja di Bali pun sudah menjalin hubungan dengan raja-raja sebelum Majapahit, raja Bali Sri Dharma Udayana Warmadewa bahkan menikahi keturunan dari Mpu Sindok rajapertama Kerajaan Medang, yaitu Sri Dyah Gunaprya Dharmapatni yang merupakan anak Makuta Wangsa. Raja Sri Dharma Udayana Warmadewa juga menikahkan anaknya Airlangga dengan putri Dharmawangsa yaitu Diah Killi Suci yang juga masih merupakan anak dari Mpu Sindok. Keturunan Airlangga kemudian banyak yang tinggal di Bali, diceritakan bahwa semua Arya (keturunan Airlangga) datang ke Bali bersama Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian datang ke Bali atas perintah raja Majapahit.

Pada abad ke-15 saat Islam datang dari Demak dengan misi mengislamkan Bali meskipun gagal mengislamkan Raja Ida Dalem Waturenggong, karena kearifan Sang raja mengizinkan orang-orang Islam tinggal di Bali dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Islam kemudian berkembang, perkawinan terjadi diantara mereka, pertukaran ilmu pengetahuan pun terjadi.

<sup>35</sup> Ida Bagus Rai Putra., ed, *Pada Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian*, h. 5.

Selain dari Jawa Islam juga datang dari Lombok dan Bugis Makasar mereka telah berada di Denpasar sejak pertengahan abad ke XVII.<sup>36</sup> Persentuhan bangsa-bangsa lain dengan penduduk asli Bali melahirkan asimilasi dan akulturasi budaya, baik berupa gagasan atau ide, perilaku, dan benda atau bangunan, hal inilah yang menjadi unsur dari kearifan lokal dan toleransi di Bali.

Bali secara geografis memiliki bentangan pegunungan dari Barat ke Timur yang terletak di tengah pulau tersebut dan hamparan pantai membentang mengelilinginya. Pada umumnya Bali beriklim tropis sehingga cukup baik untuk ditanami berbagai jenis tanaman.

Ada empat batas yang masing-masing telah membatasi provinsi Bali di sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Di sebelah timur, ada Selat Lombok, di sebelah barat Bali, terdapat Selat Bali, selat yang berada di antara Pulau Bali dan Jawa. Selat ini menjadi tempat penyeberangan transportasi nonudara dari Pulau Jawa ke Bali dan sebaliknya. Di sebelah utara Bali, ada Laut Bali, dan di sebelah selatan, ada Samudera Indonesia.<sup>37</sup>

Di wilayah pegunungan penduduk Bali umumnya hidup dengan bercocok tanam, kehidupan bercocok tanam ini sudah dilakukan sejak masa Neolitikum. Penduduk yang berada disekitar pesisir, bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang dari sinilah mereka menjalin kontak dengan bangsa-bangsa lain. Dua kebudayaan Bali yang agraris dan maritim ini

<sup>36</sup> Moh. Ali Fadillah, *Warisan Budaya Bugis Di Pesisir Denpasar* (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1999), h. 83.

<sup>37</sup> <http://www.baliprov.go.id/Geographi> (Diakses hari Selasa, 29 Agustus 2017).

bercampur baur menciptakan kehidupan harmonis, kekayaan alam Bali pun sanggup menunjang kehidupan masyarakat Bali.

### Ragam Kearifan Lokal (Simbol-simbol Adat, dan Islam)

Setiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan dan tradisi tertentu sesuai dengan ciri khas masyarakat setempat, kebudayaan tersebut merupakan hasil dari karya, karsa, dan rasa. Dari sinilah sebuah kaum menghasilkan perangkat-perangkat kehidupan untuk memudahkan mereka mengatasi dan menguasai alam semesta serta mengatur kehidupan dengan menyusun norma, etika, dan hukum yang menjadi acuan ketertiban.

Komunitas Muslim yang sudah berakar sejak lama, di beberapa wilayah di Bali, seperti di Klungkung, Buleleng, Nusa Penida, Jembrana, Tabanan, Karangasem, Gianyar, Bangli, Badung-Denpasar, dan lain-lain. Mereka tak hanya menjadi komunitas eksklusif, tetapi juga berinteraksi dan bergaul secara sosial dengan masyarakat Hindu di sekitarnya.<sup>38</sup>

Kondisi ini kemudian melahirkan kegiatan dalam wujud ‘upacara tradisional’.

Upacara tradisional komunitas Muslim Nusantara itu meliputi keseluruhan siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, berumah tangga, hingga meninggal dunia. Semua itu diatur sedemikian rupa untuk dipertemukan dengan tradisi dan/atau adat yang telah disepakati sejak zaman nenek moyang masyarakat setempat dan diwariskan secara turun temurun hing-

ga sekarang.<sup>39</sup>

Dalam pelaksanaan upacara tradisional, antara lain dilakukan “selamatan” dan/atau ‘selamatan’. Kata *Selamatan* secara bahasa adalah dari bahasa Arab yang berarti selamat.

Sedangkan Kata *Selamatan* secara istilah adalah Upacara Ritual Doa bersama yang diawali Serangkaian kalimat-*kalimat Thoyyibah atau Tahlil, Tahlil* ( لَيْلٍ نَّت ) adalah serangkaian bacaan-bacaan, antara lain: kalimat Thoyyibah yang diawali “Ilaa hadlroti Nabi muhammad, lalu Ulama, Mukminiin mukminat para Leluhur, atau Arwah Pendahulu”. Kemudian dilanjutkan pembacaan surah al-Fatihah, surah al-Ikhlas (x3), surah Al-Falaq, surah An-Nas surah al-Fatihah, pembacaan awal surah Al-Baqoroh, pembacaan ayat al-Kursi, bacaan-bacaan dzikir (Istighfar, Tasbihtahmid, takbir, sholawat), dan diakhiri Do’a. “Selamatan” biasanya dipimpin oleh seorang ulama’ (Kyai, Modin/lebai, Ustadz, Sesepuh masyarakat) pada suatu acara-acara tertentu yang kadang dinamakan “Kenduren”,<sup>40</sup> seperti:

“1. Acara setelah kematian seseorang, selama 7 (tujuh) malam. Kemudian Selamatan lagidihari ke-40 hari setelah meninggal (Matang puluh dino ) dan hari ke-100 (‘Nyatus’),sertasetahunnya (Sependak) dan Ke-1000 (Nyewu); 2. Acara sedekah desa; 3. Acara pada malam menjelang pernikahan; 4. Selamatan anak 4 bulan atau 7 bulan dalam kandungan sedangkansetelah kelahiran adalah dengan

<sup>39</sup> Upacara sedemikian juga relevan dengan Upacara tradisional Melayu. Lihat Irwan Effendi & Muslim Nasution, 2008, Lagu Ayun Budak; Rampai Budaya Melayu Riau, BKPBM dan Adicita, Yogyakarta, h.23.

<sup>40</sup> M. Darori Amin Drs, H. MA. *Islam dan Budaya Jawa*, (Gama Media, 2000), h. 130-133.

<sup>38</sup> Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, (Jakarta: Pustaka-AlKautsar, 2014), h. 23.

pembacaan *sholawat Nabi* atau perjanjian dan Do'a; 5. Tasyakuran Panen, atau ketika diangkat menjadi pegawai; 6. Selamatan membangun Rumah atau pembelian barang berharga: Motor Mobil ,dll". "Selamatan" dan/ atau "Genduri" merupakan upacara ajaran Hindu. [Masalah ini] terdapat pada kitab sama weda<sup>41</sup> hal. 373 (no.10). Pelaksanaan 'Selamatan' sebagai doa dan penghormatan setelah kematian seseorang juga terdapat dalam agama Hindu dikenal dengan Panca Sradha (Lima Keyakinan). Lima keyakinan itu meliputi percaya kepada Sang Hyang Widhi, Roh leluhur, Karma Pala, Samskara, dan Moksa. Dalam keyakinan Hindu roh leluhur (orang mati) harus dihormati karena bisa menjadi dewa terdekat dari manusia [Kitab Weda Smerti-<sup>42</sup> Hal. 99 No. 192]. Selain itu dikenal juga dalam Hindu adanya Samskara (menitis/ reinkarnasi).

Upaya 'Selamatan' anak 4 bulan atau 7 bulan dalam kandungan sedangkan setelah kelahiran, dilaksanakan juga oleh masyarakat Hindu - Selama bayi dalam kandungan dibuatkan tumpeng selamatan

41 Samaveda (Sanskerta: सामवेद, *sāmaveda*, berakar dari kata *sāman* "irama" + *veda* "pengetahuan") tidak lain adalah himpunan mantra-mantra yang diberi tanda nada untuk berbagai irama. Samaveda merupakan bagian dari Catur Veda yang disebut juga "Nyanyian Veda Suci. Samaveda memuat 1875 mantram, dan di mana 1800 mantram merupakan pengulangan daripada Rgveda dan 75 mantram yang lain memang disusun dan dimuat dalam sastra ini.

42 Pengertian *Weda Smerti*, Smerti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi. Secara garis besarnya Smerti dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yakni kelompok Wedangga (Sadangga), dan kelompok Upaweda. Kelompok Wedangga, disebut juga Sadangga. Wedangga terdiri dari enam bidang Weda, yaitu: Siksa (Phonetika), isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara yang tepat dalam pengucapan mantra serta tinggirendah tekanan suara. (<http://lenteradharmablogspot.co.id/2016/02/pengertian-weda-smerti.html>).

(telonan, tingkepan). [Hal ini] terdapat dalam kitab Upadesahal. 46. Dan setelah bayi lahir, ari-ari[nya] terlebih dahulu dibersihkan dan dicampurkan dengan bunga, dan kemudian dimasukkan dalam kelapa/kendil untuk kemudian ditanam. Bila perempuan di kiri pintu, bila laki-laki di kanan pintu dan diadakan genduri (sepasar, selapan, telonan, dst).

Upacara tradisional ini memberikan inspirasi di kehidupan modern, betapa nilai kesetiaan menjadi hal yang sangat berharga seperti halnya kesetiaan pada bangsa dan negara, sehingga terus dilestarikan dan mendapat respon masyarakat luas. Keberadaan masyarakat Muslim di Bali hidup berkehidupan dengan masyarakat Hindu dalam kategori mayoritas, sudah terjalin sejak abad XIV M. Mereka sudah berhasil menjalin suasana hidup berkehidupan 'rukun'. Kata "rukun" dari bahasa Arab "rukn" artinya asas-asas atau dasar, seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektiva adalah 'baik' atau 'damai'. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama.<sup>43</sup> Kerukunan dalam Islam diberi istilah "tasamuh" atau toleransi. Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan,<sup>44</sup> bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keimanan), karena aqidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Hadist. Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang Muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama

43 Depag RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Ummat Beragama*, (Jakarta, 2003), h. 5.

44 Mawardi Marmiati, "Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah Transmigrasi Palingkau Asri", *Jurnal "Analisa"*, vol. XV No.02 Mei-Agustus 2008, h. 94.

dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah swt, *alKafirun* :1-6. Suasana ‘rukun’ ditandai adanya penyelenggaraan upacara tradisional, antara lain: tradisi saparan, Qurban Idul Adha dan sebagainya.

## KESIMPULAN

Bali tidak hanya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia, namun juga lekat dengan citra damai dan harmonis yang terbentuk secara kuat sejak berabad-abad.

Di seluruh pelosok negeri yang mayoritas Hindu itu, terselip berbagai kampung Muslim yang berumur sangat tua dengan segala kultur yang ikut mewarnai spektrum sejarah negeri itu.

Sejumlah komunitas Muslim di Bali antara lain tersebar di Banjar Saren Jawa di wilayah Desa Budakeling (Karangasem), Kapaon, Serangan (Kota Denpasar), Pegayaman (Buleleng) dan Loloan (Jembrana), Gelgel (Klungkung), Lebah (Klungkung), Kusamba (Klungkung), dan masih banyak lagi kampung-kampung lain yang penduduknya mayoritas Muslim.

Pada mulanya, umat Muslim datang ke Bali sebagai pengawal raja-raja Bali, seperti pengawal Majapahit beragama Islam yang mengiringi kepulangan Raja Gelgel Dalem Ketut Ngulesir pada abad ke-14, dan pengawal Muslim Blambangan yang turut menyertai I Gusti Ngurah Panji Sakti. Masyarakat dari berbagai etnis, seperti Jawa, Madura, Sasak, Tionghoa, Arab, dan Bugis masuk ke Bali melalui interaksi dagang di sejumlah wilayah pelabuhan seperti pesisir Buleleng.

Komunitas Muslim sudah berakar sejak lama, di beberapa wilayah di Bali, sep-

erti di Klungkung, Buleleng, Nusa Penida, Jembrana, Tabanan, Karangasem, Gianyar, Bangli, Badung-Denpasar, dan Lain-lain. Mereka tak hanya menjadi komunitas eksklusif, tetapi juga berinteraksi dan bergaul secara sosial dengan masyarakat Hindu di sekitarnya. Kondisi ini kemudian melahirkan kegiatan dalam wujud ‘upacara tradisional’.

‘Upacara tradisional’ komunitas Muslim Nusantara itu meliputi keseluruhan siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, berumah tangga, hingga meninggal dunia. Semua itu diatur sedemikian rupa untuk dipertemukan dengan tradisi dan/atau adat yang telah disepakati sejak zaman nenek moyang masyarakat setempat dan diwariskan secara turun temurun hingga sekarang, antara lain tradisi: *selamatan*, *saparan*, *ziarah kuburan*, *megibung*, *ngejot*. *Ngejot* biasanya lebih meriah dikampung-kampung Muslim tua di Bali (Klungkung, Buleleng, Jembrana/Negara, Gianyar, Tabanan, Denpasar). Karena ditambah dengan kemeriahan makan bersama di dalam satu wadah, namanya menjadi *megibung*. Para peserta *megibung*, termasuk pemuka dari lintas agama.

Islam memiliki sejumlah doktrin yang selalu mengarahkan pada semua penganutnya untuk mewujudkan kemampuan yang semaksimal mungkin dalam aspek-aspek kebudayaan.

Seperti arsitektur tempat-tempat ibadah seperti Masjid, Musholla, dan tempat-tempat yang disucikan makam-makam Islam, seni pentas. Pementasan seni berupa tarian *rodan* (penarilaki-laki) yang diiringi dengan rebana ditingkahi vokal “berjanji” dan “asroqal”.

Tradisi dalam kehidupan seni budaya selalu berkaitan dengan usaha-usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau norma-norma melalui pengulangan yang otomatis dan terus menerus berimplikasi pada masa lalu. Dengan bakat seni yang ada, para seniman muslim Bali, ternyata mampu menggunakan berbagai teknik dan kreatifitas untuk membuat seni dan budaya Islam, di tengah masyarakat mayoritas Hindu, Bali.

Kondisi tersebut tak lain sebagai wujud kearifan lokal selalu dilestarikan secara turun temurun. Wujud nyata kearifan lokal tersebut semakin memperkokoh keberadaan masyarakat Bali yang telah akrab dengan *menyama braya* yang dapat diartikan sebagai persaudaraan yang erat di mana masyarakat Bali menganggap orang non-Bali yang beragama non-Hindu pun sebagai saudara, sehingga dikenal istilah seperti *nyama Selam* (saudara Islam), *nyama Cina* (saudara Cina), *nyama Kristen* (saudara Kristen), dan lain-lain.

Kearifan lokal ini merupakan modal sosial yang dapat memperkuat solidaritas dan merekatkan hubungan masyarakat multietnis dan multiagama sehingga konflik yang rentan terjadi pada masyarakat plural dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fadillah, Moh. *Warisan Budaya Bugis Pesisir Selatan Denpasar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999.
- Bagus Rai Putra, Ida., ed. *Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepaksian*. Klungkung: Puri Klungkung. 2015.
- Depag RI. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Ummat Beragama*. Jakarta, 2003.
- Fenomena-fenomena Perubahan Menyama*

*Braya Dalam Masyarakat Bali yang Multikultural*, Yogyakarta. Universitas Kristen Satya Wacana.

- I Gede Parimartha, dkk, *Bulan Sabit Di Pulau Dewata Jejak Kampung Islam Bali-Kusamba*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Center for Religious and Crosscultural Studies, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2012.
- IMade Pageh, dkk, *Analisis Faktor Integratif Nyama Bali-Nyama Selam, Untuk Menyusun Buku Panduan Kerukunan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2013.
- I Wayan Sukarma. *Ide-ide Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Tentang Tradisi Bali*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. 2014.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina. 1998.
- Marmiati, Mawardi. "Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah Transmigrasi Palingkau Asri", *Jurnal "Analisa"*, vol. XV No.02 Mei-Agustus 2008.
- Mashad, Dhururudin. *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta: Pustaka-Al Kautsar. 2014.
- N. A, Ridwan. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*, IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007.
- Ridwan Lubis, Muhammad., (ed.). *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*.
- Sarlan, Muhammad., ed, *Islam di Bali Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali*. Bali: Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama. 1998.

## Internet

- Gobyah, I. Ketut (2003) 'Berpijak Pada Kearifan lokal', [www.balipos.co.id](http://www.balipos.co.id)
- <http://lenteradharmablog.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-weda-smerti.html>
- I Ketut Gobyah dalam "Berpijak pada Kearifan Lokal" dalam <http://www.balipos.co.id>, didownload 17/9/2017.
- S. Swarsi Geriya dalam "Menggali Kearifan Lokal

untuk Ajeg Bali” dalam Iun, <http://www.balipos.co.id>

<https://www.scribd.com/document/323802735/Provinsi-Bali-Dalam-Angka-2016>.  
Diakses: Rabu, 13 September 2017.

<http://www.baliprov.go.id/Geographi> (Diakses hari Selasa, 29 Agustus 2017).

### **Wawancara**

*Wawancara* dengan I Nyoman Sunarya, Ahli (Ahli Baca Prasasti) yang sekarang bekerja di Balai

Arkeologi, Denpasar, Bali. (Selasa, 5 September 2017).

*Wawancara* dengan I Wayan Suarka (Pembimbing/Pemandu Wisata di Anjungan Bali TMII Jakarta) (pada: Selasa, 8 Agustus 2017).

*Wawancara* dengan Taufiq Ashadi (Ketua MUI Bali), Senin, 5 September 2017.

*Wawancara* dengan Ramadhan (Pengurus Masjid Al-Hikmah, Kampung Lebah, Klungkung), Rabu, 6 September 2017.

# Memanfaatkan Dokumen Cina Klasik: Mengungkap Informasi Baru Sejarah Jawa

**Nurni W. Wuryandari**  
*Universitas Indonesia*  
*nurnisman@yahoo.com*

**ABSTRAK** - Sejarawan asing berbagai negara sejak lama menaruh perhatian pada Nusantara dan alamnya. Para sejarawan asing, termasuk sejarawan Cina kemudian mencatat semua informasi yang didapat saat melakukan kunjungan ke Nusantara. Laporan lisan dihimpun, dicatat, dan dijadikan dokumen sejarah. Artikel ini mengkaji naskah Tiongkok tertua tentang Nusantara yang berbicara mengenai Jawa. Pertimbangannya adalah jumlah paparan yang dicatat dalam dokumen klasik Cina terbanyak berbicara mengenai Jawa.

Tiongkok mencatat Jawa sejak masa Dinasti Han berkuasa (220 SM – 206 M). Paparan catatan pertama ini masih sangat sederhana dan pendek. Meski narasinya pendek, namun dokumen dari masa Han memberikan informasi siapa penggagas hubungan bilateral Tiongkok-Jawa. Setelah masa itu, Tiongkok tak pernah putus mencatat Nusantara, khususnya Jawa. Dari dokumen-dokumen tertua, terungkap kapan Tiongkok pertama kali melakukan kunjungan ke Nusantara, baik secara formal maupun tidak. Hal-hal penting apa saja yang sesungguhnya dicatat dalam dokumen klasik Tiongkok juga akan menjadi sorotan selanjutnya. Dokumen terakhir yang digunakan sebagai kajian dalam artikel ini adalah dokumen masa Dinasti Yuan (1279 – 1368), yaitu *Yuan Shi* (Sejarah Dinasti Yuan). Dokumen ini sangat bernilai karena memiliki informasi yang belum pernah dipaparkan sebelumnya dalam buku-buku sejarah di Indonesia.

Naskah-naskah tertua sebagian besar mencatat kondisi negeri Jawa dan kekayaan alam, namun sejak Dinasti Yuan di bawah bangsa Mongol berkuasa di Tiongkok (1206 – 1368), narasi tentang Jawa mulai diwarnai masalah politik antara dua wilayah. Naskah-naskah yang menjadi kajian dalam makalah ini selain dikupas isi narasinya untuk mendapatkan informasi baru yang disampaikan, juga akan dikaji dengan pendekatan filologis atas teks yang dilakukan dengan teliti untuk mendapatkan makna di balik pemilihan kata yang digunakan oleh para sejarawan saat mencatat tentang Jawa. Dari narasi dokumen aslinya, cara memaparkan, penggunaan kalimat dan istilah, diharapkan akan diperoleh keragaman informasi baru yang belum pernah diungkap sebelumnya.

**KATA KUNCI** - *Dokumen klasik Tiongkok, Jawa, hubungan bilateral, pendekatan filologis, informasi baru*

**ABSTRACT** - Foreign historians have long been interested in the Nusantara region and its natural resources. The Chinese historians were among those who had directed their attention to any available records which were obtained from their visits to the area. The oral reports which they received, were compiled and made a historical document. This article analyzes the oldest Chinese document about Nusantara which talked about Java. It is to consider the fact that most recorded Chinese classic documents were about Java. Java has been documented since the Han dynasty was in power in 220 B.C.E – 206 C.E. The first record was in a simple format and short. However, although the narration was short, it gave an information about the first initiator of the bilateral relations between China and Java. After that period, China has never ceased to make records about Nusantara, especially Java. For these documents, it was revealed when China made the first visit to Nusantara, both the formal and informal contact. Besides, there have notes on the important events which were written in these classic documents that became the focus of the research. The last

---

document used here is the document recorded during the Yuan dynasty, 1279-1368, the Yuan Shi or the History of the Yuan dynasty, This document is valuable as that the information has never been exposed before in any history book in Indonesia. Most of these old records talk about the rich natural condition of Java. However, after the invasion of the Mongols in China during that time (1206-1368), the narration was mixed with a regional political aspect . The content of the documents in this paper are analysed using a thorough philological approach to find meaning of the words selected by the historians describing Java. By using the original documents, the paper exposes the sentence use and terminology, hoping that there are new information that have never been known.

**KEYWORDS** - *The classic Chinese documents, Java, bilateral relations, philological approach, new information.*

## PENDAHULUAN

**B**angsa Cina memiliki tradisi tulis yang kuat, memiliki kebiasaan mencatat dan melestarikan catatan-catatan yang pernah dibuat. Hal ini merupakan kontribusi besar bagi berkembangnya pengetahuan dan pewarisan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Tiongkok dikenal dengan sederet prestasi dalam hal penerbitan, penghimpunan buku-buku penting dan langka yang pernah terbit di Tiongkok ke dalam satu serial, dan penerbitan ulang buku-buku tersebut. Tiongkok selain memiliki catatan yang sangat lengkap tentang sejarah dan budaya negeri mereka sendiri, juga memiliki catatan tentang negara-negara asing yang cukup lengkap. Catatan tentang negara asing yang dibuat oleh pencatat Tiongkok biasanya berupa catatan tentang kunjungan utusan suatu negara asing ke Tiongkok, atau berupa catatan orang Tiongkok yang mengunjungi atau mendatangi negara atau wilayah tertentu. Catatan tentang berbagai kondisi di kepulauan Nusantara juga dapat ditemukan dalam berbagai dokumen klasik Tiongkok. Catatan tertua tentang Nusantara, bisa ditemukan dalam dokumen-dokumen klasik Cina sejak masa dinasti Han

(206 SM – 220 M). Nyaris tidak ada akademisi, sejarawan atau arkeolog Indonesia yang pernah mengupas hal ini dari naskah aslinya karena naskah-naskah tersebut tidak ditulis dalam bahasa Mandarin dewasa ini, melainkan menggunakan bahasa Cina Klasik (*wenyan* 文言).

Informasi tentang Nusantara yang dihimpun oleh sejarawan kerajaan atau pengelana Tiongkok sudah pernah diterjemahkan oleh sinolog Belanda, W.P. Groeneveldt, dan diterbitkan di Batavia pada tahun 1880 dengan judul *Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources*. Judul buku ini mengalami beberapa kali perubahan sesuai kebutuhan penerbit. Saat diterbitkan oleh PT. Djambatan Jakarta pada tahun 1960, judulnya adalah *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*, dan dalam versi Bahasa Indonesia terbitan Komunitas Bambu judulnya menjadi *Nusantara dalam Catatan Tionghoa* (2009). Karya terjemahan ini kita ketahui banyak dirujuk oleh para sejarawan dan arkeolog Indonesia. Saat membahas sisi peradaban masyarakat Majapahit, terlihat bahwa sumber Tiongkok terjemahan menjadi sumber penting karena memotret budaya Jawa (Munandar, 2008: 8 – 10)

dan melengkapi informasi yang tidak dimiliki oleh catatan sejarawan Indonesia. Buku *Sejarah Nasional Indonesia* terbitan Balai Pustaka (1984) juga banyak menggunakan sumber klasik Tiongkok terjemahan sebagai acuan, terutama saat mendeskripsikan tentang kehidupan kerajaan-kerajaan Nusantara masa lalu. Informasi tentang Nusantara dalam naskah Tiongkok mencatat bermacam hal, seperti posisi geografis, hubungan bilateral, kekayaan alam, adat-istiadat, dan kondisi kerajaan yang mereka kunjungi. Groeneveldt (2009) membuat terjemahan atas dokumen klasik Tiongkok dan memberi beberapa anotasi yang diperlukan atas teks yang diterjemahkan, namun tidak mengkaji isi teks.

Catatan tentang Jawa merupakan dokumentasi yang paling lengkap deskripsinya mengenai Nusantara yang dicatat dalam dokumen klasik Tiongkok. Bila dirunut dari penerbitan sejarah resmi kedinastian, didapati pula bahwa catatan tentang Jawa adalah catatan paling tua dibandingkan dengan catatan tentang wilayah lain. Setidaknya ada 20 lebih naskah klasik yang mencatat tentang Jawa. Hal lain yang menarik dari naskah-naskah tersebut adalah cara pencatatan yang sangat sistematis yang dikerjakan oleh para sejarawan maupun para pengelana Cina. Catatan klasik Tiongkok tentang Nusantara, khususnya Jawa, antara lain pernah diangkat oleh Feng Chengjun (1976) dalam buku *Zhongguo Nanyang Jiaotongshi* (Sejarah Hubungan Cina dengan Negara-negara Laut Selatan) dan Liang Liji (2012) dalam bukunya yang berjudul *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis*. Buku Feng menyoroti hubungan Tiongkok dengan negara-negara

di laut selatan dengan cara menghadirkan petikan-petikan dokumen, dengan disertai anotasi tentang nama-nama tempat. Sedangkan Liang Liji mengangkat hubungan bilateral Cina dengan Nusantara yang awalnya berupa relasi upeti dari Jawa ke Tiongkok, hingga akhirnya Jawa menjadi mitra strategis bagi Tiongkok.

Apa yang dikerjakan oleh Feng dan Liang meski berbicara tentang Nusantara, pembahasan tentang bagaimana isi teks berbicara tentang Jawa, dan kaitannya dengan kondisi setempat, luput dari pengamatan mereka. Berangkat dari poin-poin yang tidak dikerjakan oleh Groeneveldt maupun akademisi Tiongkok inilah, makalah ini mencoba mengungkap narasi tentang Jawa dalam sumber Tiongkok asli dengan pendekatan filologis yang belum pernah dikerjakan oleh peneliti lain. Metode yang dilakukan adalah dengan cara memetik bagian-bagian dokumen yang relevan dengan maksud penulisan, menerjemahkannya, kemudian menginterpretasikan maknanya melalui kosa kata dan kalimat yang digunakan dalam dokumen. Dari kajian atas dokumen diharapkan didapat informasi baru, antara lain: siapa sesungguhnya yang lebih dulu berinisiatif membangun hubungan bilateral Tiongkok-Jawa, dan bagaimana perkembangan hubungan itu selanjutnya. Selain itu, hal lain yang akan diangkat dalam artikel adalah tentang mengapa sejarawan atau pencatat Tiongkok selalu menghadirkan catatan tentang posisi geografis, dan kondisi umum tempat yang dikunjungi.

Untuk tujuan itu akan digunakan catatan tertua yang mencatat Jawa, yang ada dalam dokumen masa dinasti Han (206 SM – 220 M), dokumen masa dinasti Tang

(618 – 907), dinasti Song (960 – 1279) hingga masa dinasti Yuan (1206 – 1368). Naskah-naskah yang digunakan ini memperlihatkan pentingnya suatu catatan sebagai sebuah rujukan pengetahuan. Selain itu juga memperlihatkan kondisi hubungan dua negara pada masa-masa tersebut.

## NASKAH-NASKAH TERTUA

### 1 Merekam Jawa Sebagai Pembuka Hubungan

Dokumen tertua yang mencatat Jawa dibuat oleh Dinasti Han (206 SM – 220 M) dalam *Hou Han Shu* (後漢書; Kitab Sejarah Dinasti Han Akhir) bab ke-6 *Benji* (本紀), dan bab ke-116 *Xinanyi Zhuan* (西南夷傳 Catatan Negara Barbar Barat Daya). Dua bab naskah yang isinya sangat mirip ini menyebut bahwa Jawa datang ke Cina pada masa Kaisar Yongjian berkuasa, yaitu pada tahun 131 Masehi.

永建六年 (131) 日南徼外葉調王便遣使貢獻。帝賜調便金印紫綬。

Pada masa pemerintahan tahun ke-6 (131M) Kaisar Yongjian, disebutkan bahwa Raja Yediao (Jawa)<sup>1</sup> bernama Bian mengirim utusan untuk memberi sesembahan ke Cina. Sebagai balasan, Kaisar menghadihinya stempel emas kekaisaran dengan pita berwarna ungu.

Catatan tentang kedatangan orang Jawa di Cina diletakkan pada bagian *Benji*

<sup>1</sup> Ferrand dalam analisa yang ia kerjakan menyebut *Yediao* sebagai Jawa, lihat: Feng Chengjun, (1976), *Zhongguo Nanyang Jiaotong Shi* (中國南洋交通史), Taipei: Shangwu Yinshuguan, hlm: 3-7. Liang Liji menyebut *Yediao* berasal dari kata *Yavadvipa* yang disingkat dari empat suku kata menjadi dua suku kata saja. Lihat Liang Liji, (2012), *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm: 29.

(baca: penci) atau *primary chronicle*. Pada umumnya bagian ini mencatat tentang peristiwa-peristiwa penting, yang diletakkan pada bagian awal sebuah kitab. Bagian ini bertujuan memberi gambaran garis besar isi kitab. Catatan dengan sistem seperti ini pertama kali dibuat oleh Sima Qian (司馬遷), sejarawan masa dinasti Han (206 SM – 220 M) yang menyusun kitab *Shiji* (史記: Historical Records). Ia adalah pelopor sistem pendokumentasian dengan klasifikasi seperti di atas untuk kitab-kitab sejarah resmi kedinastian. Selain kitab *Hou Han Shu*, deskripsi awal tentang kedatangan Jawa ke Cina juga bisa ditemukan dalam narasi *Kitab Sejarah Dinasti Song* masa dinasti-dinasti Selatan (420 – 479), atau *Song Shu*, bab ke-97. Sama halnya dengan *Hou Han Shu*, kitab ini juga hanya memberikan informasi yang singkat tentang Jawa.

閩婆婆達國元嘉十二年 (435) 國王師黎婆達陀阿羅跋摩遣使奉表...

Pada masa pemerintahan tahun ke-12 (tahun 435) dari kaisar Yuanjia, Raja Sri Paduka Alapamo dari negara Shepopoda (Jawa) mengirim utusan (ke Cina) untuk menyampaikan surat penghormatan ...

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari narasi di atas,

1. Terlihat jelas bahwa deskripsi mengenai Jawa bukan merupakan deskripsi mengenai kunjungan orang Cina di tanah Jawa, melainkan kunjungan orang Jawa di daratan Cina. Jadi bisa disimpulkan bahwa Jawa-lah yang membuka jalur hubungan dengan Tiongkok. Kunjungan pertama Jawa ke Tiongkok dilakukan pada tahun 131 M.

2. Kunjungan Jawa ke Tiongkok adalah dengan cara mengirim utusan (qianshi 遣使), untuk tujuan menyampaikan se-sembahan (gongxian 貢獻), atau menyampaikan surat berupa penghormatan (fengbiao 奉表) kepada kaisar.
3. Dalam dokumen asli berbahasa Mandarin tertulis, tindakan balasan raja kepada utusan Jawa adalah memberi hadiah khusus. Kata yang digunakan untuk memberi hadiah adalah “si/ci” (賜), suatu istilah khusus yang digunakan untuk orang yang berkedudukan lebih tinggi atau senior kepada orang yang kedudukannya lebih rendah atau lebih junior. Istilah-istilah seperti ini terus digunakan dari dinasti ke dinasti sepanjang kedinastian di Cina.

Selain tiga hal di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya melaut orang Jawa ternyata sudah cukup tua, terbukti dengan tibanya pelaut Jawa di Tiongkok. Jarak dua negara, nampaknya tidak menjadi kendala bagi pelaut-pelaut Nusantara yang terkenal ulung. Kondisi Nusantara yang terdiri dari kepulauan yang membuat penduduknya biasa berlayar untuk berkomunikasi antar satu pulau dengan pulau lainnya (Wen & Cai, 1985:4). Saat Jawa (*Yediao*) mengirim utusan ke Cina, orang Jawa sudah berlayar menggunakan kapal mereka sendiri (Zhang, 1994: 10).

## 2. Merekam Kunjungan Awal Tiongkok ke Tanah Jawa

Narasi pertama yang menunjukkan orang Tiongkok datang ke Jawa dibuat oleh Fa Xian (Fa Hien) dalam *Fo Guo Ji* (佛國記; Catatan Negara-negara Budhis). Sesungguhnya catatan yang ia buat menge-

nai Jawa bukanlah merupakan catatan perjalanan yang direncanakan untuk menuju Jawa, namun lebih merupakan catatan Fa Xian saat ia akan kembali ke Tiongkok dengan menumpang kapal India. Badai yang menerjang membuat kapal yang ia tumpangi pada tahun 414 terpaksa terdampar di “Yepoti” atau Jawa.<sup>2</sup> Sebagai seorang biksu Budha ia menaruh perhatian pada masalah Budhisme, dan mendapati bahwa orang Jawa masa itu belum ada yang memeluk agama Budha.

.....商人荒遽，不知那向，海深無底，又無下石柱處。至天晴已，乃知東西。還復望正而進，若值伏石，則無活路。如是九十日許，乃到一國，名耶婆提。其國外道婆羅門興盛，佛法不足言。

....., para pedagang cemas, mereka tak tahu arah, laut begitu dalam seperti tak berdasar, juga tak tahu ke mana harus berlabuh. Saat cuaca sudah cerah, barulah arah bisa diketahui lagi. Kami kembali bisa memandang dengan benar dan meneruskan perjalanan. Jika saat badai menabrak karang, maka kami tak mungkin selamat. Kami terus berlayar seperti ini sampai kira-kira 90 hari, dan mencapai sebuah negeri yang bernama *Yepoti*. Di negara ini ajaran Hindu berkembang luas, sedangkan ajaran Budha belum ada yang membicarakan.

Meski informasinya singkat, namun dari kedatangan orang Jawa di Tiongkok dan deskripsi Fa Xian ini sesungguhnya informasi tentang Jawa pelan-pelan mulai dihimpun dan dipelajari. Dari dinasti

<sup>2</sup> Groeneveldt menyebut Yepoti sebagai Ya-vadi. Lihat Groeneveldt (2009), *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Jakarta: Komunitas Bambu, hlm: 11

ke dinasti catatan mengenai tanah Jawa semakin lengkap datanya, dan mencakup berbagai aspek.

## PERKEMBANGAN INFORMASI TENTANG JAWA

### 1. Dokumen Masa Dinasti Tang (618 – 907)

Dokumen masa Dinasti Tang, mulai muncul catatan posisi geografis Jawa berikut narasi yang memperlihatkan bahwa apa yang dicatat berdasarkan pada tinjauan langsung orang Tiongkok di tanah Jawa. Informasi ini bisa dilihat dalam dua kitab yang dibuat pada masa Dinasti Tang, yaitu *Kitab Sejarah Lama Dinasti Tang (Jiu Tang Shu; 舊唐書)*, dan *Kitab Sejarah Baru Dinasti Tang (Xin Tang Shu; 新唐書)*.

Wilayah Jawa yang menjadi sumber informasi pencatatan kedua kitab sejarah tersebut adalah Heling (Holing atau Kalingga), tempat bertakhtanya seorang ratu di Jawa yang dikenal sebagai Ratu Xi Ma atau Shima. Perlu mendapat perhatian bahwa nama Jawa dalam naskah masa dinasti Tang tidak hanya merujuk pada nama wilayah, tapi juga disebut sebagai nama kota tempat penguasa Jawa bertakhta. Kemungkinan wilayah ini adalah tempat orang-orang Tiongkok mendarat. Kedua naskah tersebut memiliki beberapa kesamaan cara pencatatan, yaitu:

- dibuka dengan deskripsi singkat posisi geografis Jawa,
- kondisi umum dan adat istiadat yang berlaku di Jawa,
- hubungan bilateral

Narasi tentang Jawa dalam *Kitab Sejarah Lama* lebih pendek dari *Kitab Sejarah Baru*, namun kedua naskah masa Tang ini

isinya sesungguhnya saling melengkapi. Berikut ini saya petik gambaran tentang posisi geografis berikut hubungan antar dua negeri, Jawa dan Cina, yang saya ambil dari dokumen *Kitab Sejarah Baru Dinasti Tang*, bab ke-222 lanjutan, Catatan tentang Heling (Kalingga), Barbar di Barat Daya (新唐書; 卷222 下; 西南蠻; 訶陵傳). Dalam narasi yang mencerminkan bentuk hubungan dua negeri, dapat terlihat bahwa pihak Jawa selalu melakukan pengiriman utusan dengan membawa berbagai persembahan, sementara kedatangan Tiongkok ke Jawa bukan merupakan kunjungan resmi dengan pengiriman utusan. Kedatangan yang dicatat lebih merupakan kunjungan pribadi.

訶陵亦曰社婆, 曰閩婆, 在南海中。東距婆利, 西墮婆登, 南瀕海, 北真臘。…貞觀中 (627 – 649) 與墮和羅皆遣使者入貢, …大曆中 (766 – 779), 訶陵使者三至。元和八年 (813), 獻僧祇奴四、五色鸚鵡、頻伽鳥等。訖大和 (806 – 820), 再朝貢。咸通中 (860 – 873), 遣使獻女樂。

*Kerajaan Heling (Holing atau Kalingga) juga disebut sebagai Jawa (dalam naskah disebut: Shepo atau Jepo), terletak di samudera selatan. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Bali, di sebelah baratnya berbatasan dengan Pulau Batam, dan di selatannya adalah lautan luas. Di utaranya adalah Kamboja .... Pada masa pemerintahan kaisar Zhen-guan (627 – 649) Jawa (bersama dengan dua kerajaan lainnya) pernah mengirim utusan untuk menghadap kaisar..... Pada masa Kaisar Dali berkuasa (766 – 779), Jawa pernah tiga kali mengirim utusan. Pada masa tahun ketiga berkuasanya*

*Kaisar Yuanhe (813), Jawa pernah mempersembahkan empat orang budak, burung nuri, burung pinkayang berwarna-warni, dan lain-lainnya ..... Pada masa kaisar Dahe (806 – 820) Jawa datang lagi membawa upeti. Pada masa Kaisar Xiantong (860 – 873), Jawa mengirim utusan dengan mempersembahkan perempuan-perempuan pemain musik.*

Dinasti Tang mencatat Jawa sebagai “negeri yang sangat kaya” karena menghasilkan berbagai benda langka 出璚瑁、黃白金、犀、象, yang tak lain adalah tempurung penyu, emas kuning dan putih (emas dan perak), cula badak dan gading. Hal yang juga menarik bagi para pengelana Tiongkok saat melihat Jawa adalah gua-gua yang dapat mengeluarkan garam dengan sendirinya (有穴自湧鹽).

Pengelana Tiongkok cukup teliti mengamati kondisi yang ditemukan dan kemudian mencatat adat-istiadat negeri setempat yang nampak berbeda dari budaya mereka. Informasi yang dimuat oleh dokumen-dokumen ini memberikan pengetahuan berharga bagi pembaca yang belum mengenal Jawa. Ini adalah pengetahuan dasar tentang kondisi dan adat-istiadat di Jawa, sehingga bila sewaktu-waktu diperlukan, mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup sebelum mencapai tanah tujuan, yaitu tentang: posisi geografis, adat-istiadat, dan sifat penduduknya, kondisi alam dan hasilnya, berikut pengetahuan apa saja yang sudah dimiliki oleh orang Jawa masa itu. Berikut ini adalah gambaran adat istiadat dan kondisi Jawa dari *Kitab Sejarah Lama Dinasti Tang*, bab ke-197, Catatan tentang Kalingga, Barbar Selatan (舊唐書; 卷197; 南蠻, 訶陵傳):

豎木為城, 作大屋重閣, 以椽欄皮覆之, 王坐其中, 悉用象牙為牀, 食不用匙筋, 以手而撮。亦有文字, 頗識星曆。俗以椰樹花為酒, 其樹生花, 長三尺餘, 大如人膊, 割之取汁以成酒, 味甘, 飲之亦醉。

*(orang Jawa) membangun (tembok) kota dengan balok kayu, di sana ada bangunan besar berlantai dua yang beratapkan kulit pohon palem, di situlah raja bertahta, di atas balai dari gading. Saat makan orang Jawa tidak menggunakan sendok atau sumpit, cukup menggunakan tangan memasukkan makanan ke mulut. Mereka juga memiliki aksara, dan mengenal almanak. Mereka biasa membuat arak dari bunga pohon kelapa (manggar) yang panjangnya lebih dari tiga kaki dan sebesar lengan manusia. Bunga ini akan dipotong dari pohonnya, diambil niranya untuk diolah menjadi arak. Rasa arak itu manis, dan bila diminum juga memabukkan.*

## 2. Dokumen Masa Dinasti Song (960 – 1279)

Pada masa Dinasti Song, informasi tentang Jawa bisa didapat dari dua dokumen, yaitu *Song Shi* (宋史; Sejarah Dinasti Song), bab ke-489, dan *Zhufanzhi* (諸蕃志; Catatan Berbagai Negara Asing) karya Zhao Rukuo. *Song Shi* adalah kitab sejarah resmi yang dihimpun sejarawan kerajaan, sementara *Zhufanzhi* adalah sebuah catatan yang dihimpun secara pribadi oleh Zhao Rukuo. Informasi yang disampaikan kedua dokumen ini hampir sama, yaitu tentang keadaan alam, adat istiadat, sistem pemerintahan dan pembayaran. Perbedaannya bisa dilihat dalam dua hal, *Song Shi* lebih

banyak menyorot kondisi hubungan Jawa dengan Tiongkok, sementara *Zhufanzhi* mencatat hubungan dagang.

*Sejarah Dinasti Song* adalah kitab sejarah yang pertama kali memuat deskripsi rinci mengenai perjalanan pelaut Tiongkok menuju Nusantara, khususnya Jawa. Apa yang dicatat oleh kitab sejarah ini menjadi penting, karena informasi waktu dan jalur tempuh juga disertakan di dalamnya, yaitu kira-kira lebih dari 2 bulan dengan pemberhentian di beberapa tempat. Informasi ini nampaknya menjadi pegangan pengetahuan untuk para pelaut Tiongkok yang bermaksud menuju Jawa. Berikut ini intisari jalur yang ditempuh orang Tiongkok saat menuju Jawa, dan kemudian jalur mereka kembali ke negeri asal, yang saya sarikan dari narasi *Sejarah Dinasti Song*, bab ke-489 (Wuryandari, 2013: 188 – 189):

#### **Jalur keberangkatan:**

泉州或廣州 (Quanzhou atau Guangzhou) → 崑崙國 (Condore, pulau kecil di mulut sungai Mekong, Vietnam) → 大食國 (Tumasik/Singapura) → 三佛齊 (Sriwijaya) → 爪哇 (Jawa)

#### **Jalur pulang:**

Jawa → → 三佛齊 (Sriwijaya) → 古邏 (Kuala Trengganu) atau 柴歷亭 (Cherating) → 交趾 (Annam, tempat di Selatan Vietnam) → 廣州或泉州 (Guangzhou atau Quanzhou).

Dari deskripsi posisi geografis tersebut, diketahui bahwa pelayaran orang Tiongkok ke tanah Jawa adalah pelayaran yang menyusuri wilayah-wilayah pantai timur di Asia Tenggara. Groeneveldt menyebutnya sebagai pelayaran yang ku-

rang berani karena kurangnya pengetahuan mereka tentang wilayah Asia Tenggara (Groeneveldt, 2009: 1).

Kehadiran orang Tiongkok di Jawa mendapat sambutan cukup baik. Kesadaran orang Jawa akan pentingnya menjalin hubungan dengan bangsa lain sudah terlihat sejak naskah sejarah tertua dibuat pada masa dinasti Han. Orang Jawa membuka diri saat tamu asing datang di Jawa. Gambaran orang Jawa yang ramah dan menyambut terbuka orang Tiongkok yang datang, adalah representasi bentuk hubungan yang cukup hangat dari kedua belah pihak. Inilah deskripsi yang menunjukkan hal yang tersebut yang diambil dari *Sejarah Dinasti Song*, bab ke-489.

室宇壯麗…… 中國賈人至者，待以賓館，飲食豐潔。地不產茶。其酒出於椰子及蝦蟇丹樹。蝦蟇丹樹，華人未嘗見，或以枕檳榔釀成，亦甚香美。

Rumah mereka indah ... ketika para pedagang Tiongkok datang ke Jawa, (mereka) dijamu dan disediakan penginapan untuk tamu. Hidangan yang disediakan untuk tamu begitu banyak dan bersih. Negeri ini tak menghasilkan teh. Mereka membuat arak dari (bunga/manggar) kelapa dan jenis pohon palem lainnya, yang belum pernah dicicipi dan dilihat orang Tiongkok sebelumnya. Mereka membuatnya dengan cara menyadap air pohon palem dan memfermentasikannya. Arak yang sudah jadi itu sangat wangi dan enak.

Dari catatan yang dihimpun Zhao Rukuo dalam *Zhufanzhi*, meski agak pendek, dapat ditemukan bahwa beberapa kondisi, kegiatan dan kebiasaan hidup orang Jawa yang dicatat oleh Zhao Rukuo adalah hal

yang masih terpelihara hingga sekarang. Misalnya saja, ia mencatat bahwa di Jawa ada kebun-kebun bambu, ada lomba adu ayam dan babi, penduduk mengolah sawah menggunakan tenaga sapi, dan cara orang Jawa yang membuat garam dengan memanas air laut. Hal-hal yang dicatat pada bagian akhir bab “Jawa” dalam *Zhufanzhi* adalah informasi yang tidak muncul pada dokumen Tiongkok lainnya, yaitu tentang hubungan dagang antara pedagang Tiongkok dengan Jawa di suatu tempat di wilayah Jawa yang ia sebut dengan 蘇吉丹 (dalam ejaan Pinyin: Sujidan, baca: Sucitan).

番商興販，用夾雜金銀及金銀器皿，五色纈絹，皂綾，川芎，白芷，硃砂，綠礬，白礬，礪砂，砒霜，漆器，鐵鼎，青白瓷器交易。此番胡椒萃聚，商船利倍蓰之獲，往往冒禁，潛載銅錢博換。朝廷屢行禁止興販，番商詭計，易其名曰蘇吉丹。

*Pedagang dari Panyu (Guangdong) melakukan transaksi dagang (membeli untuk dijual) dengan membawa berbagai benda khas dari Tiongkok seperti emas-perak, barang rumah tangga dari emas-perak (ceret, baskom, mangkuk, piring), sutra tenun yang beraneka corak dan warna, satin hitam, bahan obat-obatan tradisional khas Tiongkok (akar rempah, rempah wangi, sulfat merah cinnabar, tawas hijau, tawas putih, bahan farmasi borum, dan arsenik), benda-benda yang dipernis, bejana besi berkaki tiga, dan barang keramik hijau-putih. Di tanah barbar (Jawa) inilah lada dikumpulkan. Kapal dagang bisa mendapatkan keuntungan lima kali lipat, dan seringkali dilakukan dengan melanggar larangan. Mereka membawa uang tembaga secara ilegal untuk mendapat penukaran (lada)*

*yang lebih banyak. Pihak kerajaan sudah berkali-kali melarang cara transaksi seperti ini, tapi pihak pedagang Guangdong terus melakukan tipu muslihat. Nama tempat pertukaran dagang ini adalah Sujidan.*

Membaca narasi di atas, dapat terlihat bahwa huruf 番 memiliki dua cara baca dan dua makna yang berbeda. Yang pertama, huruf tersebut harus dibaca dengan bunyi *Pan* yang mengacu pada wilayah Panyu, Guangdong. Dimaknai demikian karena ini berkaitan dengan barang yang dibawa oleh para pedagang untuk transaksi dagang jelas merujuk pada barang-barang khas milik Tiongkok. Yang kedua, huruf ini harus dibaca dengan bunyi *fan*, yang maknanya orang atau tanah barbar (mengacu pada negeri-negeri asing di luar Tiongkok), tempat dimana lada dikumpulkan. Penyebutan huruf *fan* disini jelas merujuk pada Jawa.

Apa yang dapat disimpulkan dari narasi teks adalah bahwa pada masa itu lada sudah menjadi komoditi yang sangat berharga di Jawa. Pedagang asing rela menempuh berbagai cara dan membawa berbagai barang khas Tiongkok untuk dapat ditukarkan dengan lada yang dapat membuat pedagang memperoleh keuntungan lebih dari lima kali lipat.

## **NASKAH MASA DINASTI YUAN (1206 – 1368): MENCATAT KONDISI POLITIK KHUSUS**

Bangsa Mongol di bawah Jenderal Borzigin Temuzin sesungguhnya sudah membangun kerajaan di Tiongkok pada tahun 1206. Kublai Khan mengganti nama dinasti di bawah kekuasaannya dengan sebutan Dinasti Yuan pada tahun 1271, dan mengalahkan Dinasti Song Selatan pada

tahun 1279. Dalam naskah masa Dinasti Song tergambar hubungan bilateral yang cukup baik, dan apresiasi orang-orang Tiongkok atas sambutan baik orang Jawa, namun setelah Kublai memimpin, gambaran kondisi hubungan Jawa-Tiongkok yang hangat sirna. Narasi dalam dokumen *Sejarah Dinasti Yuan (Yuan Shi 元史)* bab 210 mengenai Jawa dimulai dengan deskripsi yang informasinya agak bertentangan satu sama lain. Sebagai dinasti yang berkuasa setelah Dinasti Song, ia justru memberi gambaran singkat saja tentang posisi geografis Jawa. Dokumen menyatakan tidak terlalu mengetahui kekayaan tanah Jawa, namun sekaligus mencatat bahwa hasil produksi tanah Jawa bernilai tinggi. Jawa juga disebut sebagai satu-satunya negeri yang menjadi target serangan angkatan perang mereka, sementara dalam sejarah penyerangan militer mereka ke negeri di luar Tiongkok, tercatat bahwa bangsa Mongol ini juga pernah mengerahkan armada untuk menyerang Jepang.

爪哇在海外，視占城益遠。自泉南登舟海行者，先至占城而後至其國。其風俗土產不可考，大率海外諸蕃國多出奇寶，取貴於中國，而其人則醜怪，情性語言與中國不能相通。世祖撫有四夷，其出帥海外諸蕃者，惟爪哇之役為大。

*Jawa terletak di seberang lautan dan lebih jauh (dari) Champa. Jika berangkat dari Quanzhou dan berlayar ke selatan, akan sampai di Champa dan selanjutnya tiba di negeri ini.*

*Kebiasaan dan produksi negeri ini tidak banyak diketahui. Pada umumnya, negara-negara barbar di seberang lautan menghasilkan benda-benda langka dan bernilai yang*

*memiliki harga tinggi di Tiongkok. Penduduknya jelek dan aneh. Sifat alami dan ucapan mereka tidak bisa dipahami orang Tiongkok.*

*Ketika kaisar Shizu (Wubilie atau Kublai) menaklukkan orang-orang barbar di keempat penjuru dunia dan mengirimkan para perwira ke berbagai negeri di seberang lautan. Jawa adalah satu-satunya negeri yang harus diserang dengan sebuah angkatan perang.*

Meski informasi posisi geografis Jawa digambarkan sangat singkat, bukan berarti mereka tidak tahu pasti posisi Jawa dan bagaimana menempuh perjalanan ke Jawa. Dari informasi dalam dokumen Dinasti Song, pengetahuan tentang hal ini cukup rinci bisa didapat. Nampaknya jalur pelayaran menuju Jawa dipelajari seksama, dan mereka memutuskan mencari jalur alternatif lain yang tidak perlu menyusuri kota-kota sepanjang pantai timur Asia Tenggara. Karena itu, di bagian tengah dokumen *Yuan Shi*, diperoleh gambaran bahwa jalur yang ditempuh tentara kerajaan Yuan menuju Jawa, tidak mengikuti jalur konvensional yang ditempuh orang-orang masa dinasti Song dan sebelumnya. Jalur baru yang diperkirakan memotong jarak dan waktu tempuh, yang nampaknya juga merupakan jalur yang diperkirakan akan memudahkan untuk membawa armada perang karena melintasi laut luas. Di bawah ini akan saya hadirkan bagian narasi yang hanya menekankan jalur yang dilewati tentara Yuan:

十一月，福建、江西、湖廣三省軍會泉州。十二月自後渚啓行。

三十年正月，至欄山議方略。... 大軍繼進於吉利門，弼、

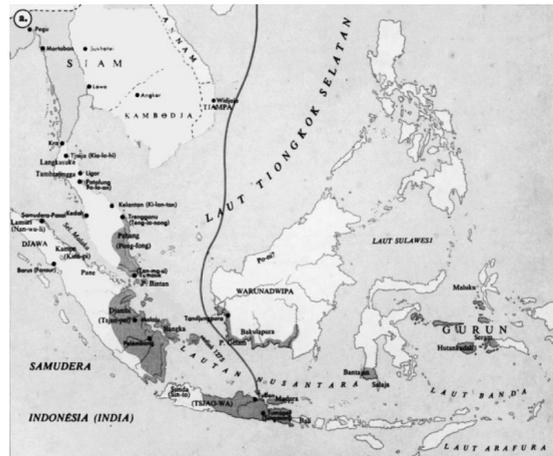
興進至爪哇之杜並足，與亦黑迷失等議，分軍下岸，水陸並進。…水軍，自杜並足由戎牙路港口至八節澗。…馬步軍，自杜並足陸行。

*Pada bulan kesebelas, seluruh prajurit dari Propinsi Fujian, Jiangxi dan telah berkumpul di Quanzhou. Pada bulan ke duabelas, ekspedisi ini memulai pelayarannya. Pada bulan pertama tahun 1293, mereka tiba di pulau Goulan (Gelam), dan merencanakan penyerangan mereka dengan seksama... Pasukan utama (pasukan besar) selanjutnya berlayar ke Jilimen (Karimun), dan kemudian Shi Bi dan Gao Xing masuk ke sebuah tempat di Jawa yang disebut Dubingzu (Tuban), dan kembali berembug dengan Yihei Misi (Ike Mese) untuk membagi pasukan saat menepi di pantai, mereka akan masuk ke Jawa melalui (jalur) air dan darat ...., pasukan jalur air dari Tuban menuju sungai kecil bernama Bajie (Kali Mas) melalui pelabuhan Rong Yalu (Jung Yalu; Hujung Galuh).... Sementara pasukan berkuda mengambil jalan darat dari Tuban..*

Jadi kalau disimpulkan, inilah jalur pelayaran Tiongkok ke Jawa yang tergambar dalam narasi Yuan Shi, bab 210:

Quanzhou → Pulau Gelam → Karimun Jawa → Tuban atau Hujung Galuh → Kali Mas

Peta perjalanan pasukan dinasti Yuan berdasarkan deskripsi di atas, meski tidak melukiskan titik masuk pasukan jalur air yang menuju Hujung Galuh, namun tujuan menuju Tuban telah dibuat dengan baik oleh Muhammad Yamin sebagai berikut,



Diambil dari Muhammad Yamin, *Atlas Sejarah*, Jakarta: Djambatan, 1956

Sesungguhnya apa yang membuat Kerajaan Yuan harus bersusah payah menyerang Jawa? Kita akan ikuti narasi pesan kaisar terhadap salah komandan pasukan penyerangan ke Jawa yang tertera dalam *Yuan Shi*,

… 帝曰：「卿等至爪哇，明告其國軍民，朝廷初與爪哇通使往來交好，後刺詔使孟右丞之面，以此進討。」

… Kaisar berkata: “Setibanya di Jawa, kalian harus menyatakan dengan jelas kepada tentara dan penduduk negeri itu bahwa Pemerintahan Kekaisaran sebelumnya telah melakukan kontak dengan Jawa melalui para utusan dari kedua belah pihak. Hubungan ini telah berjalan dengan baik. (tapi) Baru-baru ini mereka telah melukai wajah utusan kaisar yang bernama Meng Qi, dan kalian (harus) datang untuk menghukum mereka akibat perbuatan itu.”

Dari petikan di atas, bisa terlihat bahwa Kublai Khan sangat marah pada raja Jawa, yang tidak disebut siapa nama raja

dan nama kerajaan yang dipimpinnya. Namun, dari kitab pelajaran sejarah Indonesia, kita cukup mengetahui bahwa persetujuan yang disebut di atas adalah persetujuan antara Kublai Khan dengan Raja Kertanegara dari kerajaan Singhasari yang telah berani menggores wajah Meng Qi, utusan kerajaan Yuan. Mengapa dan alasan apa yang membuat Kertanegara mengambil tindakan seperti itu terhadap utusan kerajaan tetangga, mungkin belum banyak diketahui.

Untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang Jawa di abad ke-12 dan apa tujuan pengiriman utusan Kerajaan Yuan di bawah Kublai Khan ke Jawa, akan saya gunakan naskah *Daoyi Zhilue* 島夷志略 (Catatan Ringkas Penduduk Pulau-pulau Barbar), bab tentang “Jawa”, yang juga muncul pada masa dinasti Yuan. Catatan perjalanan yang dihimpun oleh Wang Dayuan ini tidak dapat ditemukan dalam buku terjemahan Groeneveldt karena saat ia mengerjakan terjemahan, ia tidak berhasil mendapatkan catatan tersebut. Wang Dayuan pernah dua kali, yaitu di tahun 1330 dan 1337, turut berlayar mengunjungi beberapa negeri di laut Selatan dan laut Barat. Di dalam naskahnya ia mencatat berbagai hal, terutama hal yang berkaitan dengan kondisi alam, dan hasil bumi tempat-tempat yang ia kunjungi, termasuk Jawa. Catatan yang dibuat oleh Wang Dayuan bila dibaca teliti ada kekeliruan pencatatan nama kaisar pemberi mandat. Wang menyebutkan bahwa Kaisar Dade (1297 – 1307) adalah kaisar yang mengirim utusan Yihei Mishi (Ike Mese), Shi Bi, dan Gao Xing. Dalam sejarah resmi Dinasti Yuan, *Yuan Shi*, jelas tercatat bahwa ketiga utusan tersebut adalah utusan yang dikirim oleh Kublai Khan, dan bukan

oleh Kaisar Dade. Terlepas dari kekeliruan pencatatan ini, berikut ini adalah petikan dari narasi dari bab “Jawa” dalam *Daoyi Zhilue*, yang isinya nyaris tidak pernah diketahui pembaca Indonesia:

爪哇即古闍婆國，……地廣人稠，實甲東洋諸國……其田膏沃，地平行，穀米富饒，倍於他國。……大德 (1297-1307) 年間亦黑迷失、平章史弼、高興曾往其地，令臣屬，納稅貢、立衙門、振綱紀，設鋪兵以遞文書、守常刑、重鹽法、使銅錢。俗以銀錫鑄銅雜鑄如螺甲大，名為銀錢，以權銅錢。地產青鹽，係晒成。胡椒每歲萬斤，……

*Jawa dulu tak lain adalah Zhepo.... Tanahnya luas dan penduduknya padat. Jawa adalah negeri nomor satu di antara negeri-negeri di lautan timur... sawah ladang mereka subur, tanahnya datar, padinya bagus dan melimpah, berkali lipat dibandingkan negeri lain... Kaisar Dade (1297-1307) pernah mengutus Yihei Mishi, Shi Bi, dan Gao Xing pergi ke tanah Jawa. Ia memerintahkan bawahannya ini untuk menarik pajak dan upeti, membuat kantor pemerintahan, mendorong sistem hukum dan tatanan sosial, membuka (pos) tentara untuk menyampaikan dokumen resmi, menjalankan pengawasan hukuman, menekankan regulasi (atas) garam, penggunaan uang tembaga. Kebiasaan orang Jawa adalah mengecor campuran logam perak, timah, tembaga yang dibentuk seperti keong yang ukurannya sebesar tempurung kerang, dan memberinya nama “uang perak”, uang ini lebih disukai ketimbang uang tembaga. Jawa menghasilkan garam yang diperoleh dengan cara menjemur. Lada setiap kali panen mencapai puluhan ribu jin (1 jin = 500 gr), .....*

Dari petikan catatan yang dibuat oleh Wang Dayuan di atas, dapat terlihat bahwa Kerajaan Yuan telah menuntut Jawa melakukan banyak hal, yaitu: membayar pajak, menyerahkan upeti kepada mereka, menggunakan uang tembaga dan beberapa hal lain yang sesuai dengan standar peraturan yang berlaku di Tiongkok kala itu. Kemungkinan besar tuntutan-tuntutan semacam inilah yang menyulut kemarahan Raja Kertanegara hingga ia menggores wajah Meng Qi (Meng Youcheng) dan mengusirnya keluar Jawa. Dari narasi tersebut, juga terbaca bahwa mata uang yang umum digunakan orang Jawa sesungguhnya adalah uang perak, jenis uang yang lebih disukai ketimbang uang tembaga yang umum digunakan di Tiongkok. Hasil bumi Jawa selalu menjadi bagian yang menarik perhatian orang Tiongkok. Dari catatan sejarah sebelum Dinasti Yuan telah didapat informasi bahwa lada memiliki nilai jual yang sangat tinggi, namun perihal garam baru dalam dokumen inilah diperoleh gambaran bahwa urusan garam telah menyita perhatian Kerajaan Yuan, sehingga perlu meminta adanya regulasi garam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Informasi tentang suatu negeri asing berikut kekayaan alam, kondisi pemerintahan, dan adat istiadatnya menjadi pegangan penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari tentang negeri tersebut, termasuk suatu pemerintahan negeri asing yang ingin berkunjung ke tempat tertentu. Dari dokumen-dokumen klasik Tiongkok sebelum masa dinasti Yuan, yaitu masa dinasti Han hingga Tang belum diketahui pasti posisi geografis dan jarak tempuh perjalanan laut

dari Tiongkok ke tanah Jawa. Hadirnya dua naskah masa Dinasti Song, yaitu *Sejarah Dinasti Song* dan *Zhufanzhi*, melengkapi banyak hal yang tidak dicatat dalam dokumen masa Dinasti Tang. Di dalamnya tidak hanya hadir deskripsi posisi geografis Jawa yang lebih rinci dengan jarak tempuh dan jalur lintasannya, di dalam naskah juga tergambar kekayaan alam, adat istiadat, pemerintahan, dan hubungan bilateral.

Tiongkok memiliki tradisi mencatat yang kuat, sudah dimulai sejak sebelum masehi hingga sekarang. Mereka terbiasa mencatat semua informasi, baik yang diceritakan maupun yang dilihat sendiri dengan baik. Cara seperti ini di kemudian hari akan bermanfaat untuk orang Tiongkok sendiri, karena bisa menjadi rujukan mereka saat memerlukan data tentang negara lain. Oleh karena itu, pengetahuan tentang negara lain seperti ini selalu mendapat perhatian mereka, disimpan dengan baik, dan dilestarikan dari masa ke masa oleh para pemimpin di Tiongkok.

Dokumen-dokumen Tiongkok yang mencatat Jawa dan pulau-pulau penting di Nusantara, bisa disebut cukup lengkap, dan bisa sangat membantu memperkaya sejarah Indonesia. Kebanyakan dari

Catatan itu berupa catatan di bidang budaya, kekayaan alam, kondisi pemerintahan setempat dan hubungan bilateral. Kondisi budaya yang berbeda dengan Tiongkok, membuat daya tarik tersendiri bagi sejarawan Tiongkok. Hasil bumi juga mendapat perhatian besar, karena informasi hasil bumi yang didapat bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan barter niaga. Catatan seperti ini boleh dikatakan merupakan pengetahuan yang agak terabaikan dan tidak didokumentasikan den-

gan baik di masa lalu oleh para sejarawan Indonesia. Dengan demikian catatan seperti ini bisa menjadi sumber informasi yang penting untuk menggali dan melengkapi hal yang tidak ada dalam catatan sejarah Indonesia.

Menilik pentingnya membedah catatan yang dihimpun oleh sejarawan atau pengelana asing, dalam hal ini Tiongkok, studi tentang naskah Cina, baik di masa lalu maupun sekarang menjadi hal yang tak dapat diabaikan dan perlu mendapat perhatian serius. Mengungkap apa yang sesungguhnya terekam dalam naskah-naskah tersebut bisa membantu meluruskan dan melengkapi banyak hal yang belum terekam dalam sejarah kita. Untuk mendukung studi ini diperlukan pengetahuan bahasa Cina yang baik, karena sejarah masa lalu yang direkam dalam dokumen klasik Cina semuanya ditulis menggunakan bahasa klasik atau *wenyan*, sementara bahasa Mandarin modern yang digunakan dalam catatan masa kini, menggunakan bahasa tulis formal yang memerlukan kemampuan bahasa yang tinggi dan teliti pula. Sudah waktunya mendorong akademisi yang berkecimpung dalam studi Cina memperdalam pengetahuan bahasa Cina klasik (*Wenyan*) maupun modern (*Putonghua*) dengan sungguh-sungguh, sehingga naskah-naskah penting dari Tiongkok yang mengandung berbagai informasi berharga bisa dikaji dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Primer

*Hou Han Shu* (Kitab Sejarah Dinasti Han Akhir後漢書), bab 6

*Hou Han Shu* (Kitab Sejarah Dinasti Han Akhir後漢書), bab 116

*Foguo Ji* (Catatan Negara-Negara Budhis佛國記), karya Fa Xian

*Song Shu* (Kitab Sejarah Dinasti Song宋書), bab 97

*Jiu Tang Shu* (Kitab Sejarah Dinasti Tang Lama舊唐書), bab 197

*Xin Tang Shu* (Kitab Sejarah Dinasti Tang Baru新唐書), bab 222, bagian ke-2

*Song Shi* (Sejarah Dinasti Song宋史), bab 489

Wang Dayuan 汪大淵, “Jawa (爪哇條)”, dalam *Daoyi Zhilue* (島夷志略)

Zhao Rukuo 趙汝适, “Jawa (閩婆國條)”, dalam *Zhufanzhi* (諸蕃志)

Zhao Rukuo 趙汝适, “Sujidan”, dalam *Zhufanzhi* (諸蕃志)

### Sumber Pendukung

Chen, Jiarong, Xie Fang, Lu Jinling (2002). *Gudai Nanhai Diming Huishi* (古代南海地名汇释). Beijing: Zhonghua Shuju

Falang (Ferrand), Feng Chengjun (transl) (1965). *Kunlun ji Nanhai Gudai Hanghangkao*. (崑崙及南海古代航行考). Taipei: Taiwan Shangwu Yinshuguan

Feng, Chengjun (1976). *Zhongguo Nanyang Jiaotongshi*, (中國南洋交通史). Taipei: ShangwuYinshuguan

Groeneveldt (2009). *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Jakarta: Komunitas Bambu

Liang Liji (2012). *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Munandar, Agus Aris (2008), *Ibukota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian*, Jakarta: Komunitas Bambu

Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto (1984), *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta: Balai Pustaka

Wen, Guangyi, Cai Renlong (1985). *Yindunixiya Huaqiaoshi* (印度尼西亞華僑史). Beijing: Haiyang Chubanshe.

Wuryandari, Nurni W, (2013). “Jalur Proto Globalisasi Cina-Jawa: Membaca Ulang Sumber Klasik Cina,” dalam *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization”* (hlm: 184-193)

Zhang, Yishan, (1994) *Dongnanyashi Yanjiu Lunji* (東南亞史研究論集). Taipei: Taiwan Xuesheng Shuju

# Menakar Validitas Sejarah: Kondisional Golongan Geneologis Istana Pagaruyung di Sumatera Barat

Nopriyasman  
Universitas Andalas  
nopriyasman@yahoo.com

**ABSTRAK** - Artikel ini memfokuskan penganalisaan pada faktor kondisional golongan geneologis dari Kerajaan Pagaruyung, khususnya pada persoalan wibawa kharismatik Raja Pagaruyung, validitas Lembaga Raja dan Pemangku Raja Alam Pagaruyung. Pembahasan dilakukan berdasarkan metode sejarah, meliputi empat tahapan yaitu *heuristik*, kritik, interpretasi, dan penulisan. Sumber data meliputi artikel dan berita di koran, peristiwa, dokumen dan buku-buku. Validitas data digunakan kritik sumber, baik secara interen atau pun eksteren, dan memakai teknik analisa interpretatif untuk mendapatkan makna historis. Berdasarkan kajian tersebut, didapatkan gambaran, bahwa wibawa kharismatis Raja Pagaruyung ditentukan oleh kiprah dan peran politik, sosial dan budaya kalangan keturunan kerajaan sepanjang sejarah. Sementara takaran validitas geneologi Pagaruyung kontemporer ditentukan oleh peran para ahli waris kerajaan mengaktualisasikan geneologi mereka dalam bingkai sejarah kerajaan dan budaya Minangkabau, serta meredam ketidakpercayaan masyarakat terhadap blok historis mereka.

**KATA KUNCI** - *validitas sejarah, geneologi, dan Kerajaan Pagaruyung*

**ABSTRACT** - This article focuses on the analysis of the factor geneacological group of the Pagaruyung Kingdom, especially on the issues of the charismatic authority of his Excelency King, the validity of his Institutional King and Pagaruyung Kingdom. The discussion is based on the four stages of the historical method, that is heuristics, criticism, interpretation, and writing. The sourche of data obtained from newspaper, events, documents, and books. The validity of the data used the ciritics of source (the intern and extern critics) and the techhniques of the interpretative analysis to get its historical meaning. Based on the study, it was found that the charismatic authority of his Excelency King was determined by the gait and political, social and cultural role of the royal descendants throughout its history. Meanwhile, the dose of contemporary geneology of Pagaruyung validity is determined by the role of royal heirs to actualizes their geneology in the frame of the history of the Kingdom and Minangkabau culture, and to muffle public distrust of their historical blocs.

**KEYWORDS** - *validity of history, geneacological, and Pagaruyung Kingdom*

## PENDAHULUAN

“**O**gni vera storia e storria contemporanea” (Sejarah yang benar adalah sejarah masa kini), begitu ungkapan Benedetto Croce

(1927) untuk menggambarkan keberlakuan cerita sejarah. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini begitu besar, karena bisa berarti cerita realitas yang ditampilkan di pentas sejarah bisa berterusan

(kontinuitas), tetapi juga bisa tenggelam (diskontinuitas). Hal ini bisa terjadi berelasi dengan diri “pencerita” (penulis), dan berbagai kondisional yang melingkupinya, seperti ikatan budaya dan zaman yang dilalui para penulis, yang di dalamnya juga terlibat pengalaman para pelaku sejarah. Sejarah “as actuality” (sebagaimana diceritakan) memang bertendensi subjektif, yang kadang kala meskipun para penulis sejarah akademik sudah punya perangkat teori metodologis untuk membedah peristiwa sejarah, namun sesungguhnya tidak sepenuhnya bebas dari kadar subjektivitas itu. Dalam perpektif keilmuan, sejarah objektif itu (sebagaimana sesungguhnya terjadi, *wie es eigentlich gewesen*) hanya ada apabila ia belum direkonstruksi ulang.

Potensi kehadiran subjektivitas sejarah, di satu sisi menimbulkan permasalahan legitimasi dan validitas peristiwa, yang sering kali mengarah kepada kontroversi. Dalam pandangan sejarah, hal ini lumrah saja, mengingat fakta historis itu memiliki tingkatan kekuatannya pula, mulai dari yang paling kuat dan tidak terbantahkan (*hard fact*), fakta turunannya (*cold fact*), sampai kepada tingkatan inferensi, dan tingkatan opini. Dua tingkatan fakta terakhir terbuka untuk selalu diperdebatkan, dan kekuatan kebenarannya terletak pada argumentasi dan kesimpulan berdasarkan kekayaan sumber sejarah yang dipergunakan, sehingga cerita peristiwa sejarah itu pada suatu masa menjadi “benar”, dan pada masa yang lain lahir perspektif baru lagi disebabkan adanya *novum* (temuan bukti baru).

Dalam hubungan sejarah Kerajaan Pagaruyung, yang menjadi perbincangan dalam tulisan ini, situasi kondisional tersebut

juga berlaku terhadap eksistensi dan peran lembaga raja dan kerajaan. Apalagi mengingat perjalanan zaman yang secara historis bergerak secara dinamis. Ada banyak faktor yang memengaruhi perjalanan sebuah kerajaan, sehubungan dengan persinggungannya dengan jiwa zaman dan budaya yang berlaku, khususnya di Minangkabau. Untuk sekedar contoh, pengembangan faham demokrasi berpengaruh pada institusi raja yang bersifat hirarkis dalam hubungan sosialnya. Begitu juga pembaharuan administrasi dan birokrasi telah banyak menghilangkan peran pemangku kelembagaan raja di tingkat lokal Minangkabau dan lokal-lokal lainnya di Indonesia. Semua itu, berpengaruh pula pada pandangan kesejarahan terhadap kelembagaannya. Belum lagi adanya fenomena realitas yang memperlihatkan para kerabat kerajaan Pagaruyung memperdebatkan tingkat legitimasi dari keturunannya, dan mengklaim diri sebagai yang berhak sebagai pewaris “tahta” dari lembaga kerajaan Minangkabau.

Artikel ini lebih fokus pada penganalisaan pada faktor kondisional golongan geneologis dari Kerajaan Pagaruyung, terutama pada persoalan pengaruh dinamika kejadian di sekitar lembaga raja dan kerajaan Pagaruyung yang berakibat pada mudarnya wibawa kharismatis. Kemudian didiskusikan pula di sekitar persoalan validitas lembaga raja dan pemangku Raja Alam Pagaruyung itu. Bagaimanakah eksistensi golongan geneologis (ahli waris) Kerajaan Pagaruyung kontemporer tersebut di Sumatera Barat.

Menakar merupakan kata kerja yang mengacu kepada “ukuran”, sedangkan validitas merujuk pada keadaan kesahihan yang berdasarkan bukti dan logika ber-

pikir, yang dalam hal ini berkaitan dengan logika berpikir historis (sejarah). Menakar validitas sejarah dalam kaitan tulisan ini ditujukan pada logika berpikir kesejarahan tentang fenomena legitimasi golongan geneologis Istana Pagaruyung yang muncul ke pentas sejarah kontemporer. Meskipun demikian, tulisan ini tidak berpretensi untuk menjustifikasi klaim para pihak tentang pewaris keturunan dari Kerajaan Pagaruyung. Uraian hanya mengetengahkan berbagai fenomena kesejarahan yang terjadi, seperti versi-versi di sekitar polemik pemangku raja, silsilah keluarga, dan posisi kerajaan dalam adat dan budaya dan sejarah Minangkabau. Dari berbagai versi dan argumen, serta sumber yang ditampilkan, terdapat realitas begitu banyak orang Minangkabau yang berusaha membuktikan dirinya bahwa mereka mempunyai kaitan keturunan dengan Pagaruyung.

Gagasan tentang validitas kesejarahan golongan geneologis Kerajaan Pagaruyung yang menjadi latar belakang hadirnya tulisan ini, tidak terlepas dari pernyataan “Pengurus ‘Lembaga PASTI: Sejarah Minangkabau Perlu Diluruskan”, dalam *Haluan*, pada tanggal 20 Maret 2007. Dalam tulisannya Lembaga PASTI meragukan jabatan Taufiq Thaib sebagai keturunan yang berhak menjadi Raja Pagaruyung. Oleh sebab itu, mereka tidak mengakui penerus Raja Pagaruyung yang ada dewasa ini. Bagi lembaga ini, sebagaimana yang dinyatakan ketuanya Aris Syofyan, sejak Sultan Alam Bagagarsyah tidak ada lagi penerus Raja Pagaruyung. Pernyataan ini dibantah oleh Taufiq Thaib, dengan menampilkan penjelasan tentang silsilah keuangannya, dan dimuat dalam harian yang sama, *Haluan* pada tanggal 22 Maret 2007.

Tanggapan Taufiq Thaib itu berjudul “S.M. Taufiq Thaif: Silsilah Keluarga Kami Sangat Jelas”.

Rusli Amran dalam bukunya berjudul *Padang Riwayatmu Dulu* (1991) menyebutkan bahwa memang banyak orang Minangkabau yang ingin mengaitkan keturunannya dengan Pagaruyung. Faktor ini menjadi salah satu sebab diragukannya keturunan-keturunan dari Kerajaan Pagaruyung tersebut, sejak era wafatnya Sultan Alam Bagagarsyah. Apalagi proyeksi aristokrasi tanpa raja telah dilakukan oleh Van den Bosch sejak dikeluarkannya “Plakat Panjang” pada tahun 1833 dan dimulainya dominasi kolonial Belanda di bumi Minangkabau. Proyeksi tanpa raja itu dapat dilihat dalam buku Rusli Amran (1981) berjudul *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*.

Beberapa karya tersebut membantu penjelasan tentang kondisi geneologis Pagaruyung pada masa kontemporer. Jane Drakard (1988), dalam *A Kingdom of Words Language and Power in Sumatra*, mengungkapkan bahwa lembaga Kerajaan Pagaruyung bukanlah suatu yang aktif, tetapi lebih sebagai simbol kerajaan dalam ciptaan “kata-kata”. Karya-karya di atas tentu saja berguna secara ontologis di sekitar asal usul dan posisi kerajaan. Secara epistemologis memberikan pengetahuan tentang dinamika Kerajaan Pagaruyung sepanjang sejarah dan secara aksiologis berguna untuk pemaknaan istana dewasa ini, sehingga didapatkan kesepahaman mengapa persoalan legitimasi atau validitas keturunan Pagaruyung tersebut pada era kontemporer terus menerus berada dalam posisi kontroversi.

## KONDISIONAL LEMBAGA RAJA DAN EKSISTENSI GOLONGAN GENEOLOGIS PAGARUYUNG

### 1. Memudarnya Wibawa Kharismatis Raja Pagaruyung

Kepentingan politik kekuasaan dan penerapan kebijakan pembaruan yang dilakukan perangkat pendukung pemerintah berpengaruh luas pada posisi dan kedudukan kaum geneologis adat dan kerajaan di Minangkabau. Ada kalanya pengaruh itu membawa akibat semakin terpinggirkannya kelompok sosial mereka, sehingga kaum geneologi terpaksa melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian terhadap gerakan kemajuan tersebut. Hidup berkerajaan sebagaimana yang dilakukan nenek moyang sebelum Indonesia merdeka, atau pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara dahulunya tentu tidak memungkinkan lagi, seiring berubahnya zaman. Kondisi ini jelas meminggirkan kehadiran mereka, bahkan menjadi hilang atau hanya sebagai pendukung politik pemerintah yang berkuasa.

Dahulu, lingkungan istana atau pusat kerajaan memberikan gambaran terhadap puncak peradaban kerajaan. Di lingkungan istana berkembang berbagai corak seni, sastra, dan hiburan kenegaraan lainnya. Berbagai upacara kerajaan menjadi simbol kejayaan dan kebesaran kerajaan. Begitu juga agama melegitimasi terintegrasinya raja dengan rakyat. Agama menjadi perekat keberagaman dalam suatu kepentingan dan kesepakatan bersama. Dasar kekuasaan raja, mulai diambil alih oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan menjadikan kaum kerajaan sebagai mesin birokrasi dan berada dalam jajaran

pendukung politik pemerintah.<sup>1</sup> Tindakan politik kolonial ini diberlakukan di berbagai pelosok negeri di Hindia Belanda, termasuk di Minangkabau. Belanda berhasil menciptakan pemerintahan yang bersifat aristokrasi di Minangkabau dengan dikeluarkannya “Plakat Panjang” bulan Oktober 1833. Salah satu isinya adalah mengenai pengabdian pemimpin Minangkabau (baca raja) pada Belanda, dan gaji yang diberikan pemerintah kolonial kepada raja.<sup>2</sup>

Penggerusan wibawa Raja Pagaruyung tersebut tidak saja terjadi karena tindakan politik Pemerintah Kolonial Belanda, tetapi juga oleh tindakan kaum revolusioner agama pada awal abad ke-19. Tujuan awal dari pemurnian agama Islam itu hendak menghapuskan pengaruh adat Minangkabau, pengaruh Raja Pagaruyung, dan pengaruh aliran Syi’ah.<sup>3</sup> Salah satu tindakan yang “menghapus” pengaruh Kerajaan Pagaruyung adalah pembunuhan terhadap anggota keluarga kerajaan, termasuk *basa* empat balai, di Koto Tangah (1809). Meskipun Yang Dipertuan Minangkabau (Sultan Muningsyah) berhasil lolos dan berlindung di Kuantan, namun sejak saat itu wibawa politik Pagaruyung tidak pernah bangkit lagi.<sup>4</sup> Sultan Muningsyah tidak pernah lagi menduduki istananya sampai ia meninggal 1 Agustus 1925.

Kedudukan Raja Pagaruyung muncul

1 Nopriyasman, “Peranan Institusi Raja Dalam Masa Kemerdekaan di Indonesia”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sejarah Borneo Ke-3 dengan “Tema : Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Hubungannya dengan Kesultanan Brunei” di Brunei Darussalam pada tanggal 27-19 Agustus 2013, hlm. 2.

2 Isi lengkap perjanjian Plakat Panjang dapat diikuti dalam Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985), hlm. 15 – 19.

3 H. Mahmud Junus, *Sedjarah Islam di Minangkabau*. (Djakarta: CV Al-Hidajah, 1971), hlm. 5.

4 M.D. Masoer, *Sedjarah Minangkabau* (Djakarta: Bhratara, 1970), hlm. 124.

kembali, ketika Belanda mengangkat Sultan Alam Bagagarsyah (1789 – 1849) sebagai *Hoofdregent* Minangkabau (1823) dengan gelar Raja Alam Minangkabau.<sup>5</sup> Dua tahun kemudian, status Sultan ini diturunkan lagi menjadi Regen Tanah Datar. Pengaruh kerajaan dan rajanya di Minangkabau menjadi tidak berfungsi, dalam arti tidak ada lagi keputusan tertinggi yang diputuskan Raja Alam Pagaruyung.<sup>6</sup>

Keberadaan kelompok sosial kerajaan semakin hilang, terutama pasca ditangkap dan dibuangnya Sultan Alam Bagagarsyah ke Batavia pada tahun 1833. Kondisi ini diperparah oleh sedikitnya buku-buku yang menyinggung soal keberadaan mereka. Keberadaan mereka juga tidak muncul ketika proklamasi menggema di Indonesia (1945). Pada umumnya, golongan geneologis adat dan “pohon keluarga” Pagaruyung kalah pengaruh oleh elit moderen Islam yang berpendidikan sekuler dan berpendidikan Islam modern. Meskipun demikian, keinginan untuk *eksis* kembali di tengah masyarakat tidak pernah padam. Namun situasi dan kondisi Minangkabau belum memungkinkan, sebagai akibat dari pergolakan daerah tahun 1950-an, yang berujung pada lahirnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (1958 – 1961).

Pasca PRRI, kesempatan untuk membangkitkan kebesaran adat Minangkabau mulai terbuka melalui peninggalan kebudayaan lama sedikit demi sedikit mendapat bentuknya. Hal ini sejalan den-

gan kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Orde Baru yang sedang mencari simbol-simbol budaya untuk dijadikan penopang kekuasaan di daerah. Dalam konteks pencarian simbol budaya itu, Istana Basa Pagaruyung dibangun pemerintah (27 Desember 1975). Jadi kehadiran Istana Pagaruyung kontemporer erat kaitannya dengan strategi membangun Minangkabau yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dalam ideologi kaum geneologi orang Minangkabau, penguatan identitas Minangkabau memerlukan pelestarian kebudayaan dan fungsi-fungsi tradisional dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau.<sup>7</sup>

Ideologi ini sejalan dan disesuaikan dengan keinginan pemerintah, sehingga kaum geneologis secara politik budaya mulai mendapat tempat kembali. Mereka berusaha menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan kebangsaan, sehingga membantu upaya membangkitkan kembali lembaga kerajaan yang sudah tenggelam. Prakarsa penguatan kelembagaan raja itu dilakukan oleh organ Kerajaan Pagaruyung yang dipelopori oleh Sultan M. Taufiq Thaib, yang diberi nama “Lembaga Pucuk Adat Alam Pagaruyung (LPAAM)”. LPAAM diketuai oleh Fadlan Maalip, Tuanku Bosa XIV. Eksistensi mereka didukung pula oleh “Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Kelompok keturunan Raja Pagaruyung di bawah Sultan Taufiq Thaib, secara politik budaya diakui sebagai yang memiliki ‘hak waris’ istana oleh pemerin-

5 Gusti Asnan, “Penjajahan Belanda di Sumatera Barat dan Migrasi Orang Minangkabau ke Tanah Semenanjung”, dalam Gusti Asnan dan Zulkarnain (Ed.), *Persembahan 70 Tahun Prof. Suwardi MS Mengabdikan Ilmu dan Profesi Sejarah Demi Daerah dan Bangsa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 11.

6 Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 153.

7 Nopriyasmann, “Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung Sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”, *Disertasi* (Denpasar: Universitas Udayana, 2011), hlm. 185). Lihat juga Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangan Tinjauan Tentang Kerapatan Adat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.190 – 197.

tah dan pihak belahannya di rantau. Pada tahun 2015, posisi dan legitimasi mereka terusik dengan munculnya klaim dari Sultan Muchdan Taher Bakrie, yang menashihkan dirinya sebagai Sultan Alam Bagagarsyah Yang Dipertuan Daulat Raja Alam Pagaruyung Minangkabau. Kelompok terakhir ini mengklaim bahwa dirinya yang paling berhak atas tahta sebagai generasi ke-5 penerus kerajaan. Posisi kelompok ini juga mendapat dukungan dari Limbago Kerajaan Rajo Tigo Selo.<sup>8</sup>

## 2. Validitas Lembaga Raja dan Pemangku Raja Alam Pagaruyung

Kehadiran istana di Minangkabau pada era kontemporer memunculkan persoalan baru, 'ada kerajaan tentu ada istana, dan ada istana tentu ada raja'.<sup>9</sup> Persoalan utama menyangkut legitimasi siapa yang berhak duduk sebagai pemangku raja dalam kelembagaan raja Pagaruyung, yang dikenal dengan *rajo tigo selo* (Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat). Kondisi menjadi sulit, karena realitas raja dan kerajaannya dalam waktu yang cukup lama sudah tenggelam dalam peredaran sejarah Minangkabau. Pemikiran tentang istana lebih banyak ada dalam memori kolektif masyarakat Minangkabau.

Bangunan Istana Pagaruyung sudah beberapa kali dilalap api, diantaranya kejadian yang diperkirakan pada tahun 1815, pada masa gerakan kaum Wahabi dan Perang Paderi. Thomas Stamford Raffles

(Juli, 1817) melaporkan, Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan memang pernah beberapa kali bangkit menjadi kota yang megah. Namun setelah kebakaran tahun 1815, Pagaruyung tidak pernah pulih lagi dari kehancurannya. "Sang pangeran, yang tidak mampu lagi bertahan melawan para penentangannya, telah melarikan diri ke tempat yang jauh...", demikian dilaporkan.<sup>10</sup> Sebaliknya, Nahujs malahan menyebut Istana Pagaruyung sebagai "gubuk kayu yang buruk", artinya Istana Pagaruyung itu tidak lebih megah dari rumah-rumah lainnya.<sup>11</sup> Meskipun demikian, ketika Istana Basa Pagaruyung mulai dibangun 27 Desember 1975 oleh Harun Zein, hampir semua pihak memperlihatkan persetujuannya. Zulfahmi Dt. Rajo Putih dalam suatu kesempatan wawancara dengan penulis pada tanggal 8 Desember 2010 berkomentar, "*Rancaklah* (baguslah) sejarah dan budaya lama itu hidup dan lestari, tetapi perlu pula dikaji sampai kapan dan sampai dimana kehidupan beraja di Minangkabau".<sup>12</sup>

Dasar pembangunan Istana Pagaruyung pada waktu itu adalah citra agung sejarah, sehingga istana yang dibangun bernuansa nostalgia kejayaan, dan kebesaran Pagaruyung. Secara perlahan-lahan istana Pagaruyung dijadikan simbol Minangkabau, lambang-lambang kebesaran Minangkabau pun mulai dibangkitkan. Begitu juga keperluan adanya seorang raja untuk

<sup>10</sup> Anthony Reid, *Sumatera Tempo Doeloe dari Marcopolo sampai Tan Malaka* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 208.

<sup>11</sup> Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau* (Jakarta: Freedom Institute, 2010), hlm. 81.

<sup>12</sup> Nopriyasman, *op.cit.*, hlm. 375. Bila ditafsirkan pernyataan ini, Dt. Rajo Putih memperlihatkan sikap kenetralannya, sehingga yang dikedepankan adalah azas manfaat bagi kepentingan daerah dan masyarakat Sumatera Barat terkait keberadaan kelembagaan raja dan istana di Sumatera Barat.

<sup>8</sup> Buku *Duli Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Muchdan Taher Bakrie Gelar Sultan Alam Bagagarsyah Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung Minangkabau* (Tanpa Tempat dan Penerbit, 2017), hlm. 87 – 103.

<sup>9</sup> Wisran Hadi, "Istana Pagaruyung Icon Feodalisme", dalam Padang Ekspres (Padang: 7 Maret 2007)

otoritas atau legitimasi anugerah gelar-gelar kehormatan adat. Gelar-gelar ini dapat pula menjadi strategi penaikan status sosial dan kepentingan kekuasaan secara politis.

Dalam hubungan kebutuhan kepentingan berlabel modal budaya, hadir lagi Istana Silindung Bulan. Pembangunan Istana Silindung Bulan (peletakan batu pertama 31 Agustus 1987 dan diresmikan 21 – 23 Desember 1989) dimaksudkan agar keberadaan pewaris kerajaan tetap eksis dan terlihat dalam praktik kehidupan budaya di Minangkabau. Istana Silindung Bulan dibangun atas inisiatif keluarga ahli waris Kerajaan Pagaruyung, yang didukung oleh Azwar Anas (Gubernur Sumatera Barat pada waktu itu), Aminuzal Amin, serta Muchdan (pengusaha). Mereka mempunyai kaitan kekerabatan dengan Pagaruyung. Pada tahun 2015, Muchdan menyatakan diri, sebenarnya dialah yang berhak sebagai penerus Raja Alam Pagaruyung.

Meskipun selama Orde Baru, kemudian reformasi, Istana *Basa* Pagaruyung lebih sebagai representasi pemerintah, tetapi penggunaan nama Pagaruyung pada Istana *Basa* memperkuat kedudukan kerabat istana.<sup>13</sup> Apalagi kehidupan yang bersifat aristokrat memang ada dalam praktik budaya Minangkabau. Menurut Alis Maradjo Dt. Sori Maradjo, dari 520 buah *nagari* yang dikaji oleh Pusat Kajian Adat Minangkabau Universitas Andalas, didapat data bahwa 302 buah *nagari* ditata berdasarkan sistem Koto Piliang. *Nagari* yang ditata menurut adat Bodi Caniago (musyawarah dan mufakat dari para penghulu) yang egaliterian hanyalah 120 buah *nagari*. Sisanya terbagi antara bentuk Pariangan (68 buah *nagari*) dan bentuk Pagaruyung (30 *naga-*

*ri*).<sup>14</sup> Dalam situasi politik kebudayaan pemerintahan, dapat dipahami menyebabkan salah satu blok historis keturunan kerajaan yang 'terkuat' adalah kerabat Istana Silindung Bulan, atau garis kekerabatan Sultan Taufiq Thaib.

Pada Era kemerdekaan, terlebih sejak Orde Baru, elit strategis memang semakin berperan penting di panggung politik Indonesia. Istana yang semula dimaksudkan oleh Harun Zein (Gubernur Sumatera Barat, 1966 – 1977) sebagai salah satu poin membangkitkan harga diri orang Minangkabau. Maka sejak Orde Baru itu mulai bergeser pengertiannya sebagai identitas, sekaligus sebagai pengukuhan "bangsawan" Minangkabau. Faktor penguatnya adalah historisitas kerajaan, praktik budaya, dukungan kelembagaan, dan identitas kemelayuan. Keinginan Harun Zein tersebut sebagian besar sudah terwujud, khususnya dalam konteks politik kebudayaan. Namun situasi dan jiwa zaman dari waktu ke waktu terus mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Orde Baru berbeda dengan Reformasi (dimulai 1998) yang diiringi oleh sifat keterbukaan yang lebih luas, khususnya menyangkut informasi publik. Dalam zaman reformasi dan otonomi, semakin terbuka untuk keluarga yang belum muncul menjadi muncul, atau sebaliknya yang sudah eksis semakin dikritisasi. Itulah yang terjadi dalam melihat fenomena keberadaan lembaga Raja Alam Pagaruyung di Sumatera Barat. Posisi dan legitimasi yang selama ini dipegang oleh blok historisnya mulai tergerus seiring perkembangan zaman.

14 Saafroedin Bahar, Mohammad Zulfan Tadjoeidin, *Masih Ada harapan Posisi Sebuah Etnis Minoritas dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Yayasan Sepuluh Agustus, 2004), hlm. 85.

13 Nopriyasman, *op.cit.*, hlm. 268

Sesungguhnya, fenomena lembaga Raja Alam Pagaruyung mulai marak diperbincangkan sejak tahun 2002, yang ditandai adanya upaya membangkitkan kembali lembaga raja dan kelembagaan raja Pagaruyung yang tenggelam selama ini. Pada tanggal 29 Mei 2004 melalui musyawarah Lembaga Adat Alam Minangkabau di Balai Jariang, Luhak Limapuluh Kota muncul Sutan Muhammad Taufiq Thaib Tuanku Mahkota Alam sebagai pemangku Daulat Yang Dipertuan Rajo Syah Alam Minangkabau.<sup>15</sup>

Organ kerajaan atau lembaga raja pada era kontemporer ini bernama Lembaga Pucuk Adat Alam Minangkabau (LPAAM). Organ ini terbentuk pada tanggal 22 Februari 2002. Pada tanggal 11 Oktober 2008 dibentuk Badan Pekerja LPAAM yang bertugas menyelenggarakan kegiatan LPAAM menurut adat, dan memelihara dan memasarkan Istana Silindung Bulan sebagai objek wisata.<sup>16</sup> LPAAM mempunyai misi untuk (1) menggali nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau; (2) mensosialisasikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau; (3) memberdayakan pemangku adat; dan (4) mengawal pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau yang sesuai dengan *Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK)*. Dalam menjalankan tugas tersebut, LPAAM bersinergi dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam

<sup>15</sup> Sultan Muhammad Taufiq Thaib Tuanku Mudo Mahkota Alam yang memangku jabatan Raja Alam Pagaruyung adalah seorang Sarjana Hukum, dan pernah menjadi anggota DPR RI. Taufiq Thaib meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2018 dan digantikan oleh Sultan M. Farid Thaib Tuanku Abdul Fattah, yang dinobatkan tanggal 29 September 2018. Prosesi dilaksanakan di Istana Silindung Bulan, Batusangkar.

<sup>16</sup> BP-PAAM, *Direktori Minangkabau Tahun 2012* (Batusangkar: Badan Pekerja Pucuk Adat Alam Minangkabau Istana Silindung Bulan-Lembaga Pucuk Adat Alam Minangkabau, 2012), hlm. 814.

Minangkabau (LKAAM), dan lembaga Bundo kanduang.<sup>17</sup>

Kebangkitan lembaga raja dan kerajaan Pagaruyung dalam era globalisasi, yang diejawantahkan melalui LPAAM menimbulkan reaksi sebagian elit dan kelompok masyarakat Minangkabau. Ada yang berpendapat, memunculkan kembali Kerajaan Pagaruyung bersifat anakronistik, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi suatu ironi dalam demokrasi Minangkabau. Pendapat lainnya adalah kebangkitan raja di Minangkabau memberi pertanda munculnya neo-feodalisme di Minangkabau (Sumatera Barat).<sup>18</sup>

Reaksi yang cukup luas terhadap keberadaan organ Kerajaan Pagaruyung, justru terletak pada persoalan validitas pemangku “Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung”. Persoalan validitas di sekitar siapa yang berhak duduk di lembaga raja, khususnya Raja Alam Pagaruyung menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga dewasa ini. Rusli Amran sudah sejak lama mensinyalir keadaan ini melalui pernyataan berikut ini:

”Silsilah keturunan Pagaruyung banyak sekali. Tidak sedikit orang Minang ingin membuktikan asal Pagaruyung. Oleh karena tujuan ini, masing-masing hanya menonjolkan kelompok keturunannya saja. Nama-nama pun sering berlainan. ... Menurut Adat, keturunan raja-raja Pagaruyung asli hanyalah mereka yang kedua orang tuanya mempunyai darah salah satu dari Rajo Nan Tigo Selo. Kalau begitu, maka raja-raja asli terakhir dan yang sempat hidup di abad ke-20, ialah St. Alam Bagagarsyah dan Tuan

<sup>17</sup> *Ibid.*, 815.

<sup>18</sup> Nopriyasman, *op.cit.*, hal. 437.

Gadis (Reno Sumpu)”<sup>19</sup>.

Pernyataan ini didasari pada laporan asisten Residen Tanah Datar yang memuat nama kedua tokoh itu. Keluarga-keluarga yang merasa mempunyai kaitan dengan Pagaruyung setelah kemerdekaan, sedapatnya mengaitkan silsilahnya dengan keturunan terakhir tersebut (St. Alam Bagagarsyah dan Tuan Gadis Reno Sumpu). Sultan Muhammad Taufiq Thaib Tuanku Mudo Mahkota Alam sebagai Daulat Yang Dipertuan Pagaruyung membuat dan menyatakan susunan silsilahnya sebagai raja Pagaruyung dari Puti Reno Sumpu sebagaimana tersebut di atas.<sup>20</sup>

Kemunculan Sultan Muhammad Taufiq Thaib sebagai Raja Pagaruyung menimbulkan reaksi penolakan dari kelompok sosial dan keluarga lain yang juga punya keterkaitan historis-geneologis dengan Alam Bagagarsyah. Bagi yang kontra berargumen bahwa Sultan Alam Bagagarsyah tidak pernah menunjuk putra mahkota. Azwar Anas, yang dahulunya sejalan dengan Taufiq Thaib bereaksi menyebut pemegang jabatan Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung dewasa ini, hanyalah untuk memperoleh martabat selaku Raja Alam Pagaruyung.<sup>21</sup> Aris Syofyan dari lembaga PASTI, menyatakan perlu pengkajian yang mendalam terhadap keabsahan Tau-

fiq Thaib sebagai pewaris Raja Alam Pagaruyung.<sup>22</sup>

*Counter* legitimasi keabsahan jabatan Raja Alam yang dimuat koran *Haluan* tanggal 20 Maret 2007 itu kemudian dijawab oleh Sultan Muhammad Taufiq Thaib di koran yang sama tanggal 22 Maret 2007 dengan menyatakan bahwa, ”...Silsilah keluarga kami sangat jelas”.<sup>23</sup> Setelah itu, debat keabsahan tersebut untuk sementara ”diam”. Pemerintah Daerah sendiri ”mengakui” keberadaan pewaris raja ini (walaupun terkadang juga berperilaku mendua), yang ditandai oleh ditan-datanganinya surat perjanjian pemberian hak pakai tanah *pusako* (pusaka tinggi) untuk pembangunan kembali replika Istana Pagaruyung setelah bencana kebakaran Istana Basa Pagaruyung pada 27 Februari 2007. Surat Perjanjian tersebut dengan jelas mencantumkan bahwa mereka berasal dari kaum ahli waris Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung, sementara dalam *Surat Perjanjian Hak Pakai Tanah Pusako* (1 Nopember 1975), teks ”Daulat Yang Dipertuan Rajo Alam Pagaruyung” tidak tercantum sama sekali.

Legitimasi Sultan Muhammad Taufiq Thaib kembali digugat di Minangkabau, yang ditandai oleh munculnya Sultan Muchdan Taher Bakrie, yang sejak tahun 2015 merepresentasikan dirinya sebagai Sultan Alam Bagagarsyah Yang Dipertuan Daulat Raja Alam Pagaruyung Minangkabau. Beberapa cuplikan koran lokal Suma-

19 Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*. (Jakarta: CV. Yasaguna). hlm., 288a; Kutipan yang sama juga dapat diikuti dalam *Disertasi Nopriyasman*, (2011), *op.cit.*, hlm. 295 Nama Alam bagagarsyah dan Tuan Gadis Reno Sumpu terdapat juga dalam *Laporan Asisten Residen Tanah Datar No. 310/K tanggal 21 Oktober 1903*.

20 Nopriyasman, (2011), *op.cit.*, hlm. 296

21 Azwar Anas, ”Sekitar Keberadaan Istana Silindung Bulan dan Rajo Tigo Selo Alam Melayu Minangkabau Pagaruyung dan Sri Maha Raja Diraja Adityawarman Raja Alam Melayu Minangkabau XIX Tahun 1347 – 1375”. Naskah Ketikan, 2006, hlm. 8

22 ”Pengurus ‘Lembaga PASTI’: Sejarah Minangkabau Perlu Diluruskan”, dalam *Haluan*, 20 Maret 2007.

23 Penjelasan tentang validitas keluarga Taufiq Thaib dapat dilihat dalam ”S.M. Taufiq Thaib: Silsilah Keluarga Kami Sangat Jelas”, dalam *Haluan*, 22 Maret 2007; atau dalam *Disertasi Nopriyasman* (2011), *op.cit.*, hlm. 291 – 293.

tera Barat memuat perseteruan dua kubu ini, khususnya Surat kabar *Padang Ekspres* dan *Singgalang*. Beberapa cuplikan isi koran tersebut, telah dimunculkan dalam tulisan Nopriyasman yang lain di buku *Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman*.<sup>24</sup>

Pemberitaan surat kabar tersebut memuat informasi, bahwa Sultan Muchdan Taher Bakrie<sup>25</sup> ditahbiskan sebagai Raja Pagaruyung pada tanggal 26 April 2015 di Kumani Kabupaten Sijunjung. Kelompok sosial kekerabatan yang sempat hadir tercatat: Tampuak Tangkai Pariangan; Lubuk Nan Tigo (Lubuk Sikarah Solok, Lubuk Sipunai Sijunjung, dan Simaung Sawahlunto); Lareh Nan Panjang Pariaman; Tuanku Tan Lembang Alam; Empat kerajaan kecil di Sijunjung: Rajo Mudo Guguk, Sumuan Janiah Aie Amo, Jambu Lippo, dan Kubung Tigo Balirik; Kerajaan Pulau Punjung Dharmasraya; Keluarga Raja Ibadat Sumpur Kudus; Keluarga Raja Adat Buo dan Pangian. Sillaturrahmi juga dihadiri oleh Wali Nagari-Wali Nagari Kecamatan Sumpur Kudus, LKAAM dan Bundo Kandung Kabupaten Sijunjung, LKAAM Provinsi Sumatera Barat, dan sanak famili dari Kerajaan Pagaruyung.<sup>26</sup> Ketua Lem-

baga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sijunjung, Epi Radisman dalam sambutannya menyatakan bahwa:

”...mimpi Minangkabau dengan kehadiran Sultan Muchdan sebagai Generasi V Sultan Alam Bagagarsyah Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung, kini terwujud. ”*Pinanglah baliek ka tampuaknyo, siriah alah baliak ka gagangnyo*” (Pinang sudah kembali ke tampuknya, sirih sudah kembali ke gagangnya).<sup>27</sup>

Pada tanggal 29 Mei 2015, Sultan Muchdan didampingi istrinya Wawan Setiasih mengunjungi pula kerabat kerajaan di Dharmasraya dan disambut oleh H. Abdul Harris Tuanku Sati (Rajo Pulau Punjung). Pada waktu itu beberapa perangkat kerajaan yang hadir adalah Yang Dipertuan Sultan Alif Hilahatullah, Rajo Padang Laweh, Alam Suranti Sigi Pagu, Ketua LKAAM Dharmasraya, Ketua LKAAM Tanah Datar, Tuanku Bagindo Ratu Siguntur, Yang Dipertuan Rajo Ibadat Sumpur Kudus beserta rombongan, dan Bagindo Tuan Ome Rajo Godang Kerajaan Jambu Lipo, serta ninik mamak dan Datuak Pulau Punjung.<sup>28</sup> Begitu juga ketika berkunjung ke Muaratakus, Sultan Muchdan melakukan berbagai pembicaraan pula dengan Rajo Dibalai. Tercatat yang hadir waktu itu antara lain Rajo nan Balimo dan Ninik nan Barampek dari Limapuluh Kota, seperti Rajo Ranah Dt. Bandaro Hitam, Rajo Dilareh Dt. Paduko Marajo Sitanang Muaro Lakin, Rajo Dihulu Dt. Simagayuoh, Rajo Disandi Dt. Parmato Alam, Rajo Luhak Dt. Marajo Indo Mangun; serta Ninik

24 Nopriyasman, “Pentas Kerajaan Pagaruyung: Representasi dan Kontroversi Dalam Perjalanan Sejarah Lembaga Raja di Sumatera Barat”, dalam Nopriyasman, dkk., *Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman* (Padang: Pemda Sumatera Barat, Dinas Pendidikan, UPTD Museum Adytiawarman, 2015), hlm. 19 – 21.

25 Nopriyasman, “Pentas Kerajaan Pagaruyung: Representasi dan Kontroversi Dalam Perjalanan Sejarah Lembaga Raja di Sumatera Barat”, dalam Nopriyasman, dkk., *Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman* (Padang: Pemda Sumatera Barat, Dinas Pendidikan, UPTD Museum Adytiawarman, 2015), hlm. 19 – 21.

26 “Sultan Muchdan Penerus Kerajaan Pagaruyung”, dalam *Harian Padang Ekspres* (Padang: 30 April 2015).

27 *Ibid.*

28 “Sultan Muchdan Taher Bakrie, Generasi Kelima dari Sultan Alam Bagarsyah Silaturrahmi ke Pulaupunjung dan Muaratakus”, dalam *Harian Padang Ekspres* (Padang: 29 Mei 2015).

nan Barampek Dt. Rajo Dibalai dari Muaro Takus, Dt. Majo Indo dari Koto Laweh, Dt. Siri Marajo dari Mungka, dan Dt. Bandaro dari Maek.<sup>29</sup> Gelar yang dilekatkan pada Muchdan adalah "Duli Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Muchdan Taher Bakrie gelar Sultan Alam Bagagarsyah". Pelewaan dilakukan oleh Y. Dt. Bandaro Kayo sebagai Tampuak Tangkai Alam Minangkabau di Pariangan.<sup>30</sup>

Menurut kesepakatan "Limbago Kerajaan Tigo Selo Alam Minangkabau", Sultan Muchdan Taher Bakrie merupakan pewaris keturunan Rajo Alam Bagagarsyah, yang bergelar "Duli Maha Mulia Paduka Sri Baginda". Pimpinan Limbago Kerajaan Rajo Tigo Selo adalah (1) Raja Adat Lintau Buo (Dt. Domo Anso, Dt. Mangkuto Marajo, Dt. Bandaro Mudo, Anca Kubuang); dan (2) Raja Ibadat Sumpur Kudus (Dt. Rajo Gagah, Dt. Rajo Mangkuto, dan Dt. Rajo Lelo.<sup>31</sup>

Pelewaan Sultan Muchdan direspon oleh Sultan Muhammad Taufiq Thai dan keluarga Yang Dipertuan Rajo Adat Buo (ML. Sultan Rajo Khatib, Joni Ilson Sultan Ibadat, dan El Firdaus Sultan Rajo Ameh). Mereka menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah musyawarah tentang isi surat yang mengatas namakan Raja Adat Buo tanggal 10 Mei 2015, dan dengan tegas menyatakan Muchdan Taher Bakrie tidak ada kait-berkait dengan Raja Alam Pagaruyung.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> "Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Raja Alam Minangkabau", dalam *Padang Ekspres* (Padang: 8 Oktober 2015).

<sup>31</sup> *Duli Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Muchdan Taher Bakrie Gelar Sultan Alam Bagagarsyah Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung Minangkabau* (Tanpa Tempat, dan Tahun Terbit), hlm. 96.

<sup>32</sup> "Penobatan Sultan Muchdan Taher Bachri Ditolak", *Rakyat Sumbar* (Padang: 26 Agustus 2015).

Sementara itu, keturunan Kerajaan Sultan Alam Bagagarsyah di Jakarta, keluarga besar Sutan Manguntua, yaitu Sarifuddin Baharsyah, keluarga besar Putri Sari Gumilang (Ar Rasyit Alamsyah), dan keluarga Putri Alam Siti Perhimpunan (Amir Hussein Abdillah) menyatakan, bahwa mereka tidak pernah menyepakati dan memberi restu serta berkeberatan atas gelar orang yang mengklaim diri sebagai Yang Dipertuan Rajo Alam Pagaruyung Minangkabau. Dalam konteks ini, belum ada keputusan yang tegas pula dari keluarga keturunan Sultan Alam Bagagarsyah lainnya. Sultan Muhammad Taufiq Thaib sendiri sebenarnya mengakui, bahwa Muchdan sebagai keturunan Sultan Alam Bagagarsyah, namun bukan sebagai pewaris kerajaan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.<sup>33</sup>

Musyawarah Limbago Tinggi Pucuk Adat Alam Minangkabau pada 14 Oktober 2015 di Istana Silindung Bulan Pagaruyung bersepakat, bahwa (1) langkah-langkah Y. Dt. Bandaro Kayo adalah tidak sah, karena tidak dilakukan oleh semua anggota limbago tinggi pucuk adat alam Minangkabau; kemudian (2) secara ranji dan silsilah garis keturunan bukan pula ahli waris yang sah dari Sultan Alam Bagagarsyah; (3) Namun menyetujui Nenek Muchdan, Siti Zuhro memang anak perempuan dari Raja Burhanuddin, sedangkan raja Burhanuddin adalah anak dari Sultan Manguntua, dan Sutan Manguntua, salah satu anak laki-laki anak dari Sultan Alam Bagagarsyah. Di samping itu, (4) pengangkatan Muchdan tidak sesuai dengan prosedur secara adat penobatan Rajo Tigo Selo, demikian pendapat dalam musyawarah tersebut.<sup>34</sup> Hadir dan bicara

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Selengkapnya lihat *Harian Singgalang*, 16 Oktober 2015.

dalam kesepakatan tersebut adalah H. A. A. Dt. Sinaro (pemangku Tuanku Panitahan Sungai Tarab), H. Asril Mahyudin Dt. Sutan Pamuncak Majo Indo (Gadang Tuan Camin Taruih, Langgam Nan Tujuh), Dt. Bagindo Tan Lembang Alam Rajo Piaman (Sabatang Panjang Limo Koto Kampung Dalam Piaman, *Sapiah Balahan*), dan Sutan Andre Algamar Dt. Sanggono Dirajo (Tuanko Rajo Kaciek Rajo Nagari Padang Delapan Suku Padang).<sup>35</sup>

Meskipun kehadiran Muchdan Taher Bakrie sebagai Raja Alam Pagaruyung yang baru ditolak oleh Lembaga Raja Pagaruyung di bawah Payung Taufiq Thaib, namun keberadaannya mulai mendapat tempat dalam sebagian karib-kerabat, menekankan, keluarga segaris keturunan dengan dirinya. Muchdan Taher Bakrie sebagai Raja Alam Pagaruyung pun semakin rajin melakukan silaturahmi dengan kaum karib kerabat tersebut, baik di Pagaruyung dan daerah lain di Sumatera Barat. Silsilah (ranji), bahwa ia keturunan Pagaruyung yang didapatkan Sultan Muchdan dari makam kepala warisnya Dt. Simarajo, pun akhirnya mengisi koleksi Museum Adytiawarman di Padang, di samping silsilah Raja Alam Pagaruyung Sultan Muhammad Taufiq Thaib.<sup>36</sup>

Pada tahun 2016, Sultan Muchdan Taher Bakrie menerbitkan sebuah buku tentang keabsahan dirinya dengan judul "Duli Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Muchdan Taher Bakrie Gelar Sultan Alam Bagarsyah Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung Minangkabau". Terbitnya buku

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> "Raja Alam Pagaruyung dan Permaisuri Bertandang ke Museum Adytiawarman", dalam Majalah *Detak Budaya*, Edisi 1/Tahun III/Juni 2016, (Padang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2016), hlm.12.

ini memungkinkan pembicaraan semakin terbuka, karena ada dua sisi data sumber yang memerlukan penganalisaan lebih lanjut, misalnya soal bentuk ranji atau silsilah keturunan seorang raja pada masing-masing pihak dengan pelibatan ahli geneologi dan sejarah.

Berdasarkan realitas kesejarahan dari kekerabatan Pagaruyung tersebut (kelompok Taufiq Thaib kontra Muchdan Taher Bakrie), masing-masing punya argumen tersendiri berdasarkan sumber geneologi kepercayaan mereka. Bagi Taufiq Thaib, keabsahannya sebagai ahli waris terletak pada garis silsilah keluarga, prasasti peresmian istana, dan benda-benda pusaka yang mereka miliki. Taufiq Thaib menjelaskan silsilahnya sebagai berikut:

#### a. *Dari Garis Matrilineal*

1. Ibunda kami bernama Hj. Puti Reno Dismah binti Mahmud Datuak Rang-kayo *Basa* penghulu kepala *Nagari* Tanjung Sungayang.
2. Ibu dari Ibunda kami (nenek kami) bernama Puti Reno Aminah Yang Dipertuan Gadih Hitam binti Sutan Badarunsyah. Sutan Badarunsyah adalah anak dari Sutan Abdul Hadis, sedangkan Abdul Hadis adalah anak dari Sultan Alam Bagagarsyah dari istrinya di Sumaniak saudara kandung dari Makhudumsyah Sumanik.
3. Ibunda dari nenek kami Puti Reno Aminah bernama Puti Reno Saiyah Yang Dipertuan Gadih Mudo binti Sutan Mangun Panitahan Sungai Tarab. Sutan Mangun adalah anak dari Sultan Alam Bagagarsyah dari istrinya di Sungai Tarab saudara kandung dari Panitahan Sungai Tarab.

4. Ibunda dari Puti Reno Saiyah Yang Dipertuan Gadih Mudo adalah Yang Dipertuan Gadih Reno Sumpu binti Sutan Abdul Jalil Yang Dipertuan Sembahyang.
5. Ibunda dari Yang Dipertuan Gadih Reno Sumpu adalah Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sori binti Yang Dipertuan Patah atau yang disebut juga Sutan Kalifatullah, Raja Muningsyah II. Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sori adalah adik kandung dari Sultan Alam Bagagarsyah.

**b. Dari Garis Patrilineal:**

Ayah kami bernama H. Sutan Muhammad Thaib bin Sutan Muhammad Yafaz lahir dari perkawinan Puti Timarat cucu dari Sutan Abdul Hadis bin Sutan Alam Bagagarsyah dengan Sutan Muhammad Yafaz Tuan Makhudumsyah Sumaniak adalah anak kandung dari Puti Maryam. Puti Maryam adalah anak kandung dari dari Sultan Alam Bagagarsyah.<sup>37</sup>

Sebaliknya klaim seperti itu juga dilakukan pihak Muchdan Taher Bakrie, yang mengkaitkan keabsahan keturunan mereka dengan Sultan Alam Bagagarsyah. Menurut Muchdan,

Sultan Alam Bagagarsyah beristri Puti Siti Batiah, punya anak Sultan Mangun Tuah. Sultan Mangun Tuah punya anak Rajo Burhanuddin (cucu dari Sultan Alam Bagagarsyah). Rajo Burhanuddin punya anak Siti Zara (cucu Sultan Manguntuah). Siti Zahra punya anak Sri Madani (cucu dari Rajo Burhanuddin). Sri Madani punya anak Sultan Muchdan Taher Bakrie

(cucu dari Siti Zahra).<sup>38</sup>

Limbago Kerajaan Minangkabau menyatakan bahwa Muchdan Taher Bakrie juga memakai dan menguasai serta memiliki harta pusaka peninggalan seorang raja. Pelegitimasi lainnya adalah ia mempunyai hubungan dua tali darah dengan raja, yaitu ibunya merupakan keturunan dari Raja Alam Bagagarsyah (Pagaruyung), sedangkan Bapaknya dari keturunan Raja Muko-Muko, Bengkulu.<sup>39</sup> Hingga tulisan ini muncul, protes kevalidan dari keturunan masing-masing masih tetap berlanjut, termasuk protes dan tidak mengakui pengangkatan atau pengukuhan pengganti Sultan Taufiq Thaib yaitu Sultan Farid Thaib. Takaran kevalidan masih berada di pihak masing-masing. Dalam konteks historis, sepanjang fakta yang muncul masih bersifat inferensi (kesimpulan), dan opini (pendapat), maka vonis sejarah amat risikan diberikan. Namun yang jelas, dari fenomena yang ada, dan perjalanan panjang yang telah dilakukan oleh kelompok blok historisnya Taufik Thaib, secara politik kebudayaan mereka tampak mendominasi legitimasi. Hal ini ditandai dengan gerakan kebudayaan dan penganugerahan gelar ke berbagai tokoh nasional, dan tokoh asal Minangkabau, yang mengatas namakan Lembaga Raja Pagaruyung. Sementara Muchdan, perlu kerja keras lagi untuk mendapat pengakuan, terutama di kalangan politik pemerintahan.

<sup>37</sup> "S.M. Taufiq: Silsilah Keluarga Kami Sangat Jelas", dalam *Haluan*, 22 Maret 2007.

<sup>38</sup> Buku *Duli Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Muchdan Taher Bakrie Gelar Sultan Alam Bagagarsyah Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung Minangkabau* (Tanpa Tempat, dan Tahun Terbit), hlm. 10.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 11

## PENUTUP

Sejarah kerajaan dan pewaris raja atas kerajaan sejak dulu kala sering kali memperlihatkan konflik dan kontroversi sejarah. Ada banyak faktor sebagai penyebabnya, baik secara internal maupun secara eksternal. Ada kalanya faktor itu menjadi penguat keberadaan dan legitimasi, seperti ideologi menghidupkan kerajaan memperkuat posisi "Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung" dengan struktur yang diaktualisasikan dengan kebutuhan zaman. Penguat lainnya, seperti penggalian historitas kerajaan, praktik budaya, dan dukungan kelembagaan. Eksistensi dan posisi Daulat yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung yang dikenal dewasa ini tidak terlepas dari kebutuhan kontemporer (masa kini) tersebut. Di samping itu, ada pula faktor yang menjadi pelemah, seperti adanya realitas, *public discourse* (wacana publik) yang mempersoalkan kepentingan menghidupkan budaya kerajaan tersebut.

Secara internal faktor yang memengaruhi amat ditentukan oleh sejauh mana kondisi kekuatan posisi ahli waris (geneologis) dalam meyakinkan publik melalui warisan kerajaan, mulai dari silsilah (ranji) kerajaan, alat-alat atau benda-benda peninggalan yang dipunyai, dan pengakuan sosial budaya lingkaran yang melingkupi perjalanan lembaga kerajaan yang dibangun oleh mereka pada era kini. Semua itu menjadi modal yang mampu menjadi energi lembaga raja dan kerajaan hingga tetap punya eksistensi.

Dari data silsilah dan sumber yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang mengklaim diri punya kaitan langsung dengan Kerajaan Pagaruyung, khusus-

nya Sultan Alam Bagagarsyah, takaran validitas kesejarahan mereka masih dalam tataran fakta inferensi dan opini. Secara historis dapat dikatakan bahwa posisi dan legitimasi kelompok Taufiq Thaib masih belum tergoyahkan. Hal ini dikarenakan (1) kelompok inilah yang pertama membangkitkan dan menggali kembali lembaga Kerajaan Pagaruyung; (2) Mereka pula yang secara luas lebih awal bertindak sebagai pewaris kerajaan Pagaruyung, yang membentuk kelembagaan rajanya bernama Lembaga Pucuk Adat Alam Minangkabau (LPAAM); (3) Sejak awal kelompok Taufiq Thaib didukung oleh LPAAM telah melakukan berbagai kegiatan di bidang budaya (adat) dan aktif bermitra dengan pemerintah daerah, sehingga peran sejarah dan budaya yang diambil pihak geneologi kerajaan blok historis Taufiq Thaib mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Sementara itu, bagi kelompok Muchdan Taher Bakrie keabsahannya masih memerlukan perjuangan keras. Oleh sebab itu perkembangan legitimasi mereka masih tergantung kepada (1) sejauh mana kiprahnya dalam lembaga adat daerah baik di tingkat kesukuan atau pun di tingkat alam Minangkabau; (2) Kegiatan mereka dalam mengaktifkan kerapatan adat dan memperjuangkan hukum adat belum banyak muncul kepermukaan; dan (3) Legitimasi mereka memerlukan dukungan dan respon dari pemerintah Daerah, namun hal itu belum didapatkan. (4) Bagaimanapun keberadaannya mulai mendapat tempat dari sebagian karib-kerabat, kemenakan, dan keluarga segaris keturunan dengan dirinya.

Kontroversi akan selalu ada dalam sejarah, karena terkait kepada persep-

si dan argumentasi yang ditampilkan ke pentas sejarah itu sendiri, khususnya dalam memandang siapa yang paling berhak menjadi pewaris istana. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Pagaruyung kontemporer, khususnya pada masa pasca reformasi dan sesudahnya, baik secara politik kebudayaan, maupun secara keterbukaan zaman, keputusan atau kesepakatan lama mulai “digugat”. Dari sudut sejarah, kontroversi tentang keabsahan siapa yang berhak menjadi pewaris tahta sudah menjadi fenomena biasa. Apalagi kalau yang dibangkitkan itu, sejarahnya pernah terputus atau hilang pada suatu masa, maka penggalan kesahihan keturunan kerajaan tidak begitu mudah. Hal inilah yang dirasakan oleh para pewaris keturunan (geneologi) Pagaruyung kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen, Majalah, dan Koran:

- BP-PAAM, *Direktori Minangkabau 2012*. Batusangkar: Badan Pekerja Pucuk Adat Alam Minangkabau (BP-PAAM) Istana Silinduang Bulan Pagaruyung-Lembaga Pucuk Adat Alam Minangkabau (LPAAM) Provinsi Sumatera Barat, 2012
- Harian *Singgalang*, 16 Oktober 2015
- Laporan Asisten Residen Tanah Datar No. 310/K tanggal 21 Oktober 1903*.
- “Pengurus ‘Lembaga PASTI’: Sejarah Minangkabau Perlu Diluruskan”, dalam *Haluan*, 20 Maret 2007.
- “Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Raja Alam Minangkabau”, dalam *Padang Ekspres*. Padang: 8 Oktober 2015
- “Penobatan Sultan Muchdan Taher Bachri Ditolak”, *Rakyat Sumbar*. Padang: 26 Agustus 2015
- “Raja Alam Pagaruyung dan Permaisuri Bertandang ke Museum Adytiawarman”, dalam *Majalah Detak Budaya*, Edisi 1/Tahun III/Juni 2016, Padang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2016
- ”S.M. Taufiq Thaib: *Silsilah Keluarga Kami Sangat Jelas*”, dalam *Haluan*, 22 Maret 2007, “Sultan Muchdan Penerus Kerajaan Pagaruyung”, dalam *Harian Padang Ekspres*. Padang: 30 April 2015
- “Sultan Muchdan Taher Bakrie, Generasi Kelima dari Sultan Alam Bagarsyah Silaturrahmi ke Pulaupunjung dan Muaratakus”, dalam *Harian Padang Ekspres*. Padang: 29 Mei 2015.
- “Sultan Muchdan Penerus Kerajaan Pagaruyung”, dalam *Harian Padang Ekspres*. Padang: 30 April 2015.
- Wisran Hadi, “Istana Pagaruyung Icon Feodalisme”, dalam *Padang Ekspres*. Padang: 7 Maret 2007

### Buku dan Disertasi:

- Amran, Rusli. (1981). *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Amran, Rusli. (1991). *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: CV. Yasaguna
- Anas, Azwar (2006). ”*Sekitar Keberadaan Istana Silindung Bulan dan Rajo Tigo Selo Alam Melayu Minangkabau Pagaruyung dan Sri Maha Raja Diraja Adityawarman Raja Alam Melayu Minangkabau XIX Tahun 1347 – 1375*”. Naskah Ketikan.
- Asnan, Gusti. (2008). “Penjajahan Belanda di Sumatera Barat dan Migrasi Orang Minangkabau ke Tanah Semenanjung”, dalam Gusti Asnan dan Zulkarnain (Ed.), *Persembahan 70 Tahun Prof. Suwardi MS Mengabdikan pada Ilmu dan Profesi Sejarah Demi Daerah dan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahar, Saafroedin dan Mohammad Zulfan Tadjoeuddin. (2004). *Masih Ada Harapan Posisi Sebuah Etnis Minoritas dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Yayasan Sepuluh Agustus.
- Duli Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Muchdan Taher Bakrie Gelar Sultan Alam Bagarsyah Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung Minangkabau*. Tanpa Tempat, dan Tahun Terbit.
- Gottschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI-Press.

- Hadler, Jeffrey. (2010). *Sengketa Tiada Putus Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute.
- Hamka. (1982). *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Junus, H. Mahmud. (1971). *Sedjarah Islam di Minangkabau*. Djakarta: CV Al-Hidajah.
- Kemal, Iskandar. (2009). *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangan Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementerian Penerangan. (1954). *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah*. Bukittinggi: Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah.
- Mangkuto, H. A. Dt. Rajo. (2010). *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyung Darul Quorar Dalam Sejarah dan Tambo Adatnya*. Jakarta: Taushia.
- Mansoer, M.D. dkk.. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bharatara
- Nopriyasman, dkk., (2015). *Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman*. Padang: Pemerintah Daerah Sumatera Barat-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-UPTD Museum Adityawarman.
- \_\_\_\_\_. (2011). "Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung Sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat", *Disertasi*. Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- \_\_\_\_\_. (2015). "Pentas Kerajaan Pagaruyung: Representasi dan Kontroversi Dalam Perjalanan Sejarah Lembaga Raja di Sumatera Barat", dalam Nopriyasman, dkk., *Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman*. Padang: Pemerintah Daerah Sumatera Barat-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-UPTD Museum Adityawarman.
- \_\_\_\_\_. "Peranan Institusi Raja Dalam Masa Kemerdekaan di Indonesia", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sejarah Borneo Ke-3 dengan Tema: "Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Hubungannya dengan Kesultanan Brunei" di Brunei Darussalam pada tanggal 27-19 Agustus 2013.
- Reid, Anthony. (2010). *Sumatera Tempo Doeloe dari Marcopolo sampai Tan Malaka* Jakarta: Komunitas Bambu.
- Thaib, Sutan Muhammad Taufiq dan Sutan Ahmad Riyadh. (2009). *Sekilas Tentang Kerajaan Pagaruyung*. Batusangkar: Minangkabau Institut.

# Sejarah Transmigrasi dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran

Dusun Purwosari Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong  
Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Sulastriningsih

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga  
sulastriningsih16@gmail.com

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah transmigrasi dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigran di Dusun Purwosari, Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Transmigrasi yang dilaksanakan di Dusun Purwosari merupakan transmigrasi umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Sumber yang digunakan berupa dokumen surat transmigrasi, buku, jurnal, artikel, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmigrasi yang dilaksanakan di Dusun Purwosari pada tahun 1995 – 1996 memiliki pengaruh yang positif terhadap masyarakat transmigran, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan taraf hidup dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigran di Dusun Purwosari.

**KATA KUNCI** - *transmigrasi, transmigran, sosial ekonomi, Jawa, Dusun Purwosari*

**ABSTRACT** - This study aims to observe the history of transmigration and how it influences homesteaders' social and economic condition in Purwosari; a hamlet part of Suatang Village, Pasir Belengkong sub-district, Paser districts, East Kalimantan province. The studied transmigration type is general transmigration. This study uses historical method with multidimensional approach. Data used in this study are coming from transmigration letters and documents, scientific books, journals, articles, interviews and observations. The result of this study shows that the 1995-1996 transmigration program in Purwosari region had given positive impacts towards the homesteaders, as proven with the growth of homesteaders' living standard and their social-economy welfare.

**KEYWORDS** - *transmigration, transmigrant/homesteader, social-economy, Java, Purwosari hamlet*

## PENDAHULUAN

**T**ransmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam pembangunan nasional. Program transmigrasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk

lokal. Kebijakan transmigrasi ditempuh pemerintah karena persebaran penduduk di Indonesia dianggap kurang merata. Ada daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada yang terlalu jarang, sehingga kehidupan penduduk dan perkembangan

daerah dan masyarakatnya tidak sesuai yang diharapkan (Prawiro, 1979: 113-114).

Tujuan transmigrasi adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan pemindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian dalam segala lapangan (Hardjosudarmo, 1965: 128). Transmigrasi juga diharapkan dapat mengurangi padatnya penduduk di Pulau Jawa dan mendukung program pemerintah dalam proses industrialisasi di luar Jawa.

Penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia berawal dari zaman pemerintah Hindia Belanda yaitu pada tahun 1905, ditandai dengan penempatan pertama sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) dari wilayah Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan Provinsi Lampung. Program transmigrasi yang dilakukan pada masa penjajahan Belanda (1905-1941) sudah memindahkan sebanyak 189.938 orang dalam jangka waktu 37 tahun. Pada masa kemerdekaan dikirim sebanyak 600.518 transmigran dalam jangka waktu 25 tahun (1950-1974). Menurut Gavin Jones, program kolonisasi dan transmigrasi dari tahun 1905 sampai 1974 mengurangi pertumbuhan penduduk Jawa kira-kira sebanyak 991.000 jiwa (Heeren, 1979: VII-IX).

Sejak masa Orde Baru, program Pelita II, tujuan transmigrasi tidak semata untuk pemerataan penduduk tetapi juga dalam rangka pemenuhan tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan berbagai proyek di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya manusia (Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, 2015: 5). Pada umumnya orang-orang mau berpindah

dari Pulau Jawa ke wilayah transmigrasi didorong oleh faktor ekonomi. Mereka ingin merantau dengan harapan di wilayah transmigrasi itu kehidupan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Salah satu wilayah yang menjadi tempat migrasi penduduk Jawa adalah Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur merupakan salah satu dari lima provinsi Pulau Kalimantan di Indonesia. Secara geografis provinsi ini berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) di barat dan utara, provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di selatan, Selat Makassar dan Laut Sulawesi di Timur. Luasnya sekitar 11,09 persen luas daratan Indonesia. Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, terdiri dari 7 Kabupaten, 3 Kota, 103 Kecamatan dan 1.026 desa/kelurahan.

Dusun Purwosari merupakan salah satu wilayah transmigrasi yang terletak di Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sebelum menjadi wilayah transmigrasi, Dusun Purwosari merupakan hutan belantara tanpa penduduk. Kemudian pada tahun 1994 mulai dibangun pemukiman transmigrasi di wilayah ini. Transmigrasi di Dusun Purwosari dilaksanakan pada tahun 1995-1996 dengan penempatan sebanyak 100 Kepala Keluarga yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan melakukan transmigrasi, para transmigran harus menjalani kehidupan yang benar-benar baru dan berbeda dengan kehidupan mereka di wilayah asal. Dengan perubahan yang terjadi tersebut, mereka perlu melakukan suatu proses adaptasi agar dapat bertahan di lingkungan yang baru.

Berikut beberapa penelitian tentang

transmigrasi yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Yosi Nova tentang *Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya*. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kemakmuran kehidupan masyarakat Timpeh dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mencakup peranan masyarakat transmigran dalam kehidupan sosial masyarakat Timpeh dan perubahan-perubahan yang terjadi di Kecamatan Timpeh setelah kedatangan transmigran. Penelitian menunjukkan tentang keberhasilan program transmigrasi di Timpeh. Perkembangan perekonomian masyarakat Timpeh yang stabil sejak penanaman sawit besar-besaran pada tahun 1994. Keberhasilan lain dalam bidang pendidikan, agama, sosial dan budaya juga meningkat dibuktikan dengan adanya penghargaan *Transmigration Award* “Makarti Nayomata” dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2012.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Andang dkk. yang berjudul *Pengalaman Transmigrasi Di Indonesia (Studi Di Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya)*. Penelitian ini membahas tentang sejarah transmigrasi di Desa Olak-Olak, kemudian menunjukkan kondisi awal kedatangan transmigran ke Desa Olak-Olak yang memprihatinkan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh transmigran untuk bertahan di Desa Olak-Olak.

*Ketiga*, *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia* yang diterjemahkan oleh Sri Ambar Wahyuni Prayoga, terjemahan dari karya Patrice Levang berjudul *La terre d'en Face—La Transmigration*

*en Indonésie*. Buku ini membahas tentang sejarah transmigrasi di Indonesia, transmigrasi mulanya dikenal dengan istilah kolonialisasi yang kemudian berkembang menjadi transmigrasi setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, buku ini membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program transmigrasi dan pola-pola transmigrasi di Indonesia. Selain itu penulis juga menyatakan bahwa transmigrasi merupakan bentuk lain dari ekspansi kerajaan agraris Jawa yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram. Buku ini banyak memberikan data yang cukup lengkap, terdapat banyak peta, grafik dan tabel sehingga mempermudah pembaca untuk mendapatkan informasi yang akurat. (Prayoga, 2003)

Dari beberapa penelitian di atas, meskipun ada beberapa kesamaan dalam kajian, masing-masing wilayah transmigrasi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu, penelitian ini akan menambah referensi terkait transmigrasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Penelitian ini mengkaji tentang sejarah transmigrasi dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dusun Purwosari.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan empat tahap penelitian sejarah yaitu: (1) Heuristik, (2) Kritik sumber, (3) Interpretasi, (4) Penulisan (Hamid dan Madjid, 2011: 42). Tahap pertama yaitu heuristik. Sumber utama berupa dokumen surat-surat transmigrasi dari Departemen Transmigrasi, Gubernur Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, serta

Pemerintah Kabupaten Paser yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dan dokumen pribadi milik Mantan Kepala Desa Suatang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 15 warga yang mengikuti transmigrasi di Dusun Purwosari, serta wawancara kepada kepala desa yang menjabat saat program transmigrasi dilaksanakan. Wawancara dilakukan agar peneliti memperoleh data yang detail dan akurat yang berkaitan dengan penelitian. Pemilihan narasumber dilakukan dengan cara mengkonfirmasi usia dan latar belakang narasumber, apakah sesuai dengan waktu transmigrasi dilaksanakan atau tidak. Sedangkan untuk persiapan melakukan observasi dan wawancara peneliti menyediakan peralatan, seperti *handphone* (sebagai alat rekam dan foto), pulpen, buku catatan dan sarana penunjang lainnya.

Selain sumber diatas, sumber sekunder diperoleh dari Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana-Salatiga (UKSW) berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Setelah sumber didapatkan, maka dilakukan kritik sumber untuk mendapatkan kredibilitas dan otentitas sumber. Setelah melalui tahap kritik, maka perlu dilakukan interpretasi. Dalam tahap ini, penulis menafsirkan kembali sumber yang telah didapat apakah sumber dapat dipercaya atau tidak. Pada tahap ini sumber dikelompokkan sesuai dengan urutan untuk mencari hubungan antara satu fakta dengan fakta lain disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah. Setelah penyajian data, penulis menarik kesimpulan dari hasil ilmiah yang telah ditulis. Tahap akhir dalam

penelitian sejarah adalah tahapan penulisan. Sumber-sumber yang telah ditemukan dirangkai menjadi sebuah cerita yang menarik sekaligus ilmiah.

## KONDISI GEOGRAFIS DUSUN PURWOSARI

Dusun Purwosari merupakan salah satu wilayah transmigrasi yang terletak di Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sebelum diberi nama Dusun Purwosari, tahun 1994 pemukiman transmigrasi ini dinamai Transabangdep oleh Departemen Transmigrasi. Warga sepakat untuk memberi nama dusun Purwosari tiga tahun kemudian. Nama tersebut berasal dari kata "*purwo*" yang memiliki arti "tegal/kebun" dan "*sari*" yang berarti "ramai" dengan harapan agar warga di dusun ini rukun dan damai. Dusun Purwosari memiliki luas wilayah kurang lebih 115 Ha yang terbagi menjadi lima jalur, yakni jalur 1,2,3,4 dan 5 yang terdiri dari empat Rukun Tetangga (RT) mencakup RT 08, 09, 10, dan 11. Pembagian wilayah RT dilakukan oleh Kepala Desa Suatang dengan masyarakat transmigran pada bulan Maret Tahun 1996, di balai desa yang saat itu dijadikan sebagai Kantor Transmigrasi. Karena jalur 1 penduduknya hanya lima KK, akhirnya wilayah tersebut dijadikan satu RT dengan jalur 2. Setelah pembagian wilayah selesai, warga kemudian mengadakan musyawarah untuk pemilihan ketua RT yang dipercaya dapat memimpin mereka dengan baik.

Dusun Purwosari berbatasan di Sebelah Utara terdapat perkebunan sawit PTPN XIII, Sebelah Selatan: Perumahan karyawan PTPN XIII, Sebelah Timur:

perkebunan sawit warga, Sebelah Barat: perkebunan sawit warga. Jalan dari Dusun Purwosari ke ibukota kecamatan berjarak  $\pm$  12 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  20 menit, sedangkan jalan dari Dusun Purwosari ke ibukota kabupaten berjarak  $\pm$  30 km dengan waktu tempuh  $\pm$  45 menit.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, data kependudukan pada tahun 1996 di Dusun Purwosari terdiri dari 100 Kepala Keluarga dan jumlah penduduknya 320 jiwa. Rata-rata pendidikan para transmigran yaitu SD dan SMP. Kepercayaan yang dianut mayoritas muslim sebanyak 96 Kepala Keluarga, Kristen sebanyak 4 Kepala Keluarga. Pada tahun 2014 jumlah penduduk transmigran di Dusun Purwosari mengalami penurunan karena adanya perpindahan, pernikahan, kelahiran dan kematian. Berdasarkan data dari Kantor Desa Suatang, penduduk transmigrasi di Dusun Purwosari berjumlah 52 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduknya 218 jiwa. Rata-rata pendidikan mengalami peningkatan dengan jumlah lulusan SD 45 orang, SMP 57 orang, SMA/K 65 orang, S1 19 orang, S2 1 orang. Mayoritas mata pencaharian masyarakat transmigran di Dusun Purwosari yaitu pekebun kelapa sawit, sedangkan minoritas mata pencaharian mereka yaitu peternak (sapi, kambing, dan ayam), pedagang sayur, toko kelontong, dan karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII.

## SEJARAH TRANSMIGRASI DI DUSUN PURWOSARI

Transmigrasi merupakan salah satu program pada masa pemerintahan Orde Baru dalam pembangunan nasional. Adapun tu-

juan transmigrasi yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Pada tahun 1994 pemerintah pusat mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk mengadakan pemukiman transmigrasi di Kabupaten Paser. Kemudian dilakukan identifikasi calon lokasi Transbangdep oleh Tim Identifikasi Calon Transbangdep Pemerintah Daerah Tingkat I, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Kalimantan Timur serta Tim Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP-D) PT. Inti Landas yang diketuai oleh Ir. Nurimadhaluddin pada tanggal 7 sampai 25 Juni 1994. Identifikasi dilakukan dalam rangka menentukan lokasi yang cocok untuk pemukiman transmigrasi. (Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor: 595/422/TU.PIM/BAPP/1994)

Proses transmigrasi Jawa ke Kalimantan Timur berawal dari penyuluhan di Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada bulan September – Desember tahun 1995. Penyuluhan ini dilakukan oleh Departemen Transmigrasi kepada calon transmigran tentang daerah transmigrasi sebagai tempat tujuan untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Para transmigran yang setuju mengikuti transmigrasi ke Kalimantan Timur, memiliki tujuan untuk peningkatan hidup yang lebih baik. Selain itu mereka juga diberi peluang membuka lahan pertanian atau perkebunan di lokasi transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang No-

mor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, telah diatur syarat-syarat menjadi Transmigran, yaitu: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Berkeluarga, 3) Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun, 4) Belum pernah bertransmigrasi, 5) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), 6) Memiliki Kartu Keluarga (KK) 7) Berbadan sehat, 8) Memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di lokasi tujuan, 9) Lulus seleksi (Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, 2015: 9)

Dusun Purwosari merupakan salah satu wilayah yang dipilih untuk dijadikan pemukiman transmigrasi. Oleh sebab itu dilaksanakan kegiatan penyiapan lahan berupa pembukaan lahan seluas 115 Ha dan pembuatan bangunan rumah transmigrasi sebanyak 100 unit serta fasilitas umum lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Desember 1995, sebagai kontraktor pelaksana adalah PT. Budi Mulia Ind. Samarinda dan Supervisi yang mengawasi kegiatan tersebut adalah CV. Patria Paramita Samarinda. (Surat Departemen Transmigrasi, nomor: B-577/W19-D-TU/VII/1995)

Setelah penyiapan lahan selesai digarap, Departemen Transmigrasi keberangkatan rombongan transmigrasi dari Jawa Tengah dan Jawa Barat sejumlah 100 KK dan diberangkatkan secara bertahap. Rombongan yang berasal dari Jawa Barat diberangkatkan terlebih dahulu sebanyak 50 KK pada akhir Desember 1995. Mereka dikumpulkan di penampungan yang

ada di Bandung selama 1 minggu, dan diberangkatkan melalui pelabuhan Surabaya menuju Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal tujuan pelabuhan Tanah Merah, sampai di Dusun Purwosari pada awal Ramadhan atau 22 Januari 1996.

Kemudian tanggal 29 Desember 1995 rencana akan diberangkatkan lagi sebanyak 50 KK dari Jawa Tengah dengan perkiraan sampai di Pelabuhan Tanah Merah pada tanggal 1 atau 2 Januari 1996. Namun karena adanya penundaan keberangkatan, warga diberangkatkan pada bulan Februari 1996 dan sampai di Dusun Purwosari pada hari terakhir Ramadhan atau 20 Februari 1996.

Dalam pasal 28 UU no. 42 tahun 1973 mengenai pembagian tanah/jatah para transmigran berbunyi sebagai berikut:

1. Transmigran petani berhak memperoleh tanah sedikitnya dua hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut:
  - 0,25 hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.
  - 1,75 hektar dipergunakan untuk lahan pangan dan lahan usaha.
2. Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikitnya seluas 0,25 hektar yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.

Mengenai pembagian jatah tanah di berbagai daerah pemukiman berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya jumlah luas tanah adalah dua hektar. Adapun pelaksanaan pembagian jatah tanah transmigrasi dilakukan dengan cara undian yang dihadiri oleh Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I, Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Kalimantan Timur. Dengan cara undian ini diharapkan tidak

akan terjadi kericuhan dalam pelaksanaan pembagian tanah. Sebab para transmigran merasa cara tersebut memuaskan dan tidak membedakan baik berdasarkan asal, suku, dan sebagainya.

Fasilitas dan bantuan yang diberikan Pemerintah kepada transmigran berupa: 1 unit rumah dengan ukuran 6x6 meter, tanah seluas 2 Ha meliputi lahan pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan usaha I dan lahan Usaha II. Lahan usaha I seluas 0,75 merupakan lahan pangan untuk ditanami sayuran, padi, dan palawija (singkong, jagung, ubi dan lain-lain). Sedangkan lahan Usaha II seluas 1 Ha dijadikan sebagai lahan usaha, seperti: kopi, karet, dan kelapa sawit. Bantuan bibit-bibit tanaman tersebut diberikan oleh Dinas Pertanian. Dalam pembukaan lahan masyarakat bergotong royong agar proses pembukaan lahan menjadi lebih cepat dan mudah, karena lahan yang dibuka cukup luas sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dilakukan oleh warga sendiri. Selain itu, gotong royong juga dapat mempererat tali persaudaraan antar transmigran.

Pada awal kedatangannya masyarakat transmigran dijamin kehidupannya oleh pemerintah dengan memberikan bantuan makanan yang sudah matang selama satu bulan. Setiap warga mengambil bantuan makanan ke balai desa yang saat itu berfungsi sebagai kantor transmigrasi. Contoh bantuan makanan yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi yaitu: nasi, sayur, dan lauk, jatah makan tiga kali sehari dengan menu makanan yang berbeda setiap hari. Selain dengan tujuan untuk memberikan makanan, pemerintah juga berharap dengan kegiatan tersebut masyarakat transmigran dapat saling berso-

sialisasi untuk mempererat hubungan silaturahmi. Setelah satu bulan diberi bantuan makanan siap saji, masyarakat transmigran kemudian diberi jatah hidup untuk diolah sendiri selama satu tahun, terdiri dari uang pesangon, pakaian, beras, ikan asin, garam, gula pasir, minyak goreng, minyak tanah, sabun cuci, alat masak dan makan (panci, wajan, periuk, ketel, ceret, piring, gelas, sendok, garpu, dan lain-lain), tempat tidur, alat pertanian (cangkul, arit, parang, garpu, sekop, dan lain-lain) dan bibit tanaman pangan dan buah-buahan yaitu (padi, jagung, sawo, salak, durian, rambutan, jeruk), perkebunan (karet, kopi, kelapa, sengon, jati, gaharu, kelapa sawit) dan gaduhan ternak.

Tantangan masyarakat transmigran saat berada di tempat yang baru adalah proses adaptasi. Adaptasi merupakan proses belajar untuk bisa menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, baik dengan lingkungannya maupun dengan masyarakatnya. Proses adaptasi yang dilakukan oleh para transmigran sangat baik, mereka mampu bertahan dengan kondisi lingkungan yang serba terbatas dan masyarakat lokal yang berbeda bahasa dan kebudayaan. Contoh adaptasi yang dilakukan masyarakat transmigran yaitu menjalin silaturahmi dengan cara datang maupun saling membantu dalam acara-acara yang diadakan oleh penduduk lokal maupun masyarakat transmigran, misalnya: pernikahan, kelahiran, kematian dan lain-lain. Selain itu mereka juga saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman tentang cara bercocok tanam dan berbagi bibit sayur dan tanaman. Dari hubungan sosial tersebut dapat tercipta kesejahteraan dan kerukunan antar masyarakat transmigran

dan penduduk lokal, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial.

### **KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI DUSUN PURWOSARI**

Letak geografis suatu daerah dapat mempengaruhi corak kehidupan sosial budaya masyarakat. Hal ini karena adanya keharusan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi daerahnya dalam usaha mencari keharmonisan hidup, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun bidang kehidupan lain. Begitu pula transmigran di Dusun Purwosari, secara geografis terletak di wilayah yang di sekelilingnya masih terdapat hutan, sehingga masyarakat transmigran harus bekerja keras untuk menebang hutan dan membersihkan akar sisa tebangan pohon yang ada disekelilingnya untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.

Program transmigrasi ini secara tidak langsung membentuk suatu tatanan sosial yang baik, dalam segi ekonomi, sosial, politik, budaya bahkan dalam hal struktur sosial. Kondisi yang baru tersebut tentu mendorong adanya interaksi antara masyarakat transmigrasi Jawa dengan penduduk lokal. Interaksi antara masyarakat transmigran dan penduduk lokal juga menciptakan rasa saling menghormati dan mengakui keberadaan masing-masing etnis sehingga dapat terjadi kawin campur antara masyarakat transmigran dengan penduduk lokal.

Usaha masyarakat transmigran sejak kedatangannya di Dusun Purwosari tidaklah mudah. Contohnya: pada awal kedatangan masyarakat Jawa Barat, penduduk

lokal masih belum menerima, bahkan masyarakat transmigran dilarang melewati jalan yang dibuat oleh penduduk lokal. Kemudian masyarakat transmigran mencoba melakukan pendekatan dengan berbagi bibit sayur dan tanaman, bertukar pikiran tentang cara bercocok tanam, dan sikap penduduk Jawa yang ramah mengakibatkan penduduk lokal mau menerima dengan baik.

Satu bulan kemudian pada saat kedatangan masyarakat transmigran dari Jawa Tengah, masyarakat transmigran sudah diterima dengan baik. Namun tidak jarang juga ada masyarakat yang sulit untuk beradaptasi, baik dengan lingkungan alam, penduduk lokal, maupun masyarakat transmigran sehingga mereka memilih untuk kembali ke kampung halaman dan menjual rumah dan lahan transmigrasi miliknya kepada tetangga maupun keluarganya di Jawa yang tertarik untuk memperbaiki taraf hidup di Kalimantan. Rumah dan lahan dijual dengan harga kisaran Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.000.000.

Agar terjalin hubungan yang baik antar masyarakat, setiap hari Minggu warga di Dusun Purwosari melakukan gotong royong dilingkungan RT masing-masing. Mereka biasanya membersihkan parit, memperbaiki jalan yang rusak, dan membersihkan rumput disekitar jalan. Untuk warga yang tidak mengikuti kegiatan gotong royong biasanya akan didenda sebesar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 tergantung kebijakan RT masing-masing dan uang denda tersebut diberikan kepada Ketua RT untuk dijadikan kas RT. Selain itu, setiap RT mengadakan pertemuan (kumpulan) yang dilakukan rutin setiap satu bulan sekali di rumah warga secara bergiliran. Pertemuan

biasanya membahas tentang rencana perbaikan jalan, keamanan lingkungan, kebersihan, kerukunan dan lain-lain.

Dalam kehidupan antara masyarakat transmigran dengan penduduk lokal terjalin dengan baik dan saling menghormati. Hal ini dibuktikan dalam acara-acara hajatan di Desa Suatang baik yang diselenggarakan oleh penduduk lokal maupun masyarakat transmigran, seperti pemikahan, *khitanan*, selamatan hamil tujuh bulanan atau kelahiran dan apabila ada warga yang meninggal mereka tetap saling membantu dengan memberikan sumbangan berupa uang maupun sembilan bahan pokok (sembako) seperti: beras, minyak, gula, teh, mie instan, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat transmigran dan penduduk lokal di Desa Suatang sering mengadakan kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan dan peringatan hari-hari besar keagamaan lainnya. Masyarakat juga rutin mengadakan pengajian yang diisi dengan ceramah tokoh agama dan dilaksanakan setiap bulan di masjid yang berbeda (giliran).

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat transmigran menggunakan bahasa Jawa dan Sunda. Para transmigran juga membawa dan mengenalkan kesenian Jawa ke wilayah transmigrasi seperti Kuda Lumping, tarian-tarian dari Jawa Tengah seperti: Cantang Balung, Tari Gambyong, Tari Bondan, dan Prajuritani, Campursari, serta Wayang Kulit. Kesenian tersebut biasanya diselenggarakan dalam acara pernikahan, *khitanan*, serta memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia. Penduduk lokal dengan senang hati menyaksikan pertunjukan kesenian Jawa terutama kesenian Kuda Lumping. Dengan adanya pertunjukan kesenian tersebut, di-

harapkan dapat melestarikan kebudayaan Jawa walaupun mereka sudah menetap di wilayah transmigrasi. Selain kesenian, masyarakat transmigran juga tetap memegang teguh adat istiadat yang dimiliki.

## KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI DUSUN PURWOSARI

Program transmigrasi di Dusun Purwosari tidak lepas dari harapan peningkatan taraf hidup yang lebih baik, namun dalam hal ini masyarakat harus bekerja keras demi terciptanya harapan tersebut. Masyarakat yang memilih bertahan hidup di wilayah transmigrasi mengatakan bahwa di daerah asalnya, mereka tidak memiliki lahan maupun rumah sendiri, bahkan pekerjaan mereka serabutan, ada yang menjadi petani, buruh pabrik, maupun pedagang. Sedangkan di wilayah transmigrasi mereka diberi rumah dan lahan oleh pemerintah. Mereka hanya perlu merawat dan memanfaatkan lahan yang diberi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Mata pencaharian masyarakat transmigran yaitu dengan bercocok tanam, mulai dari menanam padi gunung, menanam sayur (bayam, kangkung, cabe, dan lain-lain), berdagang sayur, membuka toko kelontong dan menjadi karyawan di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII serta mulai membuka lahan perkebunan kelapa sawit sendiri. Pada tahun 1997 warga gagal panen padi karena kemarau panjang, sehingga Departemen Transmigrasi memberikan bantuan sembako lagi selama 6 bulan dengan harapan, masyarakat dapat bertahan hidup hingga panen padi berikutnya.

Dalam bidang pertanian, masyarakat

transmigran di Dusun Purwosari rata-rata merupakan petani kelapa sawit dan sayuran. Pada bidang peternakan, banyak yang berternak sapi gaduhan. Sapi gaduhan merupakan sapi bantuan dari Dinas Peternakan, setiap KK diberi dua ekor sapi, yang nantinya mereka harus mengembalikan dua anak sapi kepada Dinas Peternakan. Dinas Peternakan tidak memberi batasan jangka waktu pengembalian ternak. Kemudian induk sapi dapat menjadi hak milik warga. Selain sapi gaduhan, warga juga berternak kambing dan ayam kampung, hibah dari Dinas Peternakan Kabupaten Paser masing-masing dua ekor (sepasang). Hasil ternak biasanya dijual kepada sesama warga maupun untuk dikonsumsi sendiri.

Kehidupan ekonomi masyarakat Dusun Purwosari tidak lepas dari perkebunan kelapa sawit, karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang mampu menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektar di dunia. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang dapat digunakan untuk berbagai olahan seperti minyak goreng, kosmetik, margarin, sabun dan lain-lain, ampasnya dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak seperti sapi dan ayam.

Kelapa sawit termasuk tanaman yang mudah dikembangkan di Kalimantan Timur khususnya Dusun Purwosari, karena jenis tanah yang cocok serta wilayahnya yang tidak tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Namun, untuk memperoleh kualitas kelapa sawit yang baik, diperlukan perawatan yang baik dan tepat. Misalnya, setiap 6 bulan sekali sawit diberi pupuk seperti Urea, TSP, KCL, Petroganik, maupun pupuk organik dari kotoran ternak. Selain itu, daun sawit juga

perlu dipangkas bagian yang sudah kering, agar tidak menghambat pertumbuhan buah dan mempermudah saat dipanen. Kelapa sawit dapat dipanen jika telah berumur 4 tahun, buah yang pertama panen (biasa disebut buah pasir) biasanya menghasilkan  $\pm 500$  kg per hektar. Sedangkan untuk sawit yang telah berusia 10 tahun bisa menghasilkan  $\pm 2$  ton per hektar dengan kisaran harga  $\pm$  Rp 1.200, per kilogram.

Kelapa sawit biasanya dapat dipanen sekitar 2 minggu sekali, namun setiap periode panen, buah yang dihasilkan tidak selalu sama banyak. Kondisi ini sangat wajar karena pertumbuhan buah pada setiap pohon berbeda-beda. Kelapa sawit yang telah dipanen kemudian dijual kepada pengepul yang ada di Dusun Purwosari, hasil panen akan diambil oleh para pengepul ke kebun masing-masing warga menggunakan truk, sehingga warga tidak kesulitan dalam menjual hasil panennya. Karena hasil yang menjanjikan dan dapat dipanen dalam jangka waktu yang cepat, masyarakat Dusun Purwosari banyak menggantungkan hidupnya pada perkebunan kelapa sawit. Walaupun telah memiliki pekerjaan lain, masyarakat tetap mengandalkan hasil perkebunan sawit untuk kebutuhan hidup mereka.

Setelah mengikuti program transmigrasi, masyarakat merasa sangat terbantu karena kehidupan mereka di wilayah transmigrasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan saat ini mereka dapat memiliki lahan lebih dari dua hektar. Mereka yang dahulunya hidup serba terbatas, saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dari hasil panen kelapa sawit. Selain penghasilan dan lahan yang bertambah, masyarakat juga dapat menyekolah-

kan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi.

## KESIMPULAN

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah Orde Baru dalam pembangunan nasional. Dusun Purwosari merupakan salah satu wilayah transmigrasi yang digolongkan dalam jenis transmigrasi umum. Program transmigrasi yang dilaksanakan di Dusun Purwosari telah membawa beberapa perubahan yang signifikan, khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Sebelum datangnya masyarakat transmigrasi, daerah ini merupakan hutan belantara yang kemudian dibangun untuk dijadikan sebagai pemukiman transmigrasi.

Setelah kedatangan transmigran, terjadi perubahan dalam bidang sosial ekonomi masyarakat akibat adanya asimilasi dengan budaya setempat. Dalam kehidupan sosial, hubungan antar sesama transmigran maupun antar transmigran dengan penduduk lokal yang berbeda suku, budaya, dan bahasa, dengan adanya perbedaan tersebut menciptakan rasa saling menghormati dan mengakui keberadaan masing-masing etnis. Sementara dalam bidang ekonomi, perkebunan kelapa sawit memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen/Arsip

- Pemerintah Indonesia. 1973. Undang-undang No. 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Lembaran Negara RI Tahun 1973, No. 5. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

tentang Ketransmigrasian.

- Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Suatang Bulu. Dokumen daftar nama transmigran penerima lahan usaha II.
- Sketsa Calon Lokasi Transmigrasi dari Kepala Desa Suatang.
- Surat Gubernur Kalimantan Timur. *Calon Lokasi Transabangdep 1995/1996*. Nomor: 595/422/TU.PIM/BAPP/1994.
- Surat Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. *Penyusunan RTSP-D*. Nomor: B.6337/W.19-TU/XII/94/1994.
- Surat Kantor Departemen Transmigrasi. *Pemberitahuan Kegiatan Penyiapan Transmigrasi di Suatang Bulu*. Nomor: B-577/W19-D-TU/VII/1995.
- Surat Kantor Departemen Transmigrasi. *Pemberitahuan Kedatangan Rombongan Transmigrasi*. Nomor: B-1010/W.19-D/XII/1995.

### Jurnal

- Firmansyah, Andang., Superman., Galuh Bayuargi. 2018. "Pengalaman Transmigrasi di Indonesia (Studi di Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya)". *Jurnal Historia*. Vol 6 (2): 379 – 390.
- Nova, Yosi. 2016. "Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya". *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol 5 (1): 23 – 36.

### Pustaka

- Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 2015. *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*.
- Hardjosudarmo, Soedigdo. 1965. *Kebijaksanaan Transmigrasi Dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Bhatara.
- Hamid, Abd. Rahman dan Muhammad Saleh Madjid. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Heeren, H.J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kustadi, 1983. *Transmigrasi dan Tanahnya*

- .Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Pranoto, Suhartono. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prawiro, Ruslan H. 1979. *Kependudukan (Teori, Fakta & Masalah)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Prayoga, Sri Ambar Wahyuni. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

# Sumpah Pemuda dan Tumbuhnya Kesadaran Berbangsa

**Effendi Wahyono**

*Universitas Terbuka Indonesia*

*effendi@ecampus.ut.ac.id*

**ABSTRAK** - Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda yang diikrarkan tanggal 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Sumpah pemuda adalah komitmen para pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa dan agama untuk menyatukan diri mewujudkan Indonesia merdeka. Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana rasa satu bangsa di kalangan pemuda terbentuk dan siapa penggerakannya. Penelitian dilakukan dengan metode sejarah, dengan menggunakan sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan telah melahirkan kesadaran kepada Bangsa Indonesia bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Feodalisme dan penjajahan menyebabkan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin, bodoh, dan tertindas. Para pemuda yang terdidik merupakan penggerak dari perjuangan Bangsa Indonesia. Rasa persatuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka mampu menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Perbedaan ras, bangsa, bahasa, dan agama dieliminasi demi terwujudnya persatuan.

**KATA KUNCI** - *Sumpah Pemuda, kesadaran berbangsa, gerakan kebangsaan*

**ABSTRACT** - The historical events of Soempah Pemoeda or Sumpah Pemuda (the Youth Oath) pledged on 28 October 1928 were major events in Indonesian history. The oath of youth was the commitment of Indonesian youth from various ethnic groups and religions to unite themselves to realize an independent Indonesia. This research was conducted to find answers on how the sense of one nation among young people was formed and who was the activator. The research was conducted by historical methods, using secondary sources. The findings indicated that education has given rise to awareness of the Indonesian people, that the ancestors of the Indonesian people were a great nation. Feodalism and occupation caused the Indonesian people to be a poor, ignorant and oppressed nation. Educated youth was an activator to Indonesian struggle. A sense of unity to create an independent Indonesia was able to eliminate the barriers of difference. Differences in race, nation, language and religion were eliminated for the sake of unity.

**KEYWORDS** - *Youth-oath, national-consciousness, national-movement*

## PENDAHULUAN

Setiap tanggal 28 Oktober Bangsa Indonesia memperingati hari Sumpah Pemuda. Hari itu para pemuda Indonesia dari berbagai golongan menyatakan ikrar bersama mewujudkan persatuan se-

bagai Bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Indonesia karena Bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama rela melepaskan sekat-sekat

perbedaan demi mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

Kesadaran nasional lahir karena dibangkitkan oleh perasaan diskriminatif kolonial. Stratifikasi sosial yang dibentuk oleh pemerintah kolonial menempatkan Bangsa Indonesia sebagai pemilik tanah air menjadi kelas yang terbawah, di bawah golongan Eropa dan masyarakat Timur Asing seperti Cina dan Jepang. Sentimen sosial yang tercipta dalam sistem kolonial telah menumbuhkan kesadaran berbagai bangsa terjajah di wilayah Nusantara menjadi komunitas yang bernama Bumiputra. Mereka adalah kalangan tertindas yang kemudian bergerak untuk melepaskan diri dari penindasan.

Gerakan pemuda lahir dari kesadaran perlunya persatuan sebagai suatu bangsa. Mereka adalah orang-orang berpendidikan yang sadar terhadap nasib bangsanya yang terjajah. Pendidikan dan Buku-buku yang dibaca telah membuka mata mereka memahami gerakan-gerakan kebangsaan di berbagai negara.

Nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia digali oleh para pemuda disebabkan oleh tiga pengalaman. *Pertama*, timbulnya kesadaran bahwa Bangsa Indonesia pernah mengalami kemajuan pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram di Nusantara telah mengalami kemajuan yang sejajar dengan kerajaan maju lainnya pada zaman itu. *Kedua*, feodalisme dan kolonialisme menyebabkan Bangsa Indonesia mengalami kemunduran. Zaman kejayaan yang membanggakan tenggelam oleh eksploitasi penjajah. Kekayaan alam dikeruk dan dibawa ke negara penjajah, sementara itu anak bangsa yang bekerja keras untuk menggali sumber-sumber alam, ti-

dak dapat memanfaatkan hasilnya. Sebagian besar hasil pertanian, tambang, dan hasil bumi lainnya dikirim ke negara induk penjajah. *Ketiga*, feodalisme dan penjajahan tersebut menimbulkan stratifikasi sosial, sehingga terjadi pengkelasan yang menempatkan Bangsa Indonesia dalam kelas sosial yang paling bawah, sebagai inlander, dan pribumi yang dilabeli sebagai bangsa pemalas, bodoh, dan miskin. Sementara itu bangsa pendatang seperti Cina, ditempatkan dalam kelas yang lebih tinggi di bawah bangsa Eropa, sedangkan bangsa Belanda sebagai bangsa penjajah ditempatkan dalam kelas sosial yang paling tinggi kedudukannya.

Tulisan ini memfokuskan pada peristiwa lahirnya sumpah pemuda dan latar belakang yang melahirkan sumpah pemuda. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode sejarah. Sumber yang digunakan adalah sumber skunder, didasarkan atas kajian terhadap berbagai tulisan dan opini tentang pemuda dan sumpah pemuda, yang ditulis oleh aktivis kepemudaan maupun akademisi.

## LAHIRNYA SUMPAH PEMUDA

Batavia (Jakarta) bersama Surabaya, Semarang, dan Bandung merupakan kota-kota besar pada masa Hindia Belanda yang menjadi magnet bagi kaum muda dari seluruh negeri untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Kota-kota ini berkembang menjadi arena interaksi antar para pemuda yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, etnis, dan agama yang berbeda. Mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan pemuda sebagai wadah berdiskusi sesama anak

rantau. Pergaulan antarpemuda dengan beragam latar belakang ini memunculkan pemahaman terhadap adanya keanekaragaman budaya yang melahirkan saling pengertian antarsesama golongan.

Mereka saling bertemu dan berdiskusi di asrama-asrama pelajar dan mahasiswa. Salah satu tempat yang populer untuk tempat dikusi adalah Indonesia *clubgebouw* atau *Indonesische clubhuis* di Jalan Kramat Raya 106. Selain sebagai asrama dan tempat diskusi, juga merupakan tempat latihan seni bagi para pemuda. Gagasan penyelenggaraan kongres pemuda yang kemudian melahirkan “Sumpah Pemuda” dilahirkan di gedung ini, yaitu dalam rapat pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 1928. Meskipun semua yang hadir sepakat untuk menyelenggarakan kongres, tetapi detailnya belum sempat dibicarakan. Pembicaraan detail kongres pemuda baru dibicarakan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 1928. Rapat yang dihadiri oleh utusan pemuda dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), *Jong Java*, *Jong Islaminten Bond*, Pemuda Indonesia, *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, *Jong Batak Bond*, dan Kaum Pemuda Betawi menyepakati susunan pengurus kongres, yang terdiri dari :

1. Ketua : Soegondo Djojopuspito dari PPPI
2. Wakil Ketua : Djoko Marsait dari *Jong Java*
3. Sekretaris : Moh. Yamin dari *Jong Sumatranen Bond*
4. Bendahara : Amir Syarifuddin dari *Jong Batak*

Pengurus lainnya adalah Djohan Muhammad (*Jong Islamieten Bond*), Kontjoso-

engkono (Pemuda Indonesia), Senduk (*Jong Celebes*), J. Leimena (*Jong Ambon*), dan Rohjani (Kaum Pemuda Betawi). Selain pembentukan pengurus, pertemuan menghasilkan kesepakatan:

1. Semua perkumpulan yang hadir sepakat mengadakan kongres di *Weltevreden* selama dua hari pada bulan Oktober 1928,
2. Biaya penyelenggaraan kongres dipikul bersama oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda serta sumbangan dari berbagai pihak,
3. Pada beberapa tempat di wilayah Indonesia akan dibentuk cabang-cabang panitia kongres yang bertugas membantu panitia dan mengumpulkan uang.
4. Meminta perkumpulan-perkumpulan pemuda lain yang tidak ikut dalam pertemuan tersebut untuk membantu usaha panitia dan ikut berperan serta dalam kongres.

Kongres yang kemudian diselenggarakan pada tanggal 27–28 Oktober 1928 tersebut bertujuan untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, membahas berbagai masalah mengenai pergerakan pemuda, dan memperkuat perasaan kebangsaan serta memperteguh persatuan Indonesia.

Selain organisasi pemuda, kongres juga dihadiri oleh organisasi-organisasi seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Budi Utomo, *Volksraad*, Persatuan Minahasa. Perorangan yang hadir antara lain Sarmidi Mangunsarkoro, Nona Purnomowulan, Muhammad Nazif, Siti Sundari, E. Puradiredja, Kuntjoro Purbopranoto, Sukmono, Surjadi, Djaksodipuro (Wongsonegoro), Moh. Roem, Dien Pantouw,

Suwirjo, Sumanang, Dali, Suahbudi Latif, Sulaiman, Kartomengolo, Sumarto, Masdani, Anwari, Nona Tumbel, Tamzil, A.K. Gani, Jo. Tumbuan, Pengemanan, Halim, Antapermana, Suwarni, Kasman Singodimedjo, dan W.R. Supratman (*Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, 1984: 69-72).<sup>1</sup>

Rapat dibuka pada tanggal 27 Oktober 1928 pukul 19.30 di gedung *Katholieke Jongelingen Bond*, di Jalan Lapangan Banteng. Sebelum kongres dibuka, panitia terlebih dahulu membacakan sambutan tertulis dari Sukarno (PNI), dari pengurus Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda, dan sambutan pribadi Tan Malaka. Sugondo sebagai Ketua Panitia dalam sambutannya menjelaskan tentang sejarah pergerakan pemuda Indonesia, sebagai gerakan yang melatarbelakangi lahirnya kongres pemuda. Acara berikutnya adalah pidato Moh. Yamin yang berjudul "Persatuan dan Kebangsaan Indonesia". Pidato Yamin lebih banyak membahas aspek-aspek sejarah Bangsa Indonesia yang memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam bahasa, kemauan, nasib, dan adat dari suku-suku bangsa di Indonesia.

Sidang kedua dilaksanakan di gedung *Oost Java Bioscoop*, di Jalan *Koningsplein Noord* (Merdeka Utara). Rencananya pada sidang kedua ini menghadirkan empat pembicara dengan tema pendidikan. Mereka adalah Nona Purnomowulan, Sigit, Djoko Sartono, dan Ki Hadjar Dewantoro. Dua orang yang disebut terakhir tidak dapat had-

ir karena ada di Yogyakarta. Sidang ketiga diselenggarakan di *Indonesische Clubhuis*, Jalan Kramat No. 106, dibuka pukul 19.30. Pada sidang ketiga ini rencananya akan dimulai dengan pawai pandu (*padvinderij*) tetapi dibatalkan karena tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian. Tema sidang ketiga adalah kependuan, yang menghadirkan tiga pembicara, yaitu Ramelan, Theo Pangemanan, dan Mr. Sunario. Ketika Sunario masih berpidato, Yamin menyerahkan rumusan yang berisi pokok-pokok pikiran yang disampaikan selama kongres kepada Sugondo. Sugondo menerima rumusan yang disampaikan Yamin. Demikian juga dengan Amir Syarifudin. Rumusan itulah yang kemudian dibacakan dihadapan peserta kongres, yang kini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Rumusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

#### ***Poatoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia***

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda-pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan dengan namanya: Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islameten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia.

Memboeka rapat tanggal 27 dan 28 October taoen 1928 di negeri Djakarta; sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pemitjaraan jang diadakan dalam kerapatan tadi; sesoedahnja menimbang segala isi pidato-pidato dan pemitjaraan ini; kerapatan laloe

<sup>1</sup> Dalam buku *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa* disebutkan bahwa jumlah peserta yang hadir pada Kongres Pemuda yang berlangsung antara tanggal 27 – 28 Oktober 1928 mencapai 750 orang. Jumlah ini mungkin dapat dikatakan mewakili berbagai kelompok organisasi pergerakan kebangsaan.

mengambil kepoatoesan:

Pertama, Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia,

Kedua, kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, Bangsa Indonesia,

Ketiga, kami poetera dan poeteri Indonesia menjoenjoeng Bahasa persatoean, Bahasa Indonesia.

Setelah mendengar poatoesan ini kerapatan mengeloearkan kejakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia; mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan persatoeannja kemaean, sedjarah, hoekoem-adat, pendidikan dan kepandoean dan mengeloearkan pengharapan soepaja poatoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabat dan dibatjakan di moeka rapat perkoempoelan-perkoempulan kita.<sup>2</sup>

Sebelum putusan kongres tersebut dibacakan, peserta kongres terlebih dahulu mendengarkan alunan biola lagu Indonesia Raya, yang dibawakan oleh W.R. Supratman. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih, yang kemudian menjadi bendera nasional Indonesia. Dengan demikian, selain melahirkan komitmen untuk mewujudkan persatuan Indonesia, pada Sumpah Pemuda tersebut juga melahirkan simbol kebangsaan Indonesia lainnya, yaitu Indonesia Raya, dan Bendera Merah Putih (Suhartono, 1994: 79).

<sup>2</sup> Surat kabar *Pemoeda Soematra*, dalam buku *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan*, Jakarta: Kurnia Esa, halaman 78.

Sumpah pemuda yang dirumuskan dalam Kongres Pemuda Indonesia tersebut bukan peristiwa tunggal. Kongres pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda merupakan lanjutan dari kongres pemuda sebelumnya yang kemudian disebut sebagai Kongres Pemuda Indonesia I, yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926. Pada kongres tersebut, selain membicarakan pentingnya persatuan untuk mencapai Indonesia merdeka, juga sudah dimunculkan tentang perlunya bahasa persatuan yang disebut Bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan oleh para pemuda Indonesia yang berpendidikan. Kesadaran sebagai bangsa yang muncul sejak awal abad ke-20, dengan begitu cepat bergulir menjadi gerakan-gerakan menuntut Indonesia merdeka.

## PENDIDIKAN MELAHIRKAN KESADARAN BERBANGSA

Sumpah Pemuda merupakan produk kaum intelegensia sebagai penggerak “drama nasionalisme” Indonesia. Kelompok ini yang menciptakan identitas nasional dan kesadaran kolektif sebagai bangsa. Pengikat nasionalisme ditampilkan dalam butir teks Sumpah Pemuda, yaitu kesatuan wilayah, bangsa, dan bahasa (Suhartono, 1994: 79). Lahirnya kelompok intelegensia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan tentang pendidikan.<sup>3</sup>

Kebijakan politik liberal yang dijalankan oleh pemerintah kolonial sejak paruh kedua abad ke 19 membuka wa-

<sup>3</sup> Peran golongan intelektual dalam perjuangan kemerdekaan telah banyak ditulis oleh para ahli, di antaranya adalah J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Grafiti Press, 1993.

wasan baru perdagangan dunia. Ada dua hal yang mendapatkan perhatian kalangan industri di dunia. *Pertama*, Hindia Belanda, khususnya Jawa adalah pasar potensial bagi produk industri mereka karena jumlah penduduknya yang besar. Tetapi masyarakat Jawa ternyata tidak memiliki daya beli yang tinggi karena kemiskinannya. *Kedua*, Hindia Belanda dilihat sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik perkebunan maupun pertambangan.

Dalam sejarah Indonesia, kita bisa melihat produksi tembakau di pesisir Sumatra Timur yang dimulai tahun 1860 berkembang pesat dan merajai produksi tembakau dunia. Disusul kemudian lada, kopra di Sulawesi selain kopi dan gula di Jawa. Memasuki abad ke-20, Indonesia menyumbangkan dua komoditi yang sangat penting dalam perekonomian dunia, yaitu minyak bumi dan karet. Kandungan minyak di Langkat, Sumatra Utara sudah diketahui sejak tahun 1860an. Namun di daerah ini berkecamuk Perang Aceh sehingga tidak ada kestabilan keamanan untuk berinvestasi.

Eksploitasi pertambangan di Sumatera bermula dari Langkat. Pada tahun 1883 A.J. Zijkler mendapatkan konsesi dari pangeran Langkat untuk mengeksploitasi minyak bumi. Setelah melalui berbagai percobaan, akhirnya pada tahun 1900, Zijkler berhasil mengeksplor minyak ke kawasan Asia, seperti Cina dan India. Langkah A.J. Zijkler kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya dari berbagai negara. Ricklefs mencatat sampai tahun 1920 ada kurang lebih 50 perusahaan yang berlomba menyedot minyak bumi yang ada di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Di

antara perusahaan-perusahaan itu, yang paling besar adalah Shell (Belanda), yang pada tahun 1930 memproduksi sekitar 85 % dari seluruh produksi minyak bumi Indonesia. Perusahaan lain yang masuk kategori besar adalah Caltex dan Stanvac (Amerika), dan Borneo Oil Company dari Jepang (Ricklefs, 2001: 321-322).

Pembukaan perkebunan maupun pertambangan ini memerlukan tenaga kerja terampil yang bergaji murah. Waktu itu masalahnya adalah penduduk Indonesia secara umum masih buta huruf sehingga tidak mungkin dapat dipekerjakan sebagai tenaga administrasi pada perusahaan-perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Untuk tenaga kasar perkebunan di Sumatra Timur perusahaan perkebunan mendatangkan kuli-kuli kontrak dari Jawa dan Cina.

Kebutuhan tenaga administrasi yang terampil mendorong para pengusaha menekan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membuka sekolah “bergaya barat” bagi penduduk pribumi. Ide pembukaan sekolah pribumi “bergaya barat” ini selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi perusahaan-perusahaan barat dan birokrasi kolonial, juga dimaksudkan untuk membendung pengaruh pendidikan Islam di pesantren-pesantren. Para orang tua lebih senang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah agama di pesantren-pesantren supaya anak-anaknya menjadi anak saleh.<sup>4</sup> Pemerintah Belanda merasa

4 Kesulitan untuk mendorong anak-anak petani di desa juga dirasakan oleh dinas penyuluhan pertanian, yang membutuhkan tenaga-tenaga penyuluh terampil guna membimbing petani-petani di pedesaan. Beberapa sekolah pertanian di desa, seperti di desa Sebandar, Cianjur terpaksa ditutup karena kekurangan murid. Anak-anak memilih memenuhi keinginan orang tua mengenai pendidikan agama dan moral. Lihat *Jaarverslag van den Landbouwwoorlichtingsdien*, 1923, halaman 78 – 79.

perlu membendung pengaruh pendidikan Islam karena hampir semua perlawanan (pemberontakan) yang muncul di berbagai wilayah pada abad 19, dipimpin oleh ulama. Masalah kemiskinan, dan buta huruf itulah yang antara lain melatarbelakangi lahirnya kebijakan Politik Etis, dengan tiga program utama yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi.

Meskipun semua pejuang Politik Etis sepakat bahwa pendidikan merupakan kebijakan strategis untuk membebaskan Bangsa Indonesia dari kemiskinan, namun dalam kenyataannya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh dua aliran kepentingan (politik) yang saling berlomba, sehingga hasilnya tidak fokus. Aliran pertama diikuti oleh kelompok yang berpendapat bahwa pendidikan hanya diberikan kepada kelompok elit Bangsa Indonesia. Bentuk pendidikan bergaya barat dengan pengantar Bahasa Belanda. Kelompok elit berpendidikan model Eropa ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan mengisi birokrasi kolonial yang akan tetap setia dan loyal kepada pemerintah Belanda sehingga dapat mengendalikan fanatisme Islam. Snouck Hurgronje dan Abendanon (Direktur Pendidikan 1900–1905) termasuk tokoh Etis yang mendukung pandangan ini. Di pihak lain, Idenburg dan Gubernur Jenderal van Heutsz (1904–1909) lebih mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis. Kelompok ini berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya diberikan kepada kalangan atas dan elitis, tetapi juga diberikan kepada rakyat bawah dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya. Pendekatan populis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan langsung bagi peningkatan kesejahteraan

rakyat. Dalam praktiknya, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai sehingga kedua aliran tersebut tidak dapat menyelenggarakan programnya dengan baik.

Pendidikan model Eropa sangat mahal sehingga hanya orang-orang kaya dan priyayi tinggi dengan gaji besar yang dapat menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah model barat (Riklefs, 2001: 330). Di samping itu, tidak semua anak Bangsa Indonesia yang mengikuti pendidikan gaya Eropa meninggalkan tradisi Islamnya. Meskipun mereka mengikuti pendidikan gaya Eropa, tetapi tetap saja mengikuti pendidikan agama di luar jam sekolah mereka. Mohammad Hatta misalnya, meskipun ia mengikuti pendidikan di MULO, ia tetap mengikuti pendidikan agama yang diikutinya dari ulama yang dihormati di keluarganya (Noer, 1990).

Memasuki awal abad 20, jumlah sekolah rendah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebesar 601 yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Di samping sekolah-sekolah tersebut, masih ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta yang umumnya diperuntukan bagi anak-anak Eropa sebanyak 359 sekolah, dan sekolah-sekolah yang didirikan Missie dan Zending serta sekolah-sekolah swasta milik tokoh-tokoh perjuang seperti Taman Siswa yang jumlahnya mencapai 451 sekolah, sehingga total sekolah yang ada hanya berjumlah 1.501 sekolah. Selain jumlahnya sedikit, penyebaran sekolah-sekolah tersebut di beberapa daerah jumlahnya tidak merata. Sebagai contoh untuk wilayah Minahasa yang jumlah penduduknya hanya 450 ribu jumlah sekolahnya mencapai 366 sekolah, masing-masing sekolah pemerin-

tah 115, partikelir 14, dan gereja 237. Sedangkan seluruh wilayah Sulawesi lainnya jumlahnya tidak lebih dari 20 sekolah (Poesponegoro, 1990: 126).

Sekolah-sekolah menengah secara umum hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Karena itu bagi putra-putra daerah yang ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat menengah, mereka harus pergi ke Jakarta, yang jauh dari tempat tinggal mereka. Misalnya Mohammad Hatta, setelah lulus ELS, di Bukittinggi, ia meneruskan pendidikannya MULO di kota Padang dalam usia 13 tahun. Dalam usia 17 tahun ia merantau lagi ke kota yang lebih jauh, yaitu Jakarta untuk meneruskan pendidikannya di *Prins Henrik Handels* (PHS) sekolah dagang yang diikutinya dari tahun 1919 – 1921. Kemudian ketika usianya mencapai 19 tahun ia pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya (Noer, 1990: 19–37). Di perantauan, mereka hidup bersama teman-temannya dari daerah lain di Indonesia. Mereka membentuk komunitas sebagai intelektual muda yang kemudian menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang terjajah (yang kemudian bernama Indonesia) yang harus berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kaum intelektual muda tersebut selalu berdiskusi, membahas situasi politik, perlakuan diskriminatif terhadap mereka di sekolah-sekolah mereka, dan gerakan kebangsaan dari berbagai Negara. Meskipun buku-buku zaman itu susah didapat, tetapi semangat membaca yang tinggi di kalangan mereka membuat wawasan mereka, dan kemampuan nalar mereka, berkembang melampaui usia mereka.

Demikian juga dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda.

Mereka bisa bertemu dengan mahasiswa Indonesia lainnya yang berasal dari berbagai daerah. Mereka bahkan dapat bekerja sama dalam suatu organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia (PI). Dalam kepengurusan PI tahun 1923, Iwa Kusumasumantri sebagai ketua, berasal dari Ciamis, Jawa Barat; didampingi J.B. Sitanala sebagai sekretaris yang berasal dari Ambon; bendahara Mohammad Hatta dari Bukittinggi, dan Pemegang arsip Darmawan Mangunkusumo yang berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah (Ingleson, 1993 : 6). Di negeri Belanda mereka tidak mengalami perlakuan diskriminatif seperti yang dialami di Hindia Belanda, sehingga mereka merdeka untuk bergaul, mengungkapkan pendapat, dan berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk dengan tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai Negara lainnya. Bahkan, Tan Malaka di negeri Belanda pernah ikut berkompetisi untuk duduk dalam parlemen Belanda.

Di antara segelintir pemuda yang luar biasa yang dapat melanjutkan pendidikan sampai ke pendidikan tinggi, masih jauh lebih banyak putra-putra Bangsa Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan sangat terbatas jumlahnya, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmatinya. Dengan kecilnya jumlah sekolah dibanding jumlah penduduk tidak heran jika jumlah melek huruf Bangsa Indonesia rendah sekali. Berdasarkan data sensus yang ada, pada tahun 1930 jumlah penduduk Bangsa Indonesia yang dapat membaca dan menulis hanya 6,44 persen dari 70 juta penduduk. (Poesponegoro, 1990: 124). Angka tersebut menggambarkan betapa beratnya perjuangan kaum intelektual muda Bangsa Indonesia un-

tuk mendorong rakyat Indonesia berjuang menjadi bangsa yang merdeka. Perjuangan berat mereka bertambah dengan rendahnya sarana transportasi dan komunikasi. Untuk menyampaikan ide-ide perjuangannya mereka harus pergi ke daerah-daerah dengan menggunakan sarana transportasi ala kadarnya. Sarana komunikasi waktu itu tidak sehebat seperti sekarang sehingga mereka harus selalu terjun ke lapangan.

### LAHIRNYA GERAKAN KEBANGSAAN

Pendidikan yang diikuti oleh sebagian kecil rakyat Indonesia telah menumbuhkan rasa kesadaran berkebangsaan. Melalui bacaan mereka dapat mengetahui bagaimana Jepang sebagai negara Asia, dapat mengalahkan Rusia sebagai simbol barat yang lebih modern dan maju. Mereka juga dapat melihat bagaimana gerakan Turki Muda dalam mewujudkan negara modern. Melalui bacaan, mereka juga dapat mengetahui Revolusi Perancis, Revolusi Industri di Inggris, bahkan di Indonesia sendiri mereka dapat mengetahui bahwa Bangsa Indonesia sudah pernah menjadi bangsa yang maju, melalui kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Melalui bacaan, mereka dapat menggali kejayaan masa lalu bangsanya yang kemudian menjadi bodoh, miskin, dan tertinggal karena dijajah oleh bangsa lain. Itulah yang melatarbelakangi lahirnya kesadaran kebangsaan kaum terdidik Indonesia. Gerakan tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi kebangsaan yang modern.

Organisasi yang pertama dibentuk adalah Budi Utomo (20 Mei 1908). Organisasi ini pertama kali dibentuk dengan maksud

untuk menghimpun dana beasiswa pendidikan bagi kalangan priyayi Jawa. Mereka menyadari perlunya pendidikan untuk membangun negara yang lebih maju. Melalui pendidikan, Bangsa Indonesia dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Probleminya adalah mahalnnya biaya pendidikan. Pendidikan hanya dapat dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu. Pendirian organisasi ini dimotori oleh seorang dokter Jawa, Wahidin Sudirohusodo. Ia resah terhadap sistem pendidikan yang elitis. Lembaga pendidikan jumlahnya sedikit. Biaya pendidikan mahal sehingga sulit dijangkau bagi Bangsa Indonesia kebanyakan. Sejak tahun 1906 ia mencoba keliling Jawa menemui bupati-bupati membicarakan masalah *studiefonds* bagi Bangsa Indonesia khususnya bagi kalangan priyayi Jawa. Di sini usahanya kurang berhasil. Ia akhirnya berkunjung ke STOVIA. Di sekolah ini ia bertemu dengan dr. Sutomo, yang langsung mendukung usahanya, dan kemudian dikonkretkan dengan pendirian organisasi yang diberi nama Budi Utomo (Pringgodigdo, 1986: 1).<sup>5</sup>

Kelahiran Budi Utomo memberikan inspirasi bagi kalangan intelektual lainnya untuk membentuk organisasi guna mewujudkan cita-citanya, meskipun gerakannya baru berkisar pengumpulan beasiswa bagi putra-putra (bangsawan) Jawa untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi

<sup>5</sup> Kajian tentang Budi Utomo secara mendalam telah dilakukan oleh seorang sarjana (dan keturunan bangsawan) Jepang, Akira Nagazumi dengan judul, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908 – 1918*, diterbitkan oleh Institute of Developing Economies, Tokyo, tahun 1972. Edisi Indonesianya diterjemahkan oleh sebuah tim yang dibentuk atas kerja sama antara KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) bekerja sama dengan LIPI dan diterbitkan dengan judul, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908 – 1918* oleh Grafitipress pada tahun 1989.

sehingga dapat memperoleh tingkat pendidikan yang sederajat dengan anak-anak Bangsa Belanda. Pada tahun 1909, Tirtoadisuryo, lulusan OSVIA yang seharusnya bekerja pada dinas pemerintahan, mengundurkan diri menjadi *ambtenar* dan memilih menjadi wartawan, dan mendirikan organisasi yang diberi nama Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan kemudian di Bogor (1910). Organisasi ini dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang Indonesia.<sup>6</sup>

Pada tahun 1911 Tirtoadisuryo mendorong H. Samanhudi, seorang pedagang batik yang sukses di Surakarta untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam sebagai suatu usaha koperasi bagi pedagang batik. Usaha ini menarik H.O.S. Cokroaminoto yang juga lulusan OSVIA yang tidak mau bekerja pada dinas pemerintah, untuk mendirikan cabang Sakrekat Dagang Islam di Surabaya. Pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh Cokroaminoto.

Karena kepemimpinan Cokroaminoto yang cemerlang, maka dalam waktu cepat SI berkembang dengan sangat pesat. SI berkembang menjadi organisasi massa dan merupakan organisasi pertama di Indonesia yang memiliki basis rakyat yang memiliki anggota hingga dua juta orang pada tahun 1919 (Ricklefs, 2005: 347–348). Karena jumlah anggotanya yang besar, SI memiliki potensi untuk tumbuh sebagai organisasi

yang mampu menyatukan Bangsa Indonesia. Faktor Islam menjadi pendorong organisasi ini lebih cepat berkembang.

Pada tahun yang hampir bersamaan, lahir sebuah partai yang lebih radikal, yaitu *Indische Partij* (1911) yang dipimpin oleh Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini mungkin dapat dikatakan sebagai organisasi politik yang membangun kesadaran bangsa. Partai ini mengikrarkan nasionalisme untuk bangsa Hindia dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Hindia. Karena sifat dan tuntutan yang radikal, pemerintah Hindia Belanda membubarkannya dan mengasingkan pemimpin utamanya ke negeri Belanda. Meskipun demikian, semangat perjuangan ketiga pimpinan *Indische Partij* ini tidak pupus meskipun mereka ada di pengasingan. Gagasan dan ide-ide kemerdekaan selanjutnya dilakukan oleh *Insulinde* (Surjaningrat, 1986: 417).<sup>7</sup>

Kesadaran ke-Indonesiaan pun menjadi semakin menguat. Kata “Indonesia” sebagai satu entitas bangsa semakin terasa dan memberikan identitas baru baru putra-putri Bangsa Indonesia. Semangat ke-Indonesiaan semakin jelas setelah Iwa kusumasumnatri memimpin *Indonesische Vereeniging* (IV). Sebagai ketua baru IV, pada awal Januari 1923, Iwa menekankan perjuangan politiknya dalam tiga hal, yaitu, *Pertama*, Indonesia harus menentukan nasib sendiri; *Kedua*, untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, Bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri; *Ketiga*, ia mengajak

6 Tirtoadisurya sendiri kemudian sukses dalam bidang jurnalisme. Pada tahun 1903 Ia mendirikan *Soenda Berita*, mingguan berbahasa Melayu pertama yang didanai dan dikelola oleh Bangsa Indonesia. Di samping itu ia juga mendirikan mingguan *Medan Prijaji* (1907) yang kemudian menjadi harian (1910) yang merupakan surat kabar harian pertama yang dikelola oleh Bangsa Indonesia (lihat Ricklefs, 2005: 347). Tirtoadisuryo merupakan tokoh yang diangkat dalam novel Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*.

7 Tulisan ini diberi pengantar oleh Abdurrachman Surjomohardjo, yang dimuat dalam buku *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*, yang dihimpun oleh Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, 1986.

seluruh Bangsa Indonesia bersatu untuk melawan Belanda. Sebagai ketua IV, Iwa-pun menyerukan agar para mahasiswa di Belanda terus mengikuti perkembangan politik di tanah air. Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi ketua IV, Iwa menyatakan bahwa masa depan Bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak pada kelembagaan dan bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenarnya. Untuk tujuan tersebut, setiap orang Indonesia harus berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan bebas dari bantuan asing (Ingleson, 1993: 6–7).

Kegiatan politik IV untuk mewujudkan kemerdekaan Bangsa Indonesia semakin jelas dengan mengubah nama IV menjadi *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PI) pada tahun 1924, dan mengubah nama majalahnya dari *Hindia Poetra* menjadi Indonesia Merdeka. Mulai saat itu, merekapun menyatakan bahwa “Indonesia merdeka” menjadi semboyan pemuda Indonesia. Dengan demikian nama *Indie* tidak lagi digunakan sebagai nama organisasi pergerakan.

Perubahan nama dari IV menjadi PI menunjukkan gerakan kebangsaan Indonesia menemukan identitas baru, yaitu identitas Indonesia. PI adalah organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia pada tahun 1922, kemudian diikuti oleh Soetomo yang menggunakan organisasinya dengan nama *Indonesische Studie Club* tahun 1924. Sukarno kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Nama Indonesia sendiri awalnya populer di kalangan akademisi. Pertama kali dikemukakan oleh George Samuel Windsor Earl, Etnolog Inggris dalam artikelnya yang

dimuat dalam *Jurnal of The Indian Archipelago and Earstern Asia* Vol. IV tahun 1850 dengan nama Indunesia. Pada jurnal yang sama dan volume yang sama, James Ricahardson Logan mengganti huruf u dan Indunesia-nya Earl menjadi Indonesia. Kemudian pada tahun 1884 Adolf Bastian, seorang ahli etnologi di Universitas Berlin menerbitkan buku yang diberi judul *Indonesien oder die Inseln des Malayschen Archipel* sebanyak lima volume.

Ingleson mencatat bahwa PI merupakan organisasi nasionalis Asia yang paling awal menuntut kemerdekaan segera dan tidak bersyarat. Radikalisme pemuda nasionalis Indonesia ini oleh Ingleson dilihat sebagai refleksi dari gerakan nasionalis Indonesia. Perjuangan mereka yang radikal dapat dilihat pula dari artikel-artikel yang diterbitkan melalui *Indonesia Merdeka*. Sebuah artikel yang terbit pada Februari 1925, misalnya diberi judul, *Trijdaan Twee Front* (perjuangan di dua front) menyatakan bahwa perjuangan Bangsa Indonesia akan lebih berat dan lebih pahit tetapi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia harus bersedia mengorbankan semua daya dan kepercayaannya jika ingin mencapai kemerdekaan. Perjuangan bukan hanya satu front, tetapi sekaligus dua front, karena perjuangan mereka tidak hanya melawan Pemerintah Belanda, tetapi juga Bangsa Indonesia sendiri yang menentang perjuangan kaum nasionalis (Ingleson, 1993: 9, 11). Manifesto politik yang dikumandangkan oleh Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 menunjukkan bahwa gerakan nasionalis semakin jelas merumuskan arahnya. Di dalam manifesto tersebut tercakup prinsip-prinsip nasionalisme seperti kebebasan atau kemerdekaan, kesatuan,

dan kesamaan (Kartodirdjo, 1993: xi).

Gerakan radikal dari mahasiswa Indonesia di Belanda mempengaruhi gerakan kebangsaan di Indonesia. Organisasi-organisasi pemuda di Indonesia sejak awal tahun 1920an mulai intens mengadakan berbagai pertemuan untuk menyatukan langkah guna terwujudnya kemajuan bangsa. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, intensitas hubungan dan keterkaitan satu organisasi dengan organisasi lainnya semakin tinggi. Hal inilah yang mempertebal semangat persatuan dan semangat kebangsaan bagi tokoh-tokoh pemuda waktu itu. Dari risalah kongres beberapa organisasi pemuda waktu itu seperti *Jong Java*, *Jong Sumatera*, *Jong Islamiten Bond*, *Jong Batak*, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), tampak adanya hasrat untuk bersatu. Dari semangat untuk bersatu tersebut, lahirlah gagasan untuk menggelar kongres akbar pemuda Indonesia (Kerapatan Besar Pemuda). Pada tanggal 15 November 1925 terbentuklah panitia kongres yang dipimpin oleh Tabrani (*Jong Java*), dengan anggota antara lain Bahder Djohan (JSB), Jan Toule Soulehuway (*Jong Ambon*), Paul Pinontoan (*Jong Minahasa*), dan Sanusi Pane (*Jong Batak*).<sup>8</sup> Kongres yang kemudian disebut dengan Kongres Pemuda Indonesia ke-1 diadakan pada 26 April 1926. Dalam sambutannya sebagai ketua Panitia, M. Tabrani mengatakan "... kita semua orang-orang Jawa, Sumatera, Minahasa, Ambon, dan lain-lain, oleh sejarah dijadikan mahluk yang harus saling mengulur tangan, bilamana kita mencapai apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu kemerdekaan Indonesia,

<sup>8</sup> Lihat Yayasan Sumpah pemuda, *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kurnia Esa, 1984.

tanah air yang kita cintai..." (*Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, 1984: 60).<sup>9</sup> Meskipun diskusi dalam kongres ini secara umum menggunakan Bahasa Belanda, tetapi telah muncul gagasan tentang adanya bahasa nasional, yang disebut Bahasa Indonesia. Ada dua bahasa yang waktu itu dominan untuk dijadikan bahasa persatuan, yaitu Bahasa Jawa dan Bahasa Melayu (Djohan, 1986: 183).

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada masa itu bukan hal yang mudah. Dalam sejarah Indonesia, periode ini adalah periode represif. Pemerintah kolonial mengambil tindakan keras terhadap pemimpin organisasi yang non kooperatif (tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial). Meskipun demikian, tindakan keras yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh pemuda dan pergerakan lainnya tidak menyurutkan semangat gerakan anti kolonial. Semakin represif tindakan pemerintah, semakin menggelora pula tuntutan untuk merdeka. Gerakan-gerakan non kooperatif semakin lantang menyuarakan persatuan dan kemerdekaan Bangsa Indonesia (Wahyono, 2013). Hasil konkret pertemuan tersebut adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia ke-2 pada tanggal 28 Oktober 1928, yang berhasil mengeluarkan ikrar bersama yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Di dalam naskah sumpah pemuda itu ada satu kalimat penutup yang selama ini terlupakan, yang berbunyi: "...mengeluarkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan persa-

<sup>9</sup> Lihat Effendi Wahyono, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pergerakan Kebangsaan Dalam Pendidikan Karakter Bangsa" makalah yang disajikan dalam seminar di Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya 29 April 2014.

toeannja: kemaoean, sedjarah, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean...”. Kalimat itu menunjukkan bahwa terbentuknya identitas sebagai Bangsa Indonesia karena adanya kesatuan kemauan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Perasaan persamaan satu bangsa, tanah air, dan bahasa tersebut kemudian diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Seperti halnya dalam Kongres Pemuda Indonesia I, dalam Kongres Pemuda Indonesia II kata “persatuan” menjadi marwah perjuangan kemerdekaan.

Ikrar pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah kesadaran sebuah *nation* bagi Bangsa Indonesia. kesadaran ini baru muncul pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi etnis, budaya, agama, maupun bahasa. Harsya W. Bachtiar, membandingkan Bangsa Indonesia ketika itu tidak dengan satu bangsa saja seperti Arab, Jerman, Italia, atau Perancis, melainkan dengan penduduk seluruh benua Eropa. Penduduk benua Eropa terdiri atas berbagai bangsa, yang kemudian terbagi lagi menjadi berbagai negara, dengan berbagai agama yang dipeluknya.

Ketika negara-negara Eropa banyak menghadapi perang dalam pembantukan negara bangsa, berbagai suku bangsa di Indonesia justru membentuk gerakan yang melahirkan kesadaran nasional sebagai bangsa yang mereka namakan Indonesia. Penduduk kepulauan Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasanya masing-masing. Pendudukan di seluruh kepulauan Indonesia juga memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buda dan

berbagai aliran kepercayaan lainnya. Sebelum munculnya kesadaran nasional, di Indonesia juga banyak kerajaan. Bahkan sampai Indonesia merdeka, di Jawa Tengah masih ada empat kerajaan merdeka, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Di luar itu, masih banyak bangsa di Indonesia yang merdeka, sama seperti negara-negara di benua Eropa (Bachtiar, 1981: 27). G.J. Resink bahkan berpendapat bahwa sampai tahun 1915, masih banyak kapal di laut Nusantara yang berbendera berbagai kerajaan di Indonesia. Bendera-bendera tersebut berdasarkan kajian hukum internasional menurut Resink menunjukkan masih banyaknya kerajaan merdeka di Indonesia (Resink, 2017).

Meskipun demikian, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia pada awal abad ke-20 dapat mengesampingkan perbedaan latar belakang tersebut demi mewujudkan persatuan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka. Semua organisasi pemuda waktu itu menyadari penuh perlunya persatuan untuk dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kongres pemuda Indonesia pertama terjadi karena terbentuknya sebuah komite yang anggotanya meliputi pengurus berbagai organisasi pemuda yang menginginkan terbentuknya sebuah badan sentral yang bertujuan untuk memajukan faham persatuan kebangsaan. Di samping itu, badan sentral juga diharapkan dapat mengeratkan hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Keinginan untuk mewujudkan badan sentral organisasi pemuda juga yang mendorong dilaksanakannya kongres pemuda Indonesia yang kedua (Pringgodigdo, 1986: 105–105). Walaupun badan sentral gerakan pemuda seperti yang diinginkan berbagai

organisasi pemuda tidak terbentuk, namun kongres pemuda Indonesia yang kedua tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang sangat monumental, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Gerakan pemuda yang melahirkan semangat kebangsa berjalan tidak memakan waktu lama. Kesadaran berbangsa, kalau tonggaknya dimulai sejak berdirinya Budi Utomo pada dapat disebut sebagai benih lahirnya suatu persatuan dan kesadaran sebagai suatu bangsa mulai pada tahun 1908. Bahkan dalam organisasi seperti Budi Utama pada awal kelahirannya memiliki berbagai aliran, yang oleh Sartono Kartodirdjo dikelompokkan sebagai aliran tradisional yang diwakili oleh dr. Radjiman Widiodinigrat, dan golongan intelegensia progresif yang diwakili oleh dr. Tjipto Mangoenkoesoemo.

Konfrontasi kedua aliran tersebut secara terbuka ditunjukkan dalam kongres *Jong Java* di Yogyakarta, pada tanggal 5 Oktober 1908. Perdebatan antara kedua kelompok tersebut bukan hanya soal arah dan tujuan pergerakan, tetapi bahkan bahasa yang digunakan. Kelompok pertama menggunakan Bahasa Jawa dan kelompok kedua menggunakan Bahasa Melayu. Golongan pertama menghendaki langkah secara bertahap dalam mencapai kemajuan dengan mengikuti tahapan jenjang yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan kelompok kedua menghendaki gerakan politik yang bersifat radikal untuk mendo-brak masyarakat kolonial yang kolot, statis, dan diskriminatif. Ide dan gagasan Tjipto yang revolusioner dengan jangkauan jauh ke masa depan belum banyak menarik perhatian dalam organisasi Budi Utomo (Kartodirdjo, 1993: 103).

Sikap revolusioner Tjipto selanjutnya terwadahi dalam *Indische Partij*, sebuah organisasi yang didirikannya bersama Ki Hadjar Dewantara dan E.F.E. Douwes Dekker pada tahun 1912. Tujuan organisasi ini sangat jelas, yaitu kemerdekaan bagi Bangsa Hindia. Tuntutan agar Hindia mendapatkan kemerdekaan penuh kembali disampaikan oleh Abdul Muis (Sarekat Islam) dan R. Ng. Dwidjosewojo (Budi Utomo) pada tahun 1917 ketika keduanya menghadap parlemen Belanda bersama anggota *Comite Indie Weerbaar* (Komite Ketahanan Hindia) lainnya seperti utusan dari *Prinsen Bond* (Persekutuan Bangsawan Yogyakarta), *Regenten Bond* (Perkumpulan para bupati), dan Perserikatan Minahasa. Mereka belum menggunakan kata “Indonesia”.

Kata Indonesia baru digunakan pada tahun 1922. Sebelumnya ada beberapa nama yang digunakan untuk menyebut Indonesia. Nama yang paling lazim adalah *Indische* atau *Indie*, Edward Douwes Dekker dalam karyanya yang terkenal *Max Havelaar*, menggunakan nama *Insuliede*, dan Sukarno dalam otobiografinya mengklaim pernah menggunakan nama Nusantara untuk menyebut Indonesia (Nagazumi, 1976: 6 – 12). Ketika para mahasiswa Indonesia di Belanda mengganti nama organisasinya dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* kata Indonesia menjadi simbol dari persatuan organisasi-organisasi pergerakan. Sejak itu, gerakan mahasiswa Indonesia di Belanda menyatakan bahwa “Indonesia merdeka” merupakan semboyan dari gerakan pemuda Indonesia. Radikalisme gerakan pemuda Indonesia di Belanda oleh Engleson dilihat sebagai refleksi gerakan nasionalisme Indonesia (En-

gleson, 1993).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sumpah pemuda yang diikrarkan tanggal 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, para pejuang bangsa bukan hanya berikrar menyatakan sebuah negara bangsa dan tanah air dengan bahasa kesatuan yang disebut Indonesia. Di sini mereka juga pertama kali mendengarkan musik Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera mereka putih, yang juga pertama kali dikibarkan. Peristiwa tersebut menunjukkan lahirnya sebuah kesadaran nasional untuk menyatukan diri dalam sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Gerakan kebangsaan lahir digerakan oleh para pemuda berpendidikan. Pendidikan yang mengantarkan mereka bertemu, berinteraksi dengan sesama peserta didik dari berbagai suku bangsa, daerah, dan agama. Mereka umumnya tinggal di asrama-asrama mahasiswa, dan berhimpun dalam diskusi-diskusi kebangsaan, yang membuka cakrawala dunia. Mereka mempelajari gerakan-gerakan nasionalisme dari berbagai negara. Kesadaran berbangsa tumbuh dan bergerak dengan sangat cepat. Jika Budi Utomo yang lahir pada 1908 disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran berbangsa, maka sumpah pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan tonggak dari berdirinya sebuah bangsa. Rasa toleransi, penghargaan terhadap perbedaan menjadi modal dari tumbuhnya persatuan menuju Indonesia merdeka. Jika ditarik dari tahun

1908, sejak berdirinya Budi Utomo hingga pernyataan sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 hanya berlangsung dalam kurun waktu 20 tahun. Sejak tahun 1928, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dapat dikatakan sebagai perlawanan Bangsa Indonesia *de facto*, melawan penjajahan Belanda.

### Saran

Perlu dilakukan kajian akademik tentang Sumpah Pemuda. Kajian ini dilakukan dengan menggali sumber-sumber primer yang berkaitan dengan peristiwa sumpah pemuda. Selain dari pernyataan dan kisah romantis para pemuda yang mengalami peristiwa tersebut, kajian ini perlu juga menggali sumber primer yang tersimpan dalam arsip di Arsip Nasional RI, maupun sumber-sumber dari berita berbagai surat kabar sezaman yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa besar, sehingga tentu menjadi pemberitaan berbagai surat kabar yang terbit pada sekitar tanggal peristiwa tersebut terjadi. Kajian tentang sumpah pemuda juga perlu dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber arsip untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah Hindia Negara sebagai penyelenggara pemerintahan tentang pernyataan bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam teks Sumpah Pemuda. Kajian tersebut akan memiliki dampak besar terhadap pelestarian nilai-nilai perjuangan untuk pendidikan karakter generasi muda Indonesia masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1972). *Java in a Time of Revolution, Occupation, and Resistance. 1944-1946*. Itaca: Cornell University Press.
- Bachtiar, H.W. (1981), 'Sekali Lagi Persatuan Bangsa', dalam Oemar Bakry, *Bunga Rampai Sumpah Pemuda: Satu Bahasa, Bahasa Indonesia*. Jakarta: Mutiara.
- Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Departemen van Landbouw, Nijverheid en Handel (1923). *Jaarverslag van den Landbouwvoorlichtingsdienst over 1920-1921*. Weltreveden: Landsdrukkerij.
- Djohan, Bahder (1986). 'Menuju ke Sumpah Pemuda', dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ingleson, J. (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Grafiti Press.
- Kahin, J. McT. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Legge, J.D. (2003). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Grafiti.
- Miert, H.V. (2003). *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia*. Jakarta: Hasta Mitra & Pustaka Utan Kayu
- Nagazumi, Akira (1976). 'Indonesia dan orang-orang Indonesia, Semantik dalam Politik', dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat, *Indonesia: Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor
- \_\_\_\_\_. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Otomo 1808-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Niel, Robert Van. (1960). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Den Haag: Uitgeverij W. Van Hoeve
- Noer, D. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES
- Poeponegoro, J., Notosusanto, N. (1990). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*: Jakarta: Balai Pustaka
- Pringgodigdo, AK (1986). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Rahmat (2003). 'Sumpah pemuda: antara idealisme dan realisme pendidikan politik'. *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1 (no. 1).
- Resink, G.J. (2017.) *Bukan 350 Dijajah*, Yogyakarta: Ombak
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Sejarah Nama Indonesia (2018). Tersedia pada [www.id.wikipedia.org/wiki/sejarah\\_nama\\_Indonesia](http://www.id.wikipedia.org/wiki/sejarah_nama_Indonesia). Diakses tanggal 31 oktober 2018.
- Sutherland, H. (1979). *The Making of a Bureaucratic Elite*. Singapore; Heinemann Educational Books
- Yayasan Gedung-gedung Bersejarah (1986). *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*. Jakarta: Balai Pustaka
- Yayasan Sumpah pemuda. (1984). *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kunia Esa.
- Wahyono, Effendi (2013). 'Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah Kebangkitan Nasional', disampaikan pada orasi ilmiah Wisuda UT Periode I tahun 2013.
- \_\_\_\_\_. (2014) Effendi Wahyono, 'Aktualisasi Nilai-Nilai Pergerakan Kebangsaan dalam Pendidikan Karakter Bangsa' makalah disajikan dalam seminar di Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya, 29 April 2014.